



Baharuddin Siagian, S.H., M.Si
Bupati Batu Bara



Syafrizal, S.E., M.AP
Wakil Bupati Batu Bara



LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
BATU BARA

TAHUN
2024



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

INSPEKTORAT DAERAH

Desa Mangkai Baru, Lima Puluh, Batu Bara, Sumatera Utara 21255

Laman inspektorat.batubarakab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lima Puluh, 21 Maret 2025



INSPEKTUR
KABUPATEN BATU BARA

HASRUL IRFAN, S.Kom, MM
PEMBINA Tk.I
NIP. 19831215 200804 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama Tahun 2024. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara yaitu: **“KABUPATEN BATU BARA SEBAGAI DAERAH INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA PERTANIAN YANG BERIMAN, MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA BERJAYA”** dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2024 – 2026 .

Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak terlepas dari upaya dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yang turut serta untuk memajukan Kabupaten Batu Bara, baik itu dari Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah beserta DPRD Kabupaten Batu Bara yang telah merumuskan kebijakan, melaksanakan serta pengawasan Program Pemerintah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.

Lima Puluh, 26 Maret 2025

Dupati Batu Bara,

Baharuddin Siagian



IKHTISAR EKSEKUTIF

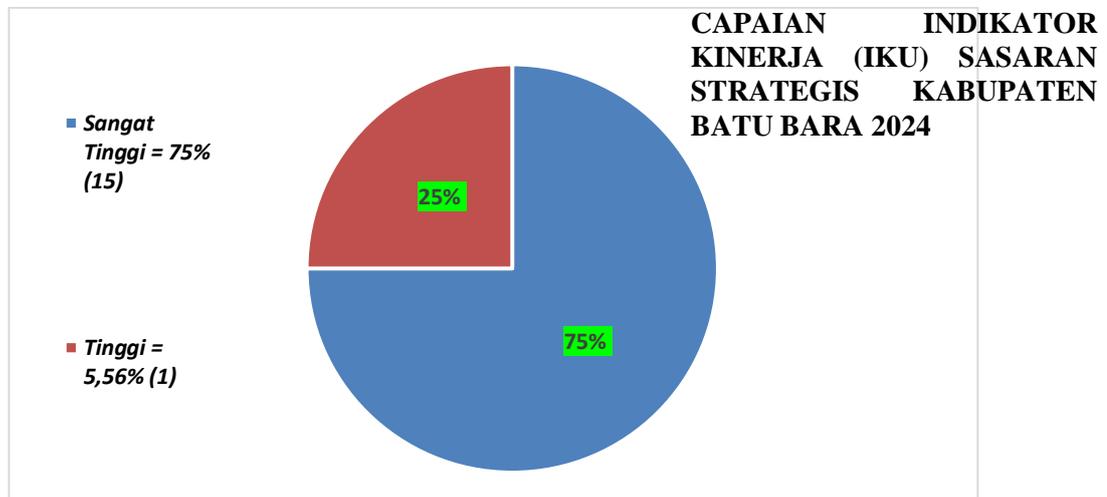
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Perlu untuk diingat, Laporan Kinerja tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap perangkat daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Kabupaten Batu Bara tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Batu Bara.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara tahun 2024 berpedoman kepada RPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batubara Tahun 2024-2026. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama sebagai berikut :



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 (dua puluh) indikator kinerja utama Bupati tahun 2024, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 75% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 6 (enam) IKU diantaranya mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 5 (lima) IKU atau 25% masuk dalam kriteria Tinggi.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan berbagai unsur baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas

dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Batu Bara untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
A.1. Sistematika Penyusunan	1
A.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
A.3. Maksud dan Tujuan	3
A.3. Struktur Organisasi	4
B. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara	5
C. Perekonomian	7
C.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	7
D. Ketenagakerjaan	11
E. Kesehatan.....	11
F. Indeks Pembangunan Manusia.....	12
F.1. Perbandingan IPM Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara	12
F.2. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia Batu Bara Tahun 2024.....	13
G. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	14
H. ISU STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Pembangunan Daerah	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	38
C. Anggaran Tahun 2024.....	44
BAB III Akuntabilitas Kinerja	45
A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2024	46
A.2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis	

Capaian Kinerja	49
B. Akuntabilitas Anggaran.....	175
C. BAB IV Penutup	177

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.	PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024	8
Tabel. 1.2.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	9
Tabel. 1.3.	Perbandingan IPM Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	13
Tabel. 1.4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batu Bara Menurut Komponen, Tahun 2020-2024	14
Tabel. 2.1.	Persandingan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Kabupaten Batu Bara	23
Tabel. 2.2.	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.....	24
Tabel. 2.3.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kabupaten Batu Bara.....	35
Tabel. 2.4.	Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Batu Bara Tahun 2024	37
Tabel. 2.5.	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja 2024 Pemerintah Kabupaten Batu Bara.....	39
Tabel. 2.6.	Anggaran Belanja 2024	44
Tabel. 3.1.	Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Skala Pengukuran Ordinal	46
Tabel. 3.2.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel. 3.3.	Rincian sasaran dan indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Batu Bara 2024	49
Tabel. 3.4.	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.....	50
Tabel. 3.5.	Predikat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara 2024.....	53
Tabel. 3.6.	IPM Kabupaten Batu Bara dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024	55
Tabel. 3.7.	Perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018-2024....	74
Tabel. 3.8.	Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan 2024	74
Tabel. 3.9.	IKM Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.....	83
Tabel. 3.10.	Persentase Angka Kemiskinan 2020-2024.....	87
Tabel. 3.11.	Data Produksi Ikan berdasarkan pengelompokan jenis/komoditas Tahun 2023-2024	104
Tabel. 3.12.	Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Dari Tahun 2020-2024 Di Kabupaten Batu Bara	121
Tabel. 3.13.	Jenis-Jenis Inovasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024	136
Tabel. 3.14.	Kondisi jalan mantap Kabupaten Batu Bara periode 2023-2024	150
Tabel. 3.15.	Klasifikasi status desa dari hasil perhitungan IDM Tahun 2022 dan 2023 Kab. Batu Bara.....	170
Tabel. 3.16.	Perbandingan Gini Ratio antara nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Batu Bara	173

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2024	6
Grafik 1.2	Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)	10
Grafik 1.3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Serta Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Periode 2020-2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)...	10
Grafik 1.4	Jumlah ASN Per Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	15
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2024.....	48
Grafik 3.2	Capaian Indikator Kinerja Per Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2024.....	53
Grafik 3.3	Pertumbuhan RTLS dan HLS Tahun 2020-2024	67
Grafik 3.4	Persentase Kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 ..	88
Grafik 3.5	Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023	110
Grafik 3.6	Perbandingan Industri Kecil dan Rumah Tangga di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2024	111
Grafik 3.7	Perbandingan Sektor Perdagangan Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional tahun 2020-2024	122
Grafik 3.8	Perkembangan TPT Nasioanal, Provinsi Sumut dan Kabupaten Batu Bara Tahun 2022-2024	128
Grafik 3.9	Perbandingan TPT dan TPAK Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2024	129
Grafik 3.9	Trend Indeks Gini Kabupaten Batu Bara Periode 2020-2024	172
Grafik 4.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.....	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Batu Bara	5
------------	--------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja dan capaian kinerja.. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presdien Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran, selain menjadi media pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

A.1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Perencanaan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja, kemudian disampaikan informasi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- 1) Lain-lain yang dianggap perlu

A.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan akuntabel;
2. Merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun 2024 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.

Tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara selama tahun anggaran 2024.

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dan sebagai bahan acuan perbaikan untuk tahun berikutnya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya menerapkan asas transparan dan akuntabel.

A.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan;
 17. Dinas Perikanan dan Peternakan;

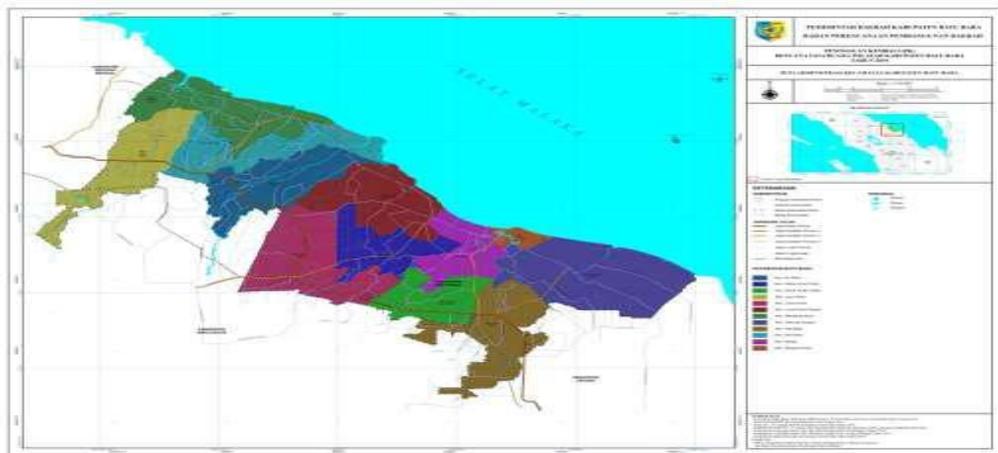
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara adalah 90.496 Ha yang terdiri dari 12 Kecamatan serta 151 Desa/Kelurahan definitif yang terdiri dari 141 desa dan 10 kelurahan, dengan rincian sebagaimana dikemukakan pada Tabel berikut:

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Batu Bara



Secara geografis Kabupaten Batu Bara terletak antara 3°03' - 3°26' LU dan 99°01' - 100°00' BT. Secara Administrasi Kabupaten Batu Bara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Meranti Kabupaten Asahan dan Ujung

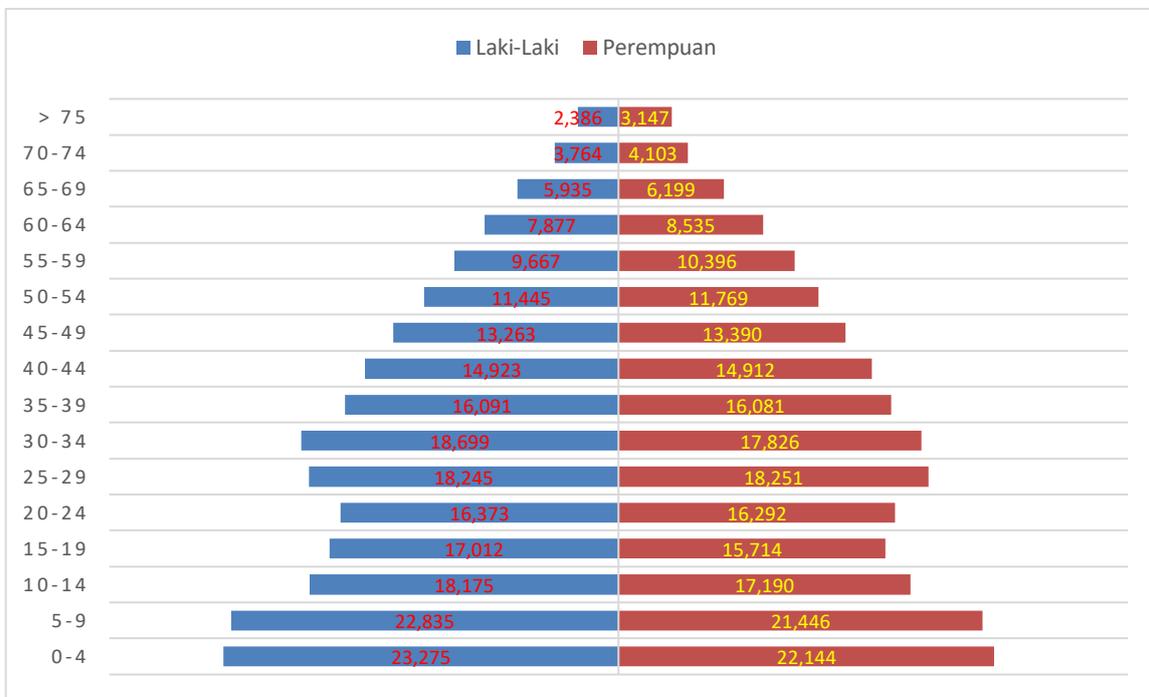
Padang Kabupaten Simalungun.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan Tebing tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.

Penduduk Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Batu Bara dalam angka 2025) sebanyak 437.360 jiwa yang terdiri atas 219.965 (50,29%) jiwa penduduk laki-laki dan 217.395 (49,71%) penduduk perempuan. Dengan kepadatan mencapai 492,59 jiwa/km² per rumah tangga 4 orang.

Grafik 1.1

Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 286.761 jiwa. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa usia kelompok produktif yang paling banyak di kisaran kelompok usia 25-29 tahun dengan jumlah sebanyak 36.496 jiwa. Perbandingan antara kelompok usia produktif dengan usia non produktif adalah 1,9:1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif sangat kecil.

C. PEREKONOMIAN

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, kebijakan perekonomian Kabupaten Batu Bara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada Peningkatan investasi, Peningkatan ekonomi daerah dan menurunkan tingkat pengangguran

C.1. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dengan kata lain menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kabupaten Batu Bara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1.1.

PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

KBLI	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,	5382,26	5640,46	5992,67	6182,03	6305,39
B	Pertambangan dan pengalihan	34,27	34,46	36,05	37,37	37,39
C	Industri Pengolahan	10841,09	10994,56	11.287,58	11,760,46	12.432,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,69	16,22	16,79	17,24	18,04
E	Pengadaan Air: Pengelolaan Sampah, limbah, daur ulang	7,04	7,20	7,23	7,38	7,54
F	Konstruksi	1506,39	1507,12	1520,68	1563,74	1.557,16
G	Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor	3917,03	4058,01	4322,78	4578,69	4768,03
H	Transportasi dan pergudangan	804,22	799,63	831,34	845,79	863,05
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	267,24	267,17	278,89	299,67	316,81
J	Informasi dan komunikasi	159,13	170,33	178,09	188,91	199,49
K	Jasa keuangan dan asuransi	70,06	72,09	75,02	79,72	83,05
L	Real estate	273,23	273,99	281,01	289,1	295,78
M, N	Jasa perusahaan	21,52	21,45	22,24	23,32	23,83
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	421,47	419,47	419,13	424,98	469,92
P	Jasa Pendidikan	112,15	113,28	116,7	120,71	124,81
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan	69,93	69,22	73,05	77,81	83,22
R, S, T, U	Jasa Lainnya	20,93	21,37	22,96	25,70	27,73
	PDRB	23923,64	24486,06	25482,21	26.522,68	27.614,17

Sumber Data BPS: BARADA 2025

Tabel.1.2.**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024**

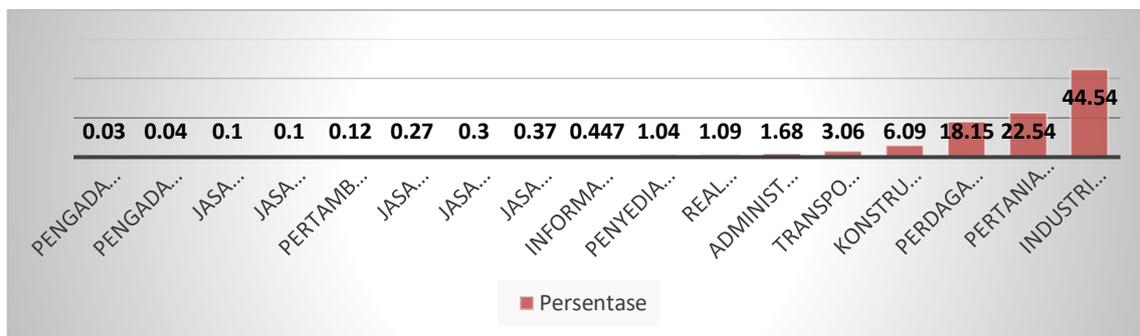
KBLI	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,	19,51	20,25	21,08	21,91	22,54
B	Pertambangan dan pengalihan	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12
C	Industri Pengolahan	45,62	45,72	45,55	44,35	44,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
E	Pengadaan Air: Pengelolaan Sampah, limbah, daur ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,14	6,85	6,64	6,55	6,09
G	Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor	17,96	17,89	17,82	18,37	18,15
H	Transportasi dan pergudangan	3,39	3,21	3,17	3,18	3,06
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,13	1,06	1,02	1,04	1,04
J	Informasi dan komunikasi	0,49	0,50	0,49	0,49	0,47
K	Jasa keuangan dan asuransi	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27
L	Real estate	1,32	1,25	1,19	1,15	1,09
M,N	Jasa perusahaan	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1,96	1,84	1,67	1,60	1,68
P	Jasa Pendidikan	0,44	0,42	0,39	0,38	0,37
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan	0,32	0,30	0,29	0,30	0,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data BPS: BARADA 2025

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur perekonomian Kabupaten Batu Bara didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran. Ketiga kategori tersebut memiliki peranan sebesar 85,14% terhadap total PDRB Kabupaten Batu Bara tahun 2024. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten

Batu Bara pada tahun 2024 dihasilkan oleh industri pengolahan yaitu mencapai 44,54 %. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian-kehutanan dan perikanan sebesar 22,54 % dan lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,1 %. Grafik 1.2 menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kabupaten Batu Bara tahun 2024 yang diurut dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku, sebagai berikut:

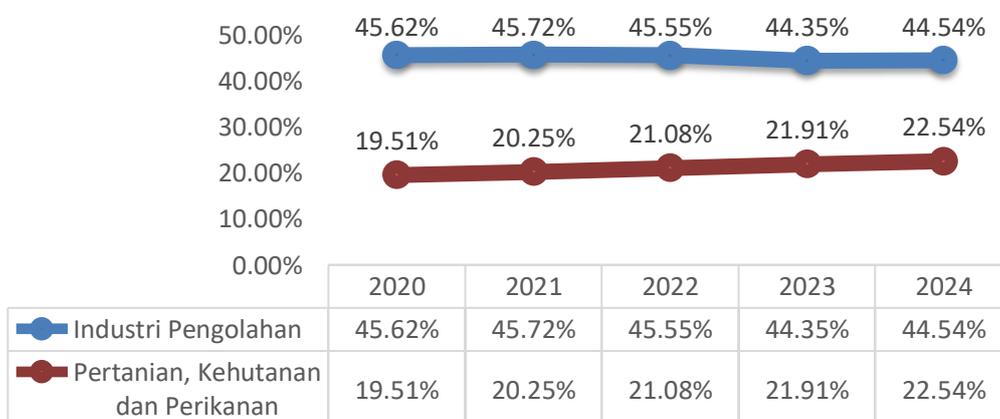
Grafik 1.2.
Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)



Menyimak data diatas, pada tahun 2024, sektor industri pengolahan masih merupakan sektor tertinggi yang memberikan peranan terhadap total PDRB Kabupaten Batu Bara.

Berikut ini grafik lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB Kabupaten Batu Bara dari tahun 2020-2024:

Grafik 1.3.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Serta Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Periode 2020-2024 (Atas Dasar Harga Berlaku)



Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara; BARADA 2025

D. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, pada tahun 2024 angkatan kerja di Batu Bara sebagian besar berpendidikan SMA dengan persentase mencapai 37,11, kemudian berpendidikan SD, tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah sebesar 34,79, angkatan kerja yang berpendidikan SMP dan perguruan tinggi masing-masing sekitar 18,76 dan 9,34%. Jika dilihat dari status pekerjaannya lebih dari sepertiga (37,73 %) penduduk yang bekerja adalah buruh/karyawan. Penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar mencapai 10,96% sedangkan berusaha sendiri sebesar 23,64 %. Penduduk sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan pekerja bebas masing-masing sebesar 12,94% dan 11,02%, sedangkan sisanya (3,72%) adalah pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap/dibayar.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Batu Bara pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 sebesar 127 pekerja. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, pada tahun 2024 terdapat 83 laki-laki dan 44 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan. Sementara itu menurut lokasinya, Kecamatan Sei Suka merupakan kecamatan yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak di tahun 2024 yaitu sebesar 107 usaha dengan jumlah tenaga kerja terdaftar sebesar 8.126 pekerja.

E. KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Batu Bara terdapat 4 unit rumah sakit, 15 unit puskesmas, sebanyak 61 unit puskesmas pembantu, posyandu sebanyak 529 unit, Poliklinik sebanyak 28 unit serta polindes sebanyak 34 unit.

Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Batu Bara baik negeri maupun swasta terdiri dari 128 orang dokter umum, 70 orang dokter spesialis, 41 orang dokter gigi dan perawat 424 orang. Sementara itu tenaga medis pemerintah lainnya seperti bidan ada 716 orang, tenaga kefarmasian ada 63 orang, tenaga kesehatan masyarakat 64 orang, tenaga kesehatan lingkungan ada 15 orang, tenaga gizi 25

orang dan ahli laboratorium medis ada 2 orang.

Di Kabupaten Batu Bara, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2024 jumlah PUS bertambah menjadi 59.374 pasangan dari 59.063 pasangan pada tahun 2023.

F. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indek Pembangunan manusia di Batu Bara terus mengalami kemajuan. Pada Tahun 2024 IPM Batu Bara mencapai 73,14 atau meningkat 0,58 poin jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 72,56. Peningkatan IPM tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun hidup layak. Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024, IPM tertinggi di Sumatera Utara adalah Kota Medan sebesar 83,23 diikuti Kota Pematangsiantar sebesar 81,17 pada posisi kedua, dan Kota Tebing Tinggi sebesar 78,68 pada posisi ketiga.

Anak-anak yang pada tahun 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,12 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 13,11 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,51 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, masyarakat Batu Bara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 11.373 juta pertahun. Angka ini lebih tinggi sebesar 440 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan pengeluaran rata-rata perkapita sebesar 10.933 juta rupiah per tahun.

F.1. Perbandingan IPM Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara, maupun dengan kabupaten/ kota secara nasional.

Dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Utara, Kota Medan memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi sebesar 83,23. Nias Barat merupakan kabupaten/kota yang memiliki IPM

terendah sebesar 66,13. Berikut tabel Perbandingan IPM se Provinsi Sumatera Utara tahun 2024:

Tabel 1.3.
Perbandingan IPM Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Kab	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita	IPM
1.	Nias	71,89	13,31	6,40	7.698	66,13
2.	Mandailing Natal	71,88	13,87	9,11	10.644	73,44
3.	Tapanuli Selatan	71,77	13,72	9,56	12.213	75,18
4.	Tapanuli Tengah	71,96	13,50	8,92	11.128	73,34
5.	Tapanuli Utara	74,36	13,74	10,31	12.382	77,48
6.	Toba Samosir	74,54	13,60	10,77	12.960	78,44
7.	Labuhan Batu	73,13	13,26	9,50	12.102	75,20
8.	Asahan	73,65	12,65	8,85	12.301	74,17
9.	Simalungun	74,39	13,09	9,73	12.119	75,88
10.	Dairi	74,38	13,53	9,89	11.355	75,88
11.	Karo	74,39	13,26	10,12	13.278	77,49
12.	Deli Serdang	73,81	13,40	10,29	13.279	77,56
13.	Langkat	74,39	13,28	8,74	12.080	74,85
14.	Nias Selatan	71,77	12,92	6,25	7.730	65,87
15.	Humbang Hasundutan	74,27	13,46	10,13	8.844	73,33
16.	Pakpak Bharat	72,95	13,91	9,73	9.158	73,09
17.	Samosir	74,35	13,52	9,61	9.634	73,77
18.	Serdang Bedagai	73,39	12,65	9,12	12.015	74,15
19.	Batu Bara	72,97	13,12	8,51	11.373	73,14
20.	Padang Lawas Utara	71,74	13,54	9,82	10.925	74,16
21.	Padang Lawas	71,67	13,87	9,63	9.821	73,10
22.	Labuhan Batu Selatan	72,71	13,53	9,19	12.353	75,11
23.	Labuhan Batu Utara	74,23	13,58	9,14	12.839	76,20
24.	Nias Utara	72,30	13,37	7,05	7.189	66,42
25.	Nias Barat	72,55	12,99	7,26	6.740	65,66
26.	Sibolga	74,19	13,43	10,45	12.713	77,52
27.	Tanjung Balai	74,18	13,15	9,69	12.264	75,95
28.	Pematang Siantar	75,03	14,61	11,82	13.349	81,17
29.	Tebing Tinggi	74,29	13,13	10,87	13.900	78,68
30.	Medan	75,09	14,79	11,79	16.069	83,23
31.	Binjai	74,45	14,18	11,20	12.015	78,67
32.	Padang Sidempuan	73,73	14,62	11,13	11.964	78,61
33.	Gunung Sitoli	74,23	13,79	8,76	9.056	72,30

F.2. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia Batu Bara Tahun 2024

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batu Bara Menurut Komponen,
Tahun 2020-2024

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup	Tahun	66,96	67,13	67,55	72,63	72,97
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,64	12,63	13,11	13,12
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,06	8,07	8,26	8,50	8,51
Pengeluaran Perkapita	Rp.000	10410	10539	10755	10.933	11.373
IPM		68,36	68,58	69,51	72,56	73,14
Pertumbuhan IPM	%	0,01	0,22	0,93	3,05	0,58

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH

Pemerintah Kabupaten Batu Bara di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan pemilihan umum kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah, Yakni:

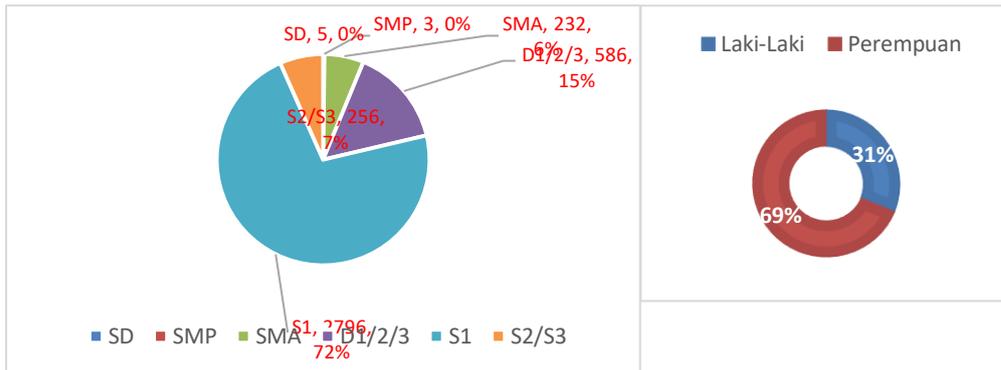
- a. Sekretariat Daerah dengan 9 Bagian
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas (16 dinas)
- e. Badan (7 Badan)
- f. Kecamatan (12 Kecamatan)
- g. Kelurahan (10 Kelurahan)

Kondisi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki sumber daya aparatur pemerintah sebanyak 3.536 orang ASN dan 342 Orang ASN PPPK, yang terdiri dari 1.140 orang ASN laki-laki (32,24%) dan 2.396 orang ASN perempuan (67,76%), dan 70 orang ASN PPPK laki-laki (20,47%), serta 272 orang ASN PPPK perempuan (79,53%). Apabila dilihat berdasarkan

jenjang pendidikan seluruh ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 2.796 Orang (72,10%), diikuti jenjang pendidikan Diploma sebanyak 586 orang (15,11%), SMA sebanyak 232 orang (5,98), S2/S3 sebanyak 256 Orang (6,6%), sisanya sebanyak 8 orang mengenyam pendidikan SD dan SMP.

Grafik 1.4

Jumlah ASN Per Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan



G. ISU STRATEGI

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dari berbagai penelaahan pengarusutamaan permasalahan di Kabupaten Batu Bara serta memperhatikan isu-isu yang berkembang baik di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional, maka pengarusutamaan isu strategis Kabupaten Batu Bara adalah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Terhadap Hak Anak, Ketangguhan Bencana Serta Pelayanan Dasar.
2. Belum optimalnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Penguatan Konektivitas Dan Pengembangan Antar Wilayah Dengan PusatPusat Kegiatan Strategis Daerah Yang Berbasis Penguatan Kualitas

Lingkungan Hidup.

3. Belum optimalnya Daya Saing, Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penguatan Dan Peningkatan Nilai Tambah Pada Sektor Industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
4. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Serta Pelayanan Publik Berbasis Sistem Teknologi Informasi Dan Inovasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

Pada masa transisi kepemimpinan daerah, terutama setelah pemilihan bupati, penting untuk memastikan kelangsungan pembangunan daerah tanpa adanya kekosongan perencanaan. Dalam hal ini, penggunaan **Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** menjadi sangat relevan. RPD adalah dokumen perencanaan yang lebih fleksibel, yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang sudah berjalan dapat terus dilaksanakan dengan efektif, meskipun terdapat perubahan dalam kepemimpinan daerah

Salah satu alasan utama penggunaan RPD adalah adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** yang baru. Proses penyusunan RPJMD memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melibatkan penyusunan visi misi bupati terpilih, kajian strategis, serta proses persetujuan oleh DPRD. Sementara itu, selama masa transisi, pemerintahan daerah yang baru belum sepenuhnya siap untuk langsung mengimplementasikan RPJMD yang baru. Oleh karena itu, RPD yang lebih sederhana dan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini menjadi solusi yang tepat untuk menjaga kontinuitas program pembangunan.

RPD memberikan arah perencanaan yang lebih operasional dan praktis dalam jangka pendek, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini memungkinkan pemimpin sementara atau pejabat daerah yang sedang menjabat untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah berjalan, tanpa mengganggu proses transisi yang sedang berlangsung. Selain itu, penggunaan RPD dalam laporan kinerja memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan daerah, meskipun dalam masa transisi. Laporan ini juga mencerminkan komitmen pemerintahan daerah untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, meskipun belum ada RPJMD yang definitif.

Dengan demikian, penggunaan RPD tidak hanya memastikan kelangsungan pembangunan daerah, tetapi juga memfasilitasi pemerintahan baru untuk segera menyesuaikan diri dengan perencanaan yang ada, sembari menyiapkan RPJMD yang lebih komprehensif dan sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih.

RPD Kabupaten Batu Bara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batubara Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memiliki hubungan yang sangat erat dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kesesuaian antara kedua dokumen perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan di daerah tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara 2024-2026 mengaju kepada visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Batu Bara tahun 2005-2025, merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan latar belakang, potensi sumber daya, dan permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Batu Bara, visi tersebut adalah sebagai berikut:

**“KABUPATEN BATU BARA SEBAGAI DAERAH INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN JASA, SERTA PERTANIAN YANG BERIMAN,
MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA BERJAYA”**

Kalimat "**Kabupaten Batu Bara sebagai daerah industri, perdagangan dan jasa, serta pertanian**" bukan sekadar pemberitahuan tentang karakteristik wilayah, tetapi lebih kepada penegasan arah pembangunan dan identitas ekonomi daerah. Makna tegas yang tergambar pada kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penekanan pada Sektor Unggulan
 - a. Kabupaten Batu Bara ingin mengembangkan industri sebagai sektor utama,

didukung oleh perdagangan dan jasa sebagai penggerak ekonomi, serta pertanian sebagai sektor penopang yang tetap dipertahankan.

- b. Menunjukkan bahwa pembangunan diarahkan untuk memperkuat daya saing dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa, tetapi tanpa meninggalkan pertanian sebagai sektor tradisional yang masih memiliki peran penting.

2. Identitas dan Diferensial Daerah

- a. Mempertegas keunggulan kompetitif Batu Bara dibanding daerah lain.
- b. Tidak hanya mengandalkan satu sektor ekonomi, melainkan mengembangkan multisektor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan daerah yang telah memiliki aspek mendasar sebagai daerah industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan berlandaskan nilai-nilai keimanan serta kemandirian sebagai harapan menjadi suatu ideal pemerintahan di masa depan.

Selain itu harapan dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa:

- c. Kabupaten Batu Bara ingin menjadi pusat industri yang berkembang dengan berbagai sektor manufaktur dan pengolahan.
- d. Posisi Kabupaten Batu Bara yang terletak di pesisir timur Sumatera Utara dan berbatasan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional, memiliki potensi ekspor import dengan dukungan keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung.
- e. Pelabuhan Kuala Tanjung mampu menjadi pusat distribusi barang dan bahan baku industri.
- f. Pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung diharapkan dapat menjadi magnet investasi.

2. Potensi Pertanian:

- a. Lahan pertanian yang luas memungkinkan pengembangan tanaman

- hortikultura, dan perkebunan seperti kelapa sawit.
- b. Perikanan dan Kelautan memiliki potensi besar karena Kabupaten Batu Bara memiliki garis pantai yang panjang, mendukung sektor perikanan tangkap dan budidaya.
3. Beriman, Mandiri, Maju dan Sejahtera Berjaya dalam konteks lokal:
- a. Beriman: Nilai-nilai religius dan moral tetap menjadi landasan pembangunan daerah.
 - b. Mandiri: Kabupaten Batu Bara berusaha untuk tidak bergantung pada pihak luar dalam mengelola sumber daya dan ekonominya serta mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk lebih inovatif sehingga mampu mengembangkan potensi lokal.
 - c. Maju: Mengarah pada kemajuan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
 - d. Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja di sektor industri, jasa, dan pertanian.
 - e. Berjaya: Dengan kombinasi pengembangan industri, perdagangan, jasa, dan pertanian, Batu Bara diharapkan menjadi daerah yang unggul secara ekonomi, sosial, dan budaya di Sumatera Utara maupun tingkat nasional.

Dengan pemanfaatan potensi geografis yang optimal, visi Batu Bara sebagai daerah industri, perdagangan, jasa, dan pertanian yang maju dan sejahtera bukan hanya ambisi, tetapi tujuan yang realistis dan dapat dicapai.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi Kabupaten Batu Bara yang disusun untuk memperjelas langkah dalam perwujudan visi kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, cerdas, kreatif dan produktif

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
3. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing serta meningkatkan rasa aman masyarakat;
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Berkualitas guna menunjang kegiatan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Asri dan Lestari;
6. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan

Penjabaran pelaksanaan Ke-6 (enam) misi di atas, semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026, yang merupakan cerminan tentang urgensi permasalahan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Batu Bara.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung/manajerial. Namun, sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi keterkaitan visi dan misi yang digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara



Keenam misi saling berkaitan dan membentuk strategi pembangunan yang holistik bagi Kabupaten Batu Bara, misi 1 dan 2 berfokus pada penguatan sumber daya dan tata kelola pemerintahan, misi 3 dan 4 menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama, misi 5 menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, misi 6 memastikan pembangunan inklusi dan merata agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara berbasis 6 misi ini diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara penguatan ekonomi, infrastruktur, SDM, tata kelola pemerintahan, kelestarian lingkungan, dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat berjalan terarah, berkelanjutan, dan inklusif, guna mencapai visi daerah yang beriman, mandiri, maju, sejahtera, dan berjaya.

Jika 6 misi Kabupaten Batu Bara ditransformasikan ke dalam perencanaan pembangunan, maka secara garis besar akan terbentuk 5 pilar utama pembangunan yang saling terintegrasi:

1. Sumber Daya Manusia Unggul → Pendidikan, Pelatihan, Reformasi Birokrasi.
2. Ekonomi Kompetitif → Industri, Perdagangan, UMKM, Stabilitas Keamanan.
3. Infrastruktur Berkualitas → Transportasi, Layanan Publik, Digitalisasi.
4. Tata Ruang & Lingkungan Berkelanjutan → Zonasi, Regulasi, Konservasi.
5. Pembangunan Sosial Inklusif → Kesejahteraan, Kesetaraan, Kebersamaan.

Dengan memperhatikan 5 Pilar Pembangunan Kabupaten Batu Bara maka Prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan dampak strategisnya terhadap pencapaian visi daerah. Urutan prioritas disusun secara bertahap dari fondasi utama hingga sektor pendukung yang memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara pada Rencana Pembangunan Daerah dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Terhadap Hak Anak, Ketangguhan Bencana Serta Pelayanan Dasar Lainnya.

2. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Penguatan Konektivitas Dan Pengembangan Antar Wilayah Dengan Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Daerah Yang Berbasis Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Peningkatan Daya Saing, Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penguatan Dan Peningkatan Nilai Tambah Pada Sektor Industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Serta Pelayanan Publik Berbasis Sistem Teknologi Informasi Dan Inovasi.

Prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara juga dapat dilihat dukungannya terhadap prioritas pembangunan nasional melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang termuat dalam Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 2.1

Persandingan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Kabupaten Batu Bara

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kabupaten Batu Bara
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan kerja Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Terhadap Hak Anak, Ketangguhan Bencana Serta Pelayanan Dasar Lainnya.
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Penguatan Konektivitas Dan Pengembangan Antar Wilayah Dengan Pusat- Pusat Kegiatan Strategis Daerah Yang Berbasis Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Membangun Lingkungan Hidup,		

Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Terhadap Hak Anak, Ketangguhan Bencana Serta Pelayanan Dasar Lainnya
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyediaan Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga	
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Serta Pelayanan Publik Berbasis Sistem Teknologi Informasi Dan Inovasi

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan di dalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Batu Bara dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Batu Bara disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026

	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar 3. Peningkatan literasi penduduk 4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 2. Peningkatan kondisi gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat, serta keselamatan melahirkan. 3. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan kesehatan. 5. Peningkatan sarana kesehatan yang terjangkau 6. Peningkatan akses masyarakat pada layanan KB
2	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Kab. Batu Bara	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah 2. Pengoptimalan fungsi pengawasan keuangan dan kinerja OPD
		Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan profesionalitas ASN 2. Peningkatan kinerja perangkat daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan 3. Peningkatan penilaian kinerja ASN keberlanjutan dan sistimatis 4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan 5. Peningkatan pelayanan berbasis Teknologi Informasi 6. Pelaksanaan pelayanan berbasis Desa
3	Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Daerah	Menurunnya angka kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat 2. Pengembangan kesempatan kerja dan Berusaha
		Meningkatnya pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan realisasi PAD 2. Peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah

			3. Pembangunan sistem informasi keuangan daerah
		Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perternakan, dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan industri pengolahan hasil pertanian 2. Pembangunan industri pengolahan hasil perternakan 3. Pembangunan industri pengolahan hasil Perikanan
		Meningkatnya nilai tambah sektor Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan industri unggulan 2. Peningkatan nilai tambah produk
		Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura 2. Peningkatan produktivitas dan kualitas peternakan dan perikanan 3. Peningkatan daya saing komoditas pertanian 4. Peningkatan daya saing perikanan 5. Pembangunan sistem pemasaran terpadu berbasis digital 6. Pembangunan sentra pemasaran terpadu Pembangunan sistem jaringan Pemasaran
		Menurunnya tingkat pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja 2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja 3. Peningkatan kerjasama dengan industri

	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatnya inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi pemerintah kabupaten dengan lembaga pemerintah/lainnya terkait pengembangan infrastruktur strategis 2. Peningkatan keterlibatan lembaga non pemerintah, akadenisi, dan swasta dalam pembangunan 3. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam riset dan pengembangan Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan desa dan sekolah
4	Terciptanya Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Perumbuhan industri dan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas jalan kabupaten 2. Peningkatan pelayanan angkutan jalan umum Peningatan pelayanan transportasi
		Meningkatkan Kinerja Infrastruktur Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian kawasan kumuh 2. Pembangunan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin 3. Pembangunan rumah sewa bagi karyawan 4. Pembangunnn perumahan ASN 5. Peningkatan cakupan layanan air bersih 6. Peningkatan cakupan layanan sanitasi Peningkatkan cakupan layanan persampahan

5	Terkendalnya Penataan Ruang dan Penciptaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Industri	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2. Penyediaan rencana tata ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. 4. Penyediaan lahan untuk kepentingan umum.
6	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk tata kelola pembangunan desa 2. Peningkatan peran desa dalam penyusunan rencana pembangunan 3. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif 4. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sukses
7	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan koperasi yang aktif. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan UKM yang maju dan mandiri.

Uraian di atas merupakan strategi pencapaian tujuan, sasaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Untuk strategi yang dilakukan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Terhadap Hak Anak, Ketangguhan Bencana Serta Pelayanan Dasar Lainnya. Pada prioritas ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan dalam pembangunan sumber daya manusia sebagai berikut :

- a. Pembangunan, Peningkatan Dan Rehabilitasi Fasilitas Infrastruktur PAUD, SD DAN SMP.
Pembangunan Ruang Kelas, Ruang guru, Toilet, Perpustakaan Sekolah, Laboratorium, UKS dll.
- b. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Serta Peserta Didik.
Pemberian Beasiswa dan Insentif kepada Guru MDA serta Peningkatan Pendidikan Formal, Implementasi rencana aksi daerah paud holistik integratif, inisiasi sekolah inklusi.
- c. Peningkatan Minat Baca Dalam Mendukung Literasi Masyarakat
Pembangunan Perpustakaan Daerah.
- d. Pemenuhan Terhadap Target Universal Health Coverage Melalui Pemberian
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten kepada masyarakat.
- e. Penurunan Angka Prevalensi Stunting.
Pemberian MPASI, Pemberian makanan tambahan, Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil dan bayi, Peningkatan cakupan intervensi spesifik dan sensitif.
- f. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah.
Pemanfaatan Data P3KE dalam pengentasan Kemiskinan Ekstrim, Penyusunan Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim, Implementasi aksi P3KE.
- g. Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan Kesehatan.
Peningkatan Akreditasi Puskesmas
- h. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Kampanye Gerakan Stop BABS, CTPS, dan Menekan angka Penyebaran Malaria
- i. Peningkatan Kualitas Database dan Fasilitasi Pemberdayaan DTKS inventarisasi, validasi, dan pemuktahiran Bank Data serta Program

- Pemberdayaan terhadap DTKS.
- j. Pemberian Bantuan Sosial Terhadap PMKS.
Pemberian bantuan Usaha, Pemberian Alat bantu Disabilitas.
 - k. Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak
Pemenuhan terhadap indikator Kabupaten layak Anak, Perlindungan terhadap perempuan dan Hak Anak, Penerbitan Kartu identitas anak, Pembentukan TK Negeri Inklusi, Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
 - 1. Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Penyusunan Road Map Rencana Penanggulangan Bencana, Penetapan Peta Daerah Rawan Bencana, Pembangunan Penahan/Pemecah Ombak, Pembangunan kanal pada Sungai untuk pengendalian banjir ROB, Penyusunan Dokumen Kajian terkait kebencanaan dan Rehabilitasi Rumah Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - m. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan, Pemeliharaan, Perluasan SPAM, Jaringan perpipaan pada kawasan pedesaan dan Perkotaan.
 - n. Peningkatan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pembangunan, dan pengembangan pengelolaan sanitasi berkelanjutan.
 - o. Peningkatan Kualitas Pemukiman
Pembangunan / Rehabilitasi RTLH, Pembangunan PSU Permukiman.
 - p. Pelaksanaan rencana aksi nasional HAM (RANHAM) Kabupaten Batu Bara Mendorong Penyediaan Fasilitas Khusus bagi penyandang Disabilitas, mendorong Penyediaan Rumah aman bagi perempuan dan Anak.
 - q. Pelaksanaan program pembinaan ideologi pancasila & penanggulangan narkoba
Penguatan materi Pembinaan Ideologi pancasila dan Program Kampung Bersinar.
2. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Penguatan Konektivitas Dan Pengembangan Antar Wilayah Dengan Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Daerah Yang Berbasis Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup.
Beberapa kebijakan dalam mewujudkan Pembangunan infrastruktur

berkelanjutan dapat dilakukan transportasi, teknologi komunikasi informasi, lingkungan dan sarana pendukung lainnya sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
Pembangunan, Rekonstruksi, Pemeliharaan serta Rehab Jalan dan Jembatan.
 - b. Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan Pengendalian Sarana dan Prasarana Permukiman.
 - c. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
Peningkatan sarana rambu dan marka jalan serta Pemasangan LPJU
 - d. Pembangunan Jalan Usaha Tani
Pembangunan Jalan Usaha Tani yang menjadi penghubung sektor pertanian
 - e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup, Pembangunan TPA, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.
 - f. Pembangunan /Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pembangunan, Pemeliharaan dan Rekonstruksi Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau.
3. Peningkatan Daya Saing, Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penguatan dan Peningkatan Nilai Tambah Pada Sektor Industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan melalui :
- a. Pengelolaan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Pemberian bantuan sarana perikanan tangkap dan sarana pembudidayaan.
 - b. Pengembangan Nelayan Kecil Daerah Pemberian Asuransi Nelayan
 - c. Pengembangan Iklim Investasi
Penyusunan Peta Potensi Investasi, Peluang Usaha Kabupaten dan Pameran Apkasi, Kemudahan Pelayanan Perijinan Investasi.
 - d. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
Pemberian dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan hijauan pakan ternak.
 - e. Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian

- Pembangunan lantai jemur, pintu air, jaringan irigasi tersier, penyediaan alat mesin pertanian, dan sarana prasarana produksi.
- f. Peningkatan pengetahuan, kapasitas dan kompetensi SDM Perkoperasian Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotan dalam daerah Kabupaten/Kota.
 - g. Peningkatan Peluang Kesempatan Kerja Bagi Sektor Formal Dan Informal Penguatan Database Ketenagakerjaan, Pengawasan Lowongan pekerjaan pada sektor formal dan pelatihan di BLK.
 - h. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Peningkatan Kualitas Sarana Pasar Rakyat
 - i. Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan Jumlah Pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja berbasis kompetensi
 - j. Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
UMKM naik Kelas (dari Usaha mikro ke kecil, Kecil ke Menengah) dengan mempermudah fasilitas perijinan.
 - k. Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Bumdes dan Bumdesma.
Pemetaan potensi desa dan Penerapan teknologi tepat guna.
 - l. Pembinaan kepemudaan melalui kelompok pemuda pelopor.
Penguatan kelompok sadar lingkungan, sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar pendidikan, pangan, inovasi dan teknologi.
 - m. Pelestarian cagar Budaya.
Pendaftaran situs cagar budaya, perlindungan, pemanfaatan museum, pelestarian cagar budaya dan budaya tradisional. Pembinaan SDM, lembaga, dan pranata kebudayaan.
 - n. Kolaborasi Desa Wisata Dengan Pusat Pusat Usaha Unggulan Daerah.
Peningkatan Objek wisata dengan berkolaborasi dan memberdayakan BUMDES, Pelaku UMKM, dan Peningkatan Wastra Daerah.ata Dengan Pusat Pusat Usaha Unggulan Daerah.
 - o. Pengembangan Sentra Industri Unggulan Daerah.
Pembangunan pusat industri terpadu berbasis pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan.

- p. Transformasi Digital Bagi Pelaku Usaha.
Penyediaan Aplikasi terhadap pelaku usaha, memfasilitasi Pemasaran Pelaku UMKM melalui sistem Digital.
 - q. Peningkatan kualitas kemampuan produksi dan nilai tambah produk.
Peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai produk dan membantu legalitas produk.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Serta Pelayanan Publik Berbasis Sistem Teknologi Informasi dan Inovasi dapat dilakukan melalui
- a. Penyelenggaraan, Pembinaan Dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan.
Fasilitasi Terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan dan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data kependudukan.
 - b. Penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel.
Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara yang dilakukan melalui Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Pelaksanaan Pelaporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Memperpendek rentang Kendali Pemerintahan melalui lanjutan pembangunan Kawasan perkantoran Kabupaten Batu Bara, Pembangunan Mall Pelayanan Publik.
 - e. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
Dukungan Pendanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.
 - f. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis Riset Dan Kajian, Inovasi Dan Tehnologi Perencanaan
 - g. Pelaksanaan Kolaborasi Pentahelix (Pemda, Swasta, Dunia Usaha, Akademisi dan Pers/Media
- Strategi pembangunan Kabupaten Batu Bara mencakup berbagai aspek,

seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, dan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perumusan strategi pembangunan memerlukan pendekatan sistematis agar setiap kebijakan yang dibuat efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan formulasi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1 RPD Kabupaten Batu Bara 2024-2026, dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kemudian dirumuskan IKU. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara memprioritaskan sebanyak 9 (sembilan) tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dan 19 (sembilan belas) indikator. Rincian hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kabupaten Batu Bara

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, cerdas, kreatif dan produktif	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup	Badan Pusat Statistik
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	$(\text{Jumlah Lulusan} / \text{Jumlah Siswa Pada Jenjang Tingkat Tertinggi Tahun Sebelumnya}) \times 100 \%$	Badan Pusat Statistik
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Kab. Batu Bara	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	Opini Pemeriksaan BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan masyarakat	Sekretariat Daerah/APLIKASI SI SUKMA
3	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing serta meningkatkan rasa aman masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Daerah	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	$(\text{Jumlah penduduk Miskin} / \text{Jumlah Penduduk}) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
			Meningkatnya Pendapatan Daerah	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan	$(\text{Jumlah PAD} / \text{Jumlah Pendapatan}) \times 100 \%$	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	$(\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan} / \text{Jumlah PDRB}) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
			Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	$(\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri Pengolahan} / \text{Jumlah PDRB}) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik

			Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB	(Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Jumlah PDRB) x 100%	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan
			Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	(Jumlah Pengangur Terbuka Usia Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Angkatan Kerja) x 100%	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4	Mewujudkan Pelayanan Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Berkualitas guna menunjang kegiatan ekonomi daerah	Terciptanya Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pertumbuhan industri dan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Meningkatkan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	(Panjang Jalan Mantap / Total Panjang Panjang) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Terwujudnya Peningkatan Investasi	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN PMA)	Nilai Inventasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
5	Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Asri dan Lestari	Terkendalnya Penataan Ruang dan Penciptaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Industri	Terkendalnya Pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan Industri	Persentase Pengendalian Pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri	Luas kawasan yang diberikan izin / luas kawasan industri yang diberikan sesuai dengan peruntukan X 100 %	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

6	Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Membangun Desa	Jumlah IDM seluruh desa/Jumlah desa Ket: $IDM = \frac{1}{3}(IKS+IKE+IKL)$ <i>IKS</i> = Indeks Ketahanan Sosial <i>IKE</i> = Indeks Ketahanan Ekonomi <i>IKL</i> = Indeks Ketahanan Lingkungan	Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks Gini	Badan Pusat Statistik

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4.

Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Batu Bara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,93
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	2.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,60
		2.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	3.1	Opini BPK	Opini	WTP
		3.2	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (70,00)
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	5.1	Persentase Kemiskinan	Persen	11,03
6	Meningkatnya Pendapatan Daerah	6.1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan	Persen	13,98
7	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perternakan, Dan Perikanan	7.1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	23
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	8.1	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persen	46,50
9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	9.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,00
10	Menurunnya Tingkat Pengangguran	10.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,8-5,5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
11	Meningkatnya Inovasi Daerah	11.1 Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,0 (Inovatif)
12	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	12.1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	80
13	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	13.1 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	81,48 /60
14	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	14.1 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN PMA)	Rupiah	54 Triliun
15	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	15.1 Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persen	100
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,00
17	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.1 Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7176
18	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	18.1 Indeks Gini	Indeks	0,240

Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja 2024
Pemerintah Kabupaten Batu Bara

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	555.500.000	PAPBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25.026.442.250	PAPBD
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	248.250.000	PAPBD
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	517.950.000	PAPBD
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.142.394.734	PAPBD
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	680.191.182	PAPBD
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	251.665.000	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.557.321.229	PAPBD
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	55.800.000	PAPBD
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	194.542.538	PAPBD
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	323.515.000	PAPBD
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.024.000.000	PAPBD
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.291.121.172	PAPBD
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.694.158.000	PAPBD
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.708.424.000	PAPBD
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.718.915.674	PAPBD
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	338.000.000	PAPBD
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.222.828	PAPBD
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	65.963.000	PAPBD
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	912.236.400	PAPBD
21	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.380.800.000	PAPBD
22	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.030.001.005	PAPBD
23	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	281.761.980	PAPBD
24	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	67.192.307.220	PAPBD
25	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.776.054.492	PAPBD
26	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	509.661.300	PAPBD
27	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	141.229.380	PAPBD
28	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	35.000.000	PAPBD
29	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	574.650.000	PAPBD
30	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.969.959.777	PAPBD
31	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	500.000.000	PAPBD
32	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN	210.349.880	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
33	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	729.119.264	PAPBD
34	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	975.000.000	PAPBD
35	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	529.255.000	PAPBD
36	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.842.799.822	PAPBD
37	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	20.405.000	PAPBD
38	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	636.761.050	PAPBD
39	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	39.974.224	PAPBD
40	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	568.282.920	PAPBD
41	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	206.341.671	PAPBD
42	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.587.780.000	PAPBD
43	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.841.595.000	PAPBD
44	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.100.000.000	PAPBD
45	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.068.618.000	PAPBD
46	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	76.328.921	PAPBD
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.876.119.030	PAPBD
48	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	332.027.500	PAPBD
49	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	214.003.774.319	PAPBD
50	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	81.000.000	PAPBD
51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.281.919.899	PAPBD
52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	127.723.071.800	PAPBD
53	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.422.649.620	PAPBD
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.248.632.000	PAPBD
55	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	100.000.000	PAPBD
56	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.224.673.722	PAPBD
57	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	26.500.000	PAPBD
58	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.828.247.250	PAPBD
59	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	75.000.000	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
60	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	271.222.912	PAPBD
61	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	20.546.550	PAPBD
62	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.609.114.786	PAPBD
63	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	654.914.820	PAPBD
64	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	85.075.500	PAPBD
65	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	98.000.000	PAPBD
66	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.230.213.500	PAPBD
67	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	364.298.273	PAPBD
68	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	495.000.000	PAPBD
69	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	604.104.000	PAPBD
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	166.798.778	PAPBD
71	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	241.800.000	PAPBD
72	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.048.000.000	PAPBD
73	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	989.741.705	PAPBD
74	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	41.613.780	PAPBD
75	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	527.499.920	PAPBD
76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.007.376.645	PAPBD
77	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	640.618.451	PAPBD
78	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.486.726.320	PAPBD
79	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	207.387.635	PAPBD
80	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.940.000.000	PAPBD
81	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	46.170.533.433	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
82	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	859.768.000	PAPBD
83	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	375.000.000	PAPBD
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	634.249.175.510	PAPBD
85	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.991.212.000	PAPBD
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.076.799.473	PAPBD
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	998.270.705	PAPBD
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.635.844	PAPBD
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	20.382.900	PAPBD
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.246.950.000	PAPBD
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	77.005.700	PAPBD
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75.050.000	PAPBD
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.329.364.490	PAPBD
94	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	14.261.128	PAPBD
95	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.271.747.347	PAPBD
96	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.383.329.611	PAPBD
97	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	113.350.000	PAPBD
98	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	210.059.000	PAPBD
99	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.307.362.908	PAPBD
100	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	668.600.000	PAPBD
101	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	18.261.374	PAPBD
102	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.933.950.000	PAPBD
103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	720.950.000	PAPBD
104	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.299.089.335	PAPBD
105	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	396.223.000	PAPBD
106	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100.000.000	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
107	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	60.650.000	PAPBD
	JUMLAH	1.343.185.299.386	

C. ANGGARAN TAHUN 2024

Selama tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk meraih target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara dengan total anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 973.166.769.792,00 atau 72,45% dari total anggaran Rp. 1.343.185.299.386,00.

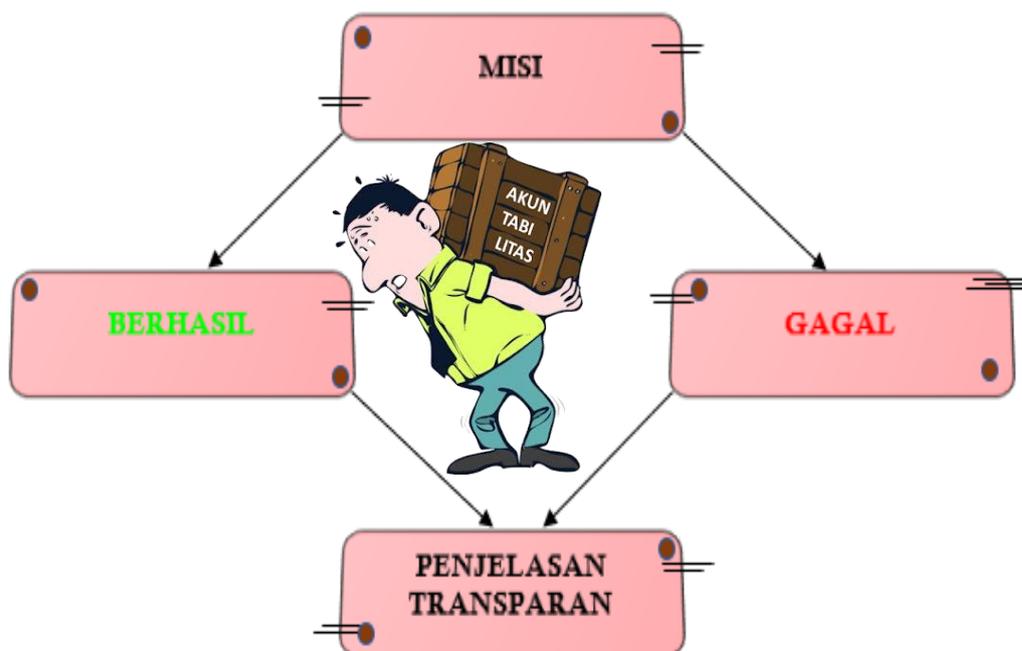
Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024, komposisi belanja APBD Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Anggaran Belanja 2024

No	Uraian	Rencana Belanja (Rp)	Persentase
1	Belanja Operasi	973.166.769.792	72,45%
2	Belanja Modal	159.946.269.179	11,91%
3	Belanja Tidak Terduga	200.000.000	0,01%
4	Belanja Transfer	209.872.260.415	15,62%
	Jumlah	1.343.185.299.386	100,00%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Pemerintah Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi Laporan harus memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026, RKT Tahun 2024, RKPD Tahun 2024, dan PK Tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja

tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100	Tidak tercapai	
= 100	Tercapai sesuai target	
> 100	Melebihi target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$	Sangat Tinggi
2	75,01 - 90	Tinggi
3	65,01 - 75	Sedang
4	50,01 - 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024

Tahun 2024 menjadi tahun yang krusial dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Batu Bara. Berbagai program dan kebijakan strategis yang telah dirancang sebelumnya mulai menunjukkan hasil nyata dalam berbagai sektor,

mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Capaian kinerja utama tahun ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi unggulan daerah. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, berbagai indikator utama pembangunan mengalami kemajuan yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Laporan ini akan menguraikan pencapaian utama sepanjang tahun 2024, menyoroti progres terhadap target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tantangan yang masih perlu diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Penghitungan persentase capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$= \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$= \frac{\textit{Target} - (\textit{Realisasi} - \textit{Target})}{\textit{Target}} 100\%$$

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, hal utama yaitu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup, Pencapaian 100%;
2. Rata-Rata Lama Sekolah, pencapaian 89,76%;
3. Harapan Lama Sekolah, pencapaian 100,33%;

4. Opini BPK, Pencapaian “**Tidak tercapai**”
5. Nilai Evaluasi AKIP, pencapaian 89,76%;
6. Indeks Kepuasan Masyarakat, pencapaian 100,33%;
7. Persentase Kemiskinan, pencapaian 100,82%;
8. Proporsi PAD terhadap Pendapatan, pencapaian 101,14,36%;
9. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB, pencapaian 98%;
10. Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB, pencapaian 95,78%;
11. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, pencapaian 100,83%;
12. Tingkat Pengangguran Terbuka, pencapaian 98,23%;
13. Indeks Inovasi Daerah, pencapaian 85,47%;
14. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, pencapaian 86,14%;
15. Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap, pencapaian 99,13%;
16. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN PMA), pencapaian 97,93%;
17. Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri, pencapaian 100%
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pencapaian 84,31%
19. Indeks Desa Membangun, pencapaian 98,84%
20. Indeks Gini, Pencapaian 104,17%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 (dua puluh) indikator kinerja utama Bupati Batu Bara Tahun 2024. Disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 75 % dalam kategori **Sangat tinggi**, sedangkan 5 (lima) IKU sebanyak 25% masuk dalam kriteria **tinggi**.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024



A.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja pemerintah Kabupaten Batu Bara selalu berupaya untuk dioptimalkan Sesuai dengan perkembangan, dinamika dan tuntutan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan derajat pelayanan. Oleh karena itu, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dengan merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2024-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Batu Bara Tahun 2024, telah ditetapkan 18 (delapan belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.

**Rincian sasaran dan indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
Bupati Batu Bara 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Indikator
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	2 Indikator
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	2 Indikator
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	1 Indikator
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	1 Indikator
6	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Indikator
7	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perternakan, Dan Perikanan	1 Indikator

8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	1 Indikator
9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Indikator
10	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1 Indikator
11	Meningkatnya Inovasi Daerah	1 Indikator
12	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	1 Indikator
13	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	1 Indikator
14	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	1 Indikator
15	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	1 Indikator
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indikator
17	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indikator
18	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	1 Indikator

Secara umum Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batu Bara nomor 50 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4.

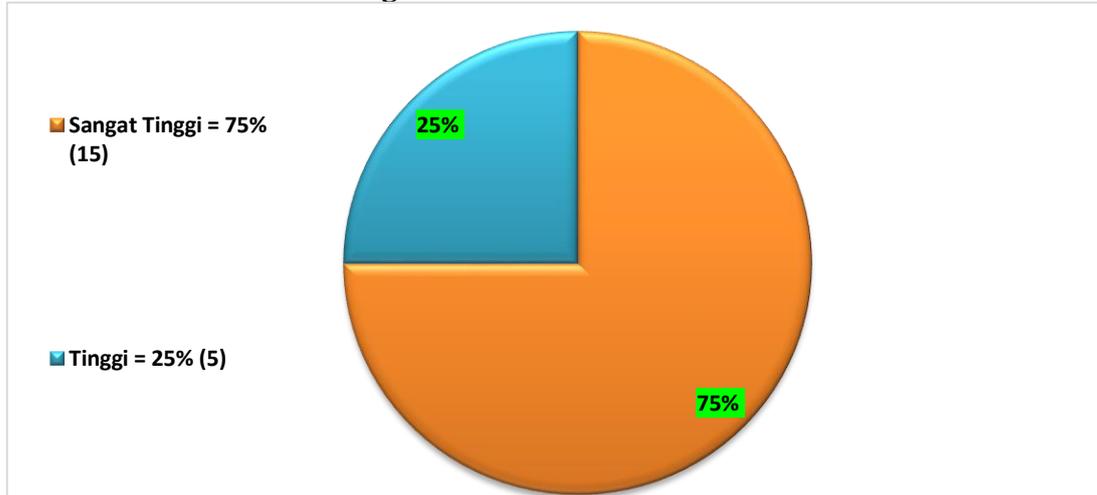
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,93	72,97	100,05	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,60	8,51	98,95%	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,12	99,02%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WDP	Tidak tercapai	Tinggi
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (70,00)	62,83	89,76%	Tinggi
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86,28	100,33%	Sangat Tinggi
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Persen	11,03	10,94	100,82%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan	Persen	13,98	14,14	101,14%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perternakan, Dan Perikanan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	23	22,54	98,00%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persen	46,50	44,54	95,78%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,00	18,15	100,83%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
10	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,8-5,5	5,75	98,23%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,0 (Inovatif)	47,01	85,47%	Tinggi
12	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	80	68,91	86,14%	Tinggi
13	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	81,48 /60	59,48	99,13%	Sangat Tinggi
14	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN PMA)	Rupiah	54 Triliun	52.884.243.610.119	97,93%	Sangat Tinggi
15	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,00	59,86	84,31%	Tinggi
17	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7176	0,7093	98,84%	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks	0,240	0,23	104,17%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2024 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.2.
Capaian Indikator Kinerja
Per Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2024



Tabel.3.5.
Predikat Pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara 2024

NO	Rata-rata % capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	≥ 90,01	Sangat Tinggi	15
2	75,01 - 90	Tinggi	5
3	65,01 - 75	Sedang	0
4	50,01 - 65	Rendah	0
5	≤ 50	Sangat Rendah	0

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilannya serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut:

EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Usia Harapan Hidup	Tahun				72,93	72,97	100,05

Sasaran Kualitas kesehatan masyarakat adalah fondasi utama yang menentukan kesejahteraan dan produktivitas bangsa. Dengan menyediakan akses layanan kesehatan yang merata, inovatif, dan berfokus pada pencegahan, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Indikator Usia Harapan Hidup merupakan IKU strategis untuk mengukur sasaran ini, untuk melihat capaian kinerja tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

Usia Harapan Hidup

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, indikator usia harapan hidup menjadi tolok ukur penting yang mencerminkan dampak langsung dari kebijakan kesehatan. Pada periode 2024, capaian kinerja nyata usia harapan hidup sebesar 100,05 didapat dari target yang telah ditetapkan adalah 72,93 tahun, sedangkan realisasi menunjukkan pencapaian sebesar 72,97 tahun. Meskipun perbedaannya hanya sebesar +0,04 tahun, hal ini merupakan bukti bahwa program-program peningkatan kesehatan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan kemajuan positif. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2024, sehingga indikator usia harapan hidup belum memiliki capaian kinerja nyata pada tahun 2023, sehingga belum bisa membandingkan capaian kinerja nyata antara tahun 2023 dengan 2024. Namun, Usia harapan hidup Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sebesar 72,63, mengalami peningkatan sebesar 0,34 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 72,71 tahun pencapaian tahun 2024 sudah melebihi target RPD sebesar 0,26 tahun.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara tahun 2024 jika dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten sekitar seperti, Tanjung Balai, Asahan dan Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.6

**IPM Kabupaten Batu Bara dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten
Tetangga Tahun 2024**

No	Nama Provinsi/Kabupaten	Usia Harapan Hidup (Tahun)
1	Provinsi Sumatera Utara	73,90
2	Tebing Tinggi	74,07
3	Tanjung Balai	74,18
4	Asahan	73,65
5	Batu Bara	72,97

Dari tabel diatas dapat dilihat, Usia Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara masih terhitung rendah dan masih dibawah provinsi dan 3 (tiga) kabupaten tetangga lainnya. Perbedaan antara Kabupaten Batu Bara (72,97 tahun) dengan rata-rata Provinsi Sumut (73,90 tahun) dan kabupaten tetangga seperti Tanjung Balai (74,18 tahun) dan Tebing Tinggi (74,07 tahun) menunjukkan adanya peluang peningkatan di Batu Bara. Berdasarkan analisis, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan ini antara lain:

1. Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan:
Wilayah dengan usia harapan hidup lebih tinggi kemungkinan memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan layanan medis berkualitas.
2. Infrastruktur dan Kebijakan Kesehatan:
Investasi dalam infrastruktur kesehatan serta penerapan program pencegahan penyakit yang efektif dapat meningkatkan usia harapan hidup.
3. Kondisi Sosial Ekonomi:
Faktor ekonomi dan lingkungan sosial juga memainkan peran penting; wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki indikator kesehatan yang lebih optimal.

Dengan demikian, meskipun Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan kemajuan, peningkatan lebih lanjut dalam layanan kesehatan dan faktor

pendukung lainnya diharapkan dapat mendorong angka usia harapan hidup mendekati atau bahkan melampaui rata-rata provinsi dan kabupaten tetangga.

Selain itu Penunjang Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 didukung beberapa hal seperti:

Faktor Penunjang	%
Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan	91,4
Persentase Penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan Nasional	97,18
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	86,04
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	64,16
Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 KH	2,18
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH	2,43
Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Per 1.000 KH	100
Prevalensi Balita Stunting	5,31
Persentase Penemuan kasus TBC yang diobati sesuai standar	45,81
Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence)	1,53
Angka Kesakitan DBD	55,43
Persentase Desa Kelurahan UCI	25,83
Persentase Desa/Kelurahan Stop BABS	43,05
Cakupan KB Aktif	59,89

Rancangan Kebijakan Dalam Mendorong Peningkatan Indikator Usia Harapan Hidup Dilaksanakan Melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dalam upaya peningkatan promosi kesehatan didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Keseluruhan skema kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan PPKB.

Keberhasilan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditentukan oleh serangkaian faktor yang saling berkaitan. Berikut analisis faktor-faktor keberhasilan yang mendukung peningkatan usia harapan hidup:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Fasilitas dan Infrastruktur Kesehatan:

Peningkatan fasilitas kesehatan terakreditasi utama seperti rumah sakit, klinik,

dan pusat layanan kesehatan yang modern serta pemerataan fasilitas di wilayah terpencil sangat membantu dalam meningkatkan deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan penyakit.

2. Tersedianya anggaran untuk masyarakat yang kurang mampu/miskin menjadi Peserta Bantuan Iuran (PBI) baik itu dari anggaran APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

3. Kebijakan Kesehatan yang Terpadu dan Efektif:

- Program Pencegahan Penyakit:

Pelaksanaan program imunisasi, skrining kesehatan, dan edukasi tentang gaya hidup sehat berperan besar dalam menekan angka kematian akibat penyakit menular maupun tidak menular.

- Koordinasi Antar Sektor:

Sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur memungkinkan penyusunan kebijakan yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terdapat kordinasi antar sektor dalam penanganan stunting dan lain-lain.

Dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup, menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kondisi Sosial Ekonomi:

Tingkat kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, dan kurangnya akses terhadap gizi yang seimbang mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Faktor Budaya di kelompok masyarakat tertentu, termasuk peran Perempuan atau Ibu hamil dalam pengambilan keputusan yang masih rendah serta masih kuatnya kepercayaan sebagian masyarakat dengan dukun/parajis sehingga persalinan tidak di fasilitas kesehatan.

3. Kesadaran dan Edukasi Kesehatan:

Rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, seperti pola makan yang seimbang, olahraga teratur, dan pencegahan penyakit, turut mempengaruhi usia harapan hidup.

4. Investasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan:

Keterbatasan dana dan investasi dalam riset serta penerapan teknologi kesehatan yang modern juga berdampak pada kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan layanan yang optimal.

Kendala-kendala ini harus ditangani secara holistik melalui pendekatan lintas sektor, peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta kebijakan yang mendukung agar upaya peningkatan usia harapan hidup dapat berjalan secara berkelanjutan.

Efisiensi penggunaan sumber daya memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, yang pada gilirannya berdampak langsung pada peningkatan usia harapan hidup. Kebijakan efisiensi ini berfokus pada pemanfaatan anggaran dan sumber daya secara optimal. Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya berfokus pada penghematan biaya, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui peningkatan kualitas hidup. Dengan memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal, pemerintah daerah dapat memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas layanan, serta mendukung program-program kesehatan yang pada akhirnya mendorong peningkatan usia harapan hidup. Berikut tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator usia harapan hidup:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu	Realisasi	% capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	72,93	72,97	100,05	88.076.775.865	80.653.908.390	91,57	0,99

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran sudah baik dan sudah mendukung pencapaian target kinerja. Program dan kegiatan yang dijalankan mampu menghasilkan output yang sesuai—bahkan sedikit lebih baik dari yang diharapkan—dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya yang dikeluarkan telah digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan. Unspent budget ini tidak selalu menjadi indikasi kelemahan, melainkan bisa menunjukkan bahwa program telah dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga target kinerja tercapai dengan biaya

yang lebih rendah dari pagu yang dialokasikan.

Adapun program-program pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.192.307.220
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.007.376.645
3	Program Pengendalian Penduduk	241.800.000,00
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.380.800.000
5	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.024.000.000

Capaian kinerja nyata sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat sebesar 100,05 dengan predikat **sangat tinggi**.

Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,60	8,50	98,85	8,60	8,51	98,95
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun				13,25	13,12	99,02

Mewujudkan Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Batu Bara secara Global. Terdapat 2 (dua) indikator yaitu berupa Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (AHLS). ARLS menunjukkan tingkat lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas, sedangkan AHLS digunakan untuk mengestimasi harapan lama sekolah dimasa depan yang bisa dienyam dengan melihat rata-rata proporsi setiap kelompok umur yang bersekolah pada saat ini. BPS memiliki formula penghitungan dan rentang nilai/ skor untuk masing-masing indikator (ARLS 0 – 15 Tahun; AHLS 0 – 18 Tahun). Untuk melihat capaian kinerja dari sasaran ini, dapat dilihat sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Target Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara tahun 2023, ditunjukkan dari ARLS dan AHLS, capaian kedua indikator adalah 98,98%. ARLS yang diperkirakan mencapai target 8,60 tahun, tidak dapat

terlampau. Capaian indikator adalah 98,95%, berasal dari perhitungan realisasi sebesar 8,51 tahun dibagi target sebesar 8,60 dikali 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 9 tahun, capaian tahun 2024 masih kurang sebesar 0,09 tahun. Demikian juga dengan AHLS, estimasi 13,25 tahun hanya tercapai 13,12 tahun dengan capaian kinerja nyata sebesar 99,02%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 13,20 tahun, capaian tahun 2024 masih kurang sebesar 0,08. Meskipun perbedaan realisasi kedua indikator tergolong kecil, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian di lapangan masih sedikit tertinggal dari target yang diharapkan. Pencapaian yang mendekati target ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pendidikan telah dilakukan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan guna mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten tetangga di Provinsi Sumatera Utara, misalnya, Kabupaten Tanjung Balai rata-rata lama sekolah tercatat sekitar 9,69 tahun, Kabupaten Tebing Tinggi mencapai sekitar 10,87 tahun, Kabupaten Asahan mencatat capaian sekitar 8,85 tahun, maka Kabupaten Batu Bara dengan realisasi 8,51 tahun masih berada di bawah rata-rata regional. Begitu juga dengan capaian AHLS masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Tanjung Balai (13,15), Tebing tinggi (13,13) dan Provinsi Sumatera Utara (13,49). Perbedaan ini mengindikasikan adanya tantangan khusus di bidang pendidikan yang perlu segera diatasi agar Kabupaten Batu Bara dapat bersaing secara lebih kompetitif dalam hal pengembangan kualitas sumber daya manusianya.

Kemudahan Akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.

Beberapa faktor yang telah mendukung pencapaian mendekati target di Kabupaten Batu Bara antara lain:

1. Peningkatan Akses Pendidikan:

Perluasan jaringan sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah, terutama di wilayah pedesaan, memungkinkan lebih banyak anak untuk mendapatkan akses pendidikan formal.

2. Peningkatan Mutu Guru dan Kesejahteraan Guru:

Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik telah berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan rata-rata lama sekolah. Dalam Hal peningkatan kesejahteraan guru Pemerintah Kabupaten memiliki skema kebijakan pemberian bantuan sosial kepada guru MDA.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah:

Komitmen dan dukungan kebijakan yang terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk program beasiswa bagi S1 dan Pemberian BOP kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) bagi penduduk usia diatas 21 tahun, serta peningkatan partisipasi masyarakat (CSR), turut mendorong capaian indikator ini.

Selain itu beberapa kebijakan penunjang capaian RTLS dan AHLS Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 berfokus pada hal seperti:

Faktor Penunjang	%
Angka Melek Huruf pada Usia 15 - 24 Tahun	99,98
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pendidikan Dasar	8,07
Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A	100
Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B	100
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	99,28
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	97,33
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	54,11
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	111,20
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	80,98
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,07
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,17
Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD	98
Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	98
Rasio Ruang Kelas Baik SD/MI	1:26
Rasio Ruang Kelas Baik SMP/MTs	1:31
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada	1:178,7

pendidikan dasar (SD)	
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama (SMP)	1:297,8
Rasio guru terhadap murid pada SD/MI	1:18
Rasio guru terhadap murid pada SMP/MTs	1:16
Presentase guru SD/MI yg memiliki kualifikasi D4/S1	86
Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1	92
Presentase guru yang memiliki kualifikasi S2	1,28
Jumlah guru yang akan memperoleh sertifikasi profesi (komulatif)	1684

Rumusan Kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan menyusun langkah-langkah dan Program Kerja sebagai berikut :

1. Pembinaan Sekolah Dasar (SD).

- a. Upaya pemerataan pendidikan sekolah dasar dengan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan:
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru untuk jenjang Pendidikan SD.
 - Membangun Unit Sekolah Baru jenjang SD.
 - Memberikan subsidi pendidikan dalam bentuk Imbal swadaya/blockgrant bagi SD Negeri dan Swasta, agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas.
 - Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan sekolah dasar agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
 - Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu dengan mempertimbangkan peserta didik laki-laki dan perempuan secara proporsional.
- b. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar.
 - Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah.
 - Pembangunan SD Percontohan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar

secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif.

- Penyelenggaraan supervisi terhadap seluruh aspek kegiatan SD.
 - Melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi siswa maupun tenaga edukatif, baik lomba bidang studi, ketrampilan siswa, lomba karya ilmiah dlsb.
- c. Upaya memperbaiki Manajemen Bidang Pembinaan Pendidikan SD
- Melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan sekolah dasar.
 - Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - Mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata.
 - Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan.
 - Merintis pembentukan Badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah.

2. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- a. Upaya pemerataan pendidikan sekolah menengah pertama akan dilaksanakan, dengan kegiatan-kegiatan:
- Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru untuk jenjang Pendidikan SMP.
 - Membangun Unit Sekolah Baru jenjang SMP.
 - Memberikan subsidi pendidikan dalam bentuk Imbal swadaya/blockgrant bagi SMP Negeri dan Swasta, agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas.
 - Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan sekolah dasar agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
 - Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu dengan mempertimbangkan peserta didik laki-laki dan perempuan secara proporsional.

- b. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah.
 - Pembangunan SMP Percontohan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif.
 - Penyelenggaraan supervisi terhadap seluruh aspek kegiatan SMP.
 - Melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi siswa maupun tenaga edukatif, baik lomba bidang studi, ketrampilan siswa, lomba karya ilmiah dlsb.
- c. Upaya memperbaiki Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Melaksanakan desentralisasi Bidang Pembinaan Pendidikan SMP.
 - Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - Mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata.
 - Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan.
 - Merintis pembentukan Badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah.

3. Pendidikan PAUD dan Non Formal (PPNF).

- a. Upaya untuk perluasan dan pemerataan Pendidikan PAUD dan Non Formal:
- Perluasan pemerataan dan jangkauan Pendidikan taman kanak-kanak dan Anak Dini Usia.
 - Melakukan pemerataan Taman Kanak-Kanak melalui Partisipasi Masyarakat.
 - Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak satu atap dengan SD/MI.

- Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan kualitas pelayanan Kejar Paket A Setara SD dan Paket B setara SLTP.
 - Penuntasan Buta Aksara melalui Program Keaksaraan Fungsional terutama bagi penduduk Buta Aksara usia 10 - 44 Tahun.
 - Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan.
- b. Upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan.
- Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan PAUD.
 - Meningkatkan mutu sarana prasarana yang dapat memperluas pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.
 - Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu yang dilakukan melalui penetapan standar kompetensi, pengembangan standarisasi.
 - Meningkatkan kemitraan dengan pihak yang berkepentingan (Stake holder).
 - Melaksanakan penelitian kesesuaian program-program PPNF.
- c. Upaya peningkatan manajemen Pendidikan PAUD dan Non Formal.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
 - Pembinaan kelembagaan Pendidikan Non Formal.
 - Pemanfaatan potensi masyarakat.
 - Mengembangkan komunikasi dan informasi di bidang Pendidikan Non Formal.

3. Pembinaan Ketenagaan.

- a. Upaya untuk perluasan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan dasar, pendidikan Luar Sekolah :
- Perluasan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal,
 - Perluasan kebutuhan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

- Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- b. Upaya peningkatan kualitas dan relevansi tenaga pendidik dan kependidikan.
 - Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesionalise Guru, Kepala Sekolah, Pengawas sekolah secara merata.
 - Meningkatkan kemampuan profesionalisme Instruktur melalui kegiatan TOT, Lokakarya.
 - Pengembangan kompetensi, program sertifikasi, peningkatan kualifikasi pendidikan Tutor PAUD,guru TK,SD dan SMP.
- c. Upaya peningkatan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan dasar, pendidikan Luar Sekolah.
 - Mengembangkan sistem insentif guru berprestasi untuk mendorong kompetisi yang sehat.
 - Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi, program sertifikasi, peningkatan kualifikasi pendidikan Tutor PAUD,guru TK,SD dan SMP
 - Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - Penyiapan Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Guru TK,SD dan SMP, SLB, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Formal dan Non Formal;

Selain itu skema kebijakan anggaran dalam mendorong peningkatan indikator rata-rata lama sekolah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keseluruhan skema kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan indikator rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah

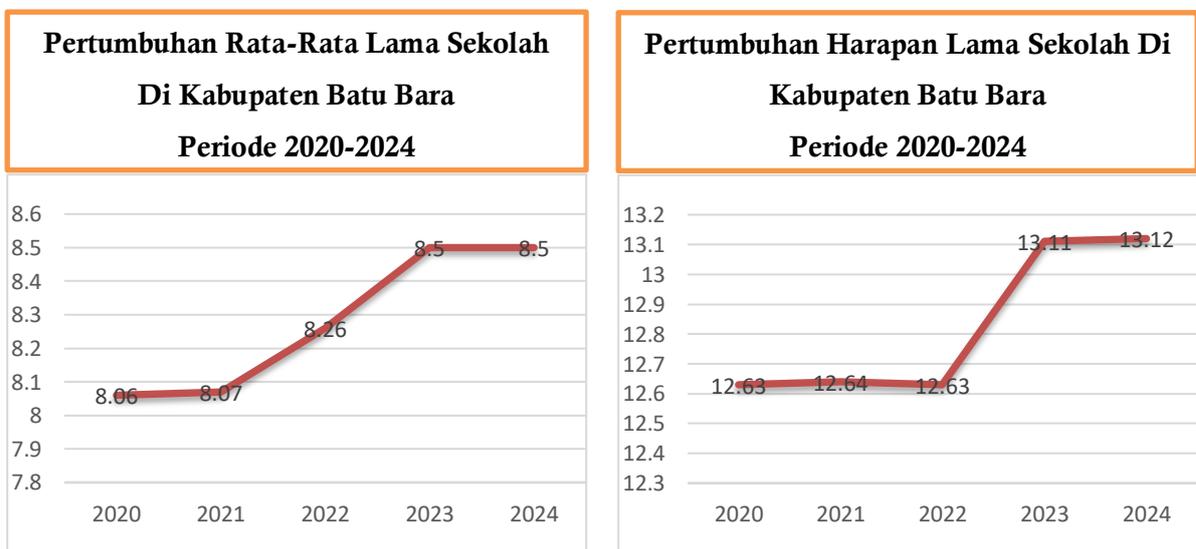
dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan AHLS di Batu Bara tumbuh 0,01 selama periode 2023 hingga 2024. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Batu Bara yang lebih baik. Pada tahun 2024, lama sekolah penduduk Batu Bara usia 25 tahun ke atas secara rata-rata mencapai 8,51 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga bangku kelas II atau kelas VIII tingkat SLTP.

Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Batu Bara ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Batu Bara semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batu Bara periode 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3.

Pertumbuhan RTLS dan HLS Tahun 2020-2024



Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat memiliki skema intervensi yang sangat komprehensif. Selain unsur manajemen, terdapat beberapa aspek yang memiliki kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Empat diantaranya yang paling utama dan menjadi tugas Dinas Pendidikan adalah Pengelolaan

Pendidikan SD, SMP, Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Unsur pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah program peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, pengelolaan museum. Terdapat juga upaya pendukung yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dalam mencapai pengembangan budaya literasi dengan program pembinaan kualitas perpustakaan, pembinaan perpustakaan ini di lakukan hampir diseluruh sekolah tingkat pertama dan disetiap kelurahan. Selain itu untuk mempermudah masyarakat mendapat bahan bacaan, terdapat perpustakaan keliling dan perpustakaan online yang dengan mudah dapat diakses masyarakat.

Walaupun terdapat upaya signifikan, beberapa hambatan masih mengganggu peningkatan RTLS dan AHLS, antara lain:

1. Kendala Sosial Ekonomi:

Faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung seringkali menyebabkan anak-anak harus berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga.

2. Tingkat Drop-Out yang Masih Ada:

Masih terdapat sejumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi, yang secara langsung mempengaruhi rata-rata lama sekolah.

3. Distribusi Mutu Sekolah yang Tidak Merata:

Kualitas fasilitas dan tenaga pengajar yang bervariasi antar wilayah menyebabkan disparitas dalam pencapaian pendidikan.

4. Keterbatasan Infrastruktur Digital:

Di era transformasi digital, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah juga membatasi peningkatan proses pembelajaran.

Untuk mengatasi hambatan dan mendorong pencapaian RTLS dan HLS yang lebih tinggi, beberapa solusi alternatif dapat diterapkan:

1. Memberikan dukungan finansial serta insentif kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

2. Menyediakan program bimbingan dan pendampingan khusus bagi siswa yang berisiko putus sekolah agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dalam pendidikan.
3. Mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran melalui program e-learning, terutama di daerah terpencil, untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan.
4. Mendorong kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam penyediaan pelatihan kejuruan yang relevan guna menambah daya tarik pendidikan formal bagi siswa.

Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran dan sumber daya, pemerintah dapat memastikan setiap investasi, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan hasil maksimal. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang kemudian tercermin dalam indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berikut kami uraikan efisiensi kebijakan penggunaan sumber daya pada tabel dibawah:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	8,60	8,51	98,95%	113.228.007.338,00	112.862.617.654	99,68	0,976
		Harapan lama sekolah	13,25	13,12	99,02%				0,98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data menunjukkan **target kinerja** RTLS yang ditetapkan adalah **8,6**, sementara **realisasi kinerja** yang tercapai adalah **8,51** dan HLS dengan target 13,25 relisasi 13,12. Dengan demikian, **realisasi kinerja** hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Ketidaksiuaian ini menunjukkan bahwa meskipun hampir mencapai target, ada sedikit kekurangan dalam pencapaian yang diharapkan.

Namun, perbedaan yang relatif kecil ini (0,08 poin) menunjukkan bahwa

program atau kebijakan tersebut cukup efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Secara keseluruhan, pencapaian yang hampir mendekati target menandakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program, meskipun masih perlu evaluasi untuk memastikan bahwa semua faktor yang berkontribusi terhadap kinerja telah dimaksimalkan.

Dari sisi anggaran, terdapat **pagu anggaran** yang ditetapkan sebesar **Rp. 113.228.007.338**, sementara **realisasi anggaran** tercatat sebesar **Rp. 112.862.617.654**. Dengan demikian, terdapat sedikit selisih antara anggaran yang dialokasikan dan yang terealisasi, yaitu sebesar **Rp. 365.389.684**, yang merupakan penurunan sekitar 0,32% dari anggaran yang direncanakan.

Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan dengan cukup efisien, mengingat selisihnya sangat kecil. Realisasi anggaran yang hampir mencapai 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh sumber daya finansial yang dialokasikan telah digunakan, meskipun ada sedikit sisa. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya tidak hanya dilihat dari segi anggaran, tetapi juga dari seberapa baik hasil yang dicapai (kinerja) sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Dalam hal ini, meskipun ada sedikit kekurangan dalam pencapaian kinerja, namun **realisasi anggaran yang efisien** menunjukkan bahwa sumber daya finansial telah digunakan dengan bijak untuk mencapai hasil tersebut. Namun, adanya sedikit gap antara target dan realisasi kinerja mengindikasikan bahwa ada beberapa area yang mungkin dapat diperbaiki agar lebih efisien, seperti:

- **Perencanaan yang lebih matang** untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja dapat lebih optimal.
- **Pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif** untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat mengurangi pencapaian kinerja.
- Adapun program-program pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu
1	Program Pengelolaan Pendidikan	115.083.277.063,00
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000,00

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat yang berasal dari dua indikator jika digabungkan, maka capaian rata-rata sebesar 98,98% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTD	100	WTP	WTD	Tidak Tercapai
2	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	B	100	B 70	B 62,83	89,76

Akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi merupakan aspek penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan ini, dua indikator utama yang menjadi tolok ukur adalah **Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)** dan **nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**.

Opini BPK menjadi acuan utama dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah. Opini ini menggambarkan seberapa baik instansi pemerintah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Opini yang baik dari BPK menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara opini yang buruk menandakan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan yang perlu segera diperbaiki.

Sementara itu, **Evaluasi AKIP** menjadi indikator kunci untuk mengukur sejauh mana kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. AKIP menilai aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh setiap unit pemerintahan. Nilai evaluasi AKIP yang tinggi mencerminkan adanya peningkatan kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang optimal.

Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi bukan hanya soal pemenuhan standar administratif, tetapi juga terkait dengan pencapaian hasil yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan di dua indikator ini—Opini

BPK dan Nilai Evaluasi AKIP—menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Hasil pengukuran kinerja sasaran ini dapat dilihat pada penjelasan 2 indikator di bawah ini:

a. Opini BPK

Saat ini, kami belum dapat memberikan penjelasan secara lengkap mengenai **Opini BPK** karena laporan keuangan yang kami ajukan masih dalam **tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**. Proses audit tersebut masih berlangsung, dan hasil akhirnya belum diterbitkan. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas keuangan, kami menggunakan **hasil evaluasi tahun sebelumnya** sebagai acuan sementara. Hasil evaluasi tahun sebelumnya memberikan gambaran mengenai kondisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan, meskipun kami menyadari bahwa setiap tahun dapat terjadi perubahan dalam kinerja dan pengelolaan keuangan. Setelah audit BPK selesai dan opini BPK diterbitkan, kami akan segera memberikan penjelasan lebih lanjut dan detail mengenai status opini tersebut.

Kami berharap agar hasil audit ini dapat memperlihatkan kemajuan dalam transparansi dan pengelolaan keuangan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil semakin mendekatkan kami pada prinsip akuntabilitas yang lebih baik.

Berdasarkan capaian tahun 2023, Pencapaian keberhasilan indikator ini bisa dinyatakan kurang berhasil, dari target yaitu WTP dengan realisasi WDP.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut :

Faktor Pendorong:

- a. Komitmen Kepala Daerah dan Inspektorat Kabupaten Batu Bara yang terus menerus melakukan monitoring untuk tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI.
- b. Melakukan Kordinasi yang intensif dengan Pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Di samping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan pencapaian target peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dijumpai pula

beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi program dan kegiatan. Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi:

1. Sistem Pengendalian Intern masih lemah di beberapa perangkat daerah.
2. Adanya kewajiban setor yang belum dilaksanakan akibat pegawai yang bersangkutan telah mutasi.
3. Terjadinya mutasi dan pergantian personil mengakibatkan kualitas SDM yang menangani penatausahaan dan pelaporan barang maupun keuangan masih belum memadai.
4. Kurang Responsif Organisasi perangkat Daerah.

Berdasarkan pemantauan BPK, sebelum tindak lanjut terdapat 818 temuan sampai dengan tahun 2024 yang pelaksanaan tindak lanjutnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan status tindak lanjut sebanyak 739 sudah sesuai rekomendasi dan 79 belum sesuai.

b. Nilai Evaluasi AKIP

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permenpan No. 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian keberhasilan indikator ini adalah sebesar 89,76%, dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Bupati tahun 2024 yaitu B dengan poin 70 dan dengan realisasi B dengan poin 62,83. Perhitungannya didasarkan dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 yang diterbitkan pada tahun 2024.

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/86/AA.05/2024 perihal: Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Kabupaten Batu Bara menerima predikat B dengan nilai 62,83. Tabel dibawah menggambarkan perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018-2024:

Tabel 3.7.

Perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018-2024

No	Tahun	Bobot	Nilai	Predikat
1	2018	100	37,05	C
2	2019	100	45,02	C
3	2020	100	55,63	CC
4	2021	100	56,35	CC
5	2022	100	60,55	B
6	2023	100	61,28	B
7	2024	100	62,83	B

Berikut perbandingan nilai AKIP tahun 2023 dan 2024 perkomponen:

Tabel 3.8.

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,41	20,98
2	Pengukuran Kinerja	30	14,93	15,11
3	Pelaporan Kinerja	15	9,33	9,92
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,61	16,82
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,28	62,83
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPD, dimana untuk mendapat predikat BB maka nilai yang harus diraih minimal 70, maka masih terdapat selisih angka 7,17, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan baik dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam usaha pencapaian indikator sasaran ini, beberapa upaya telah dilaksanakan yakni :

1. Melakukan reviu terhadap perjanjian kinerja dan pohon kinerja Pemda dan Perangkat Daerah;
2. Melakukan perbaikan sasaran strategis dan indikator kinerja terhadap pemda

menjadi selaras dan lebih beorientasi hasil;

3. Menetapkan IKU pada pemda dan OPD yang dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data, dan formulasi perhitungan yang relevan.
4. Menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah dan PD melalui website batubarakab.go.id sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
5. Melaksanakan evaluasi internal akuntabilitas terhadap 38 PD oleh Inspektorat.
6. Beberapa PD menindaklanjuti hasil evaluasi internal inspektorat dengan menyusun matrik tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB, terdapat kelemahan-kelemahan yang masih di jumpai dalam mengimplemetasikan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Batu Bara, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kineja organisasi;
- b. Terdapat sasaran strategis yang belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang sesuai dengan level. Disamping itu indikator yang digunakan tidak cukup menjawab sarannya. Contohnya pada PK Bupati Batu Bara Tahun 2024 yaitu sasaran strategis “ Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri” dengan indikator “Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, serta sasaran strategis “ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi” dengan Indikator “Indeks Gini”;
- c. Terdapat sasaran strategis dan indikator PD yang belum berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya. Contohnya PK Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 yaitu sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Persampahan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Sampah Terkelola”. Contoh lainnya pada PK Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 yaitu sasatan strategis “Tersusunnya Laporan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP” dengan indikator kinerja “opini BPK”;
- d. Beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria SMART

- (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound) dan cukup. Contohnya pada PK Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yaitu indikator kinerja “Jumlah situs cagar budaya yang memperoleh pembinaan” untuk menjawab sasaran “Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan”;
- e. Penjabaran kinerja PD ke level Eselon III, IV dan level dibawahnya masih belum baik. Hal ini ditunjukkan pada beberapa pejabat yang memiliki sasaran dan indikator kinerja yang sama pada beberapa bidang. Contohnya pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada PK Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan PK Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang sama-sama memiliki sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” dengan Indikator Kinerja “Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial” dan target “50%”;
 - f. Penetapan rencana aksi pada PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.
2. Pengukuran Kinerja
- a. Aplikasi e-Monev Batu Bara masih dalam tahap pengembangan sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
 - b. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada sebagian PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja outcome yang diperjanjikan, sehingga capaian kerjanya belum diketahui.
3. Pelaporan Kinerja
- a. Penyajian laporan kinerja pemda tahun 2023 belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai dan mendalam untuk setiap

indikator kinerja utama, seperti penyajian relisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi anggaran;

- b. Informasi dan analisis dalam Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023, yaitu indikator kinerja “Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan” dengan target tahun 2024 adalah 80% sedangkan realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2023 telah mencapai 94,11%. Indikator lainnya yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, “Prevalensi Balita Stunting”, “Angka Kesakitan DBD”. Contoh lainnya pada laporan kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan yaitu indikator kinerja, “Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB”.
 - c. Laporan kinerja belum menyajikan benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD. Contohnya pada LHE AKIP Internal Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mendapatkan nilai komponen perencanaan sebesar 24,7 dari bobot 30 namun demikian masih terdapat temuan perencanaan lain yang dituangkan dalam LHE internal. Contohnya masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup pada PK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yaitu sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Pemuda yang Berprestasi” dengan indikator “Jumlah Pemuda yang Berprestasi” dan sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata yang terkelola dengan baik” dengan indikator “Jumlah kunjungan wisatawan’, selain itu temuan itu temuan lainnya adalah penjabaran kinerja PD ke level eselon III dan level dibawahnya masih belum naik,

rencana aksi yang selaras dengan pencapaian PK. Contoh lainnya pada Dinas Pendidikan mendapatkan nilai komponen pengukuran 22,80 dari bobot 30 dengan temuan pengukurannya yaitu pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi kinerja secara real time, belum dilakukan pengukuran dan pemantauan capaian kinerja sehingga unit terkecil, dan hasil pengukuran belum dijadikan dasar pengambilan keputusan di PD;

- b. Belum ada monitoring dan evaluasi internal terhadap tindak lanjut hasil evaluasi internal;
- c. Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada setiap PD;
- d. Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Selain itu terdapat beberapa rekomendasi antara lain:

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- b. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi menjadi beorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan. Serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja;
- c. Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut. Disamping itu juga, menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi PD secara berkala dalam pencapaian kinerja;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e monev kabupaten Batu Bara diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh PD di aplikasi tersebut sebagai bagian dari dari untuk media pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara real time;

- e. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran , namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- f. Meningkatkan kualitas laporan kinerja Pemda dan PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, target jangka menengah, dan analisis keberhasilan/kegagalan, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- h. Menyajikan data beanchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik ditingkat rgional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai;
- i. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- j. Menyusun kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP PD.

Adapun upaya yang telah direncanakan akan dilakukan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan OPD dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan pada *cascading* kinerja.
2. Melakukan Praevaluasi SAKIP Tahun 2025.

3. Meningkatkan kualitas SDM penyusunan laporan kinerja pada perangkat daerah dengan bimtek penyusunan laporan kinerja.
4. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan mengikuti diklat evaluasi SAKIP.
5. Melaksanakan Reviu atas LHE secara berjenjang.

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	85,51	99,43	86	86,28	100,33%

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Capaian indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** sebesar 100,33% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati sebesar 86 dan realisasi kinerja nyata sebesar 86,28. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 90 poin, maka pencapaian tahun 2024 masih kurang sebesar 3,27 poin.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web yaitu **si sukma** (sistem informasi survei kepuasan masyarakat) yang dapat diakses melalui <https://bagianorganisasi.batubarakab.go.id/skm/site/home>. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat melibatkan seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah dan didukung beberapa Perangkat Daerah seperti Inspektorat Kabupaten Batu Bara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Batu Bara, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Berdasarkan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi SI-SUKMA, yang melibatkan seluruh unit kerja diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,28 dan dengan jumlah korespondensi sebanyak 32.940 orang.

Tabel 3.9.

IKM Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	RESPONDEN	NILAI IKM
1	SEKRETARIAT DAERAH	77	66,35
2	SEKRETARIAT DPRD	24	95,62
3	INSPEKTORAT	55	81,13
4	DINAS PENDIDIKAN	12	90,65
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	101	81,66
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	4	91,58
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	26	89,01
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	42	78,16
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	276	81,52

10	DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	80,48
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIIL	973	96,74
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	205	80,20
13	DINAS PERHUBUNGAN	93	95,45
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	99,40
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	445	94,04
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	187	86,63
17	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	0
18	DINAS PERPUSTAKAAN	264	93,32
19	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	4	80,48
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	430	80,33
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	7	86,42
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	556	80,74
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	212	95,16
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	266	81,85
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	55	81,53
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	92,69
27	KECAMATAN SEI BALAI	97	75,35
28	KECAMATAN NIBUNG HANGUS	44	89,05
29	KECAMATAN TANJUNG TIRAM	653	99,79
30	KECAMATAN TALAWI	362	87,26
31	KECAMATAN DATUK TANAH DATAR	860	98,47
32	KECAMATAN LIMA PULUH	199	97,53
33	KECAMATAN DATUK LIMA PULUH	8	89,84
34	KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR	152	84,00
35	KECAMATAN AIR PUTIH	3175	89,58
36	KECAMATAN SEI SUKA	472	82,83
37	KECAMATAN LAUT TADOR	811	81,00
38	KECAMATAN MEDANG DERAS	78	82,36
39	KELURAHAN PAGURAWAN	17	98,43
40	KELURAHAN PANGKALAN DODEK BARU	21	95,80

41	KELURAHAN PANGKALAN DODEK	18	86,49
42	KELURAHAN PERK SIPARE-PARE	102	81,16
43	KELURAHAN INDRAPURA	210	75,03
44	KELURAHAN INDRASAKTI	16	80,65
45	KELURAHAN LIMA PULUH KOTA	2	77,70
46	KELURAHAN LABUHAN RUKU	101	87,59
47	KELURAHAN TANJUNG TIRAM	198	81,19
48	KELURAHAN BAGAN ARYA	38	78,65
49	PUSKESMAS INDRAPURA	1259	84,29
50	PUSKESMAS KEDAI SIANAM	7910	80,48
51	PUSKESMAS LABUHAN RUKU	2112	83,27
52	PUSKESMAS LALANG	2341	94,51
53	PUSKESMAS LAUT TADOR	522	86,22
54	PUSKESMAS LIMA PULUH	333	84,12
55	PUSKESMAS PAGURAWAN	731	88,69
56	PUSKESMAS PEMATANG PANJANG	532	83,78
57	PUSKESMAS PETATAL	1179	88,64
58	PUSKESMAS SEI BALAI	138	80,19
59	PUSKESMAS SEI BEJANGKAR	268	96,20
60	PUSKESMAS SEI SUKA	1290	87,88
61	PUSKESMAS SIMPANG DOLOK	256	79,14
62	PUSKESMAS TANJUNG TIRAM	590	88,56
63	PUSKESMAS UJUNG KUBU	391	87,17
64	RSUD BATU BARA	1118	86,31

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Loker pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet.
2. Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik”.
3. Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, untuk tahun ini

sudah lebih cepat dari tahun kemarin.

4. Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
2. Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Penerapan **Mal Pelayanan Publik (MPP)** di Kabupaten Batu Bara diproyeksikan akan terlaksana pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi. MPP bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam pengurusan berbagai dokumen dan administrasi publik.

Meskipun penerapan MPP menjanjikan berbagai manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- **Integrasi Sistem Teknologi:** Agar berbagai layanan dapat diakses secara terintegrasi, perlu adanya sistem teknologi yang kuat dan terstandarisasi di seluruh instansi pemerintah yang terlibat.
- **Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Petugas yang melayani masyarakat perlu dilatih agar dapat bekerja secara profesional, efisien, dan ramah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat.
- **Sosialisasi kepada Masyarakat:** Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang cara mengakses layanan di MPP dan keuntungan dari adanya sistem satu atap ini.

Faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Batu Bara adalah komitmen unit pelayanan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan.

Selain itu dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui hasil survey independent kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai 92,15 atau dengan predikat **zona hijau kualitas tertinggi**.

Tindaklanjut yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara, antara lain:

- a. Meningkatkan sosialisasi.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik terkait prosedur pelayanan.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperoleh data hasil survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat pada Unit Kerja.
- d. Memberikan pendidikan dan latihan bagi petugas pelayanan.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik sebesar 100,33% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan diukur dengan Angka kemiskinan BPS yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Berikut penjelasan ketercapaian sasaran yang diukur dengan indikator persentase kemiskinan:

Persentase Kemiskinan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kemiskinan	Persen	11,28	11,38	99,11	11,03	10,94	100,82%

Capaian indikator **Persentase kemiskinan** sebesar 100,82% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati sebesar 11,03 dan realisasi

kinerja nyata sebesar 10,94. Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara dari 11,38% pada 2023 menjadi 10,94% pada 2024 menunjukkan adanya kemajuan, meskipun belum mencapai target yang lebih rendah. Penurunan sebesar 0,44% mencerminkan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai penurunan yang lebih signifikan. Dengan kebijakan yang lebih terarah, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih merata, Kabupaten Batu Bara dapat terus menurunkan angka kemiskinan menuju kesejahteraan yang lebih baik. Tingkat kemiskinan yang tercatat sebesar 10,94% masih sedikit lebih tinggi dari target RPD sebesar 10,70%, dengan selisih 0,24%. Meskipun selisihnya tidak besar, perbedaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPD untuk menurunkan kemiskinan pada tahun 2024.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara lebih tinggi **1,91%** dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang tercatat pada kisaran **9,03%**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan nasional telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Batu Bara masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Faktor-faktor seperti terbatasnya akses ke layanan dasar, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di daerah ini.

Angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara juga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara yang tercatat **7,99%**. Dengan selisih **2,95%**, Kabupaten Batu Bara memiliki angka kemiskinan yang lebih besar, yang mencerminkan adanya ketimpangan antara kabupaten Batu Bara dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 90 poin, maka pencapaian tahun 2024 masih kurang sebesar 3,27 poin.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara tak lepas dari masalah kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas nilai rupiah pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) perkapita perbulan. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan diukur dengan angka yang ditetapkan BPS, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, untuk Tahun 2024, garis kemiskinan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 591.201perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan *baseline* untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

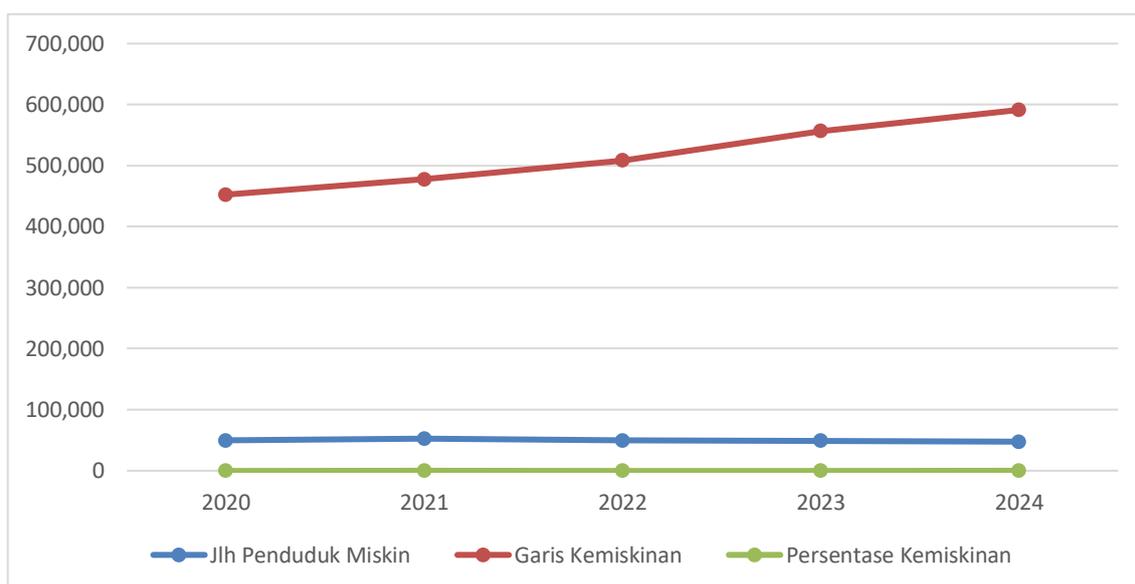
Berdasarkan tolok ukur tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batu Bara tahun 2024 diperkirakan sebanyak 47.660 mengalami penurunan sebesar 1.520 Jiwa jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 49.180 jiwa. Jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2024, yang oleh BPS diestimasi sekitar 437.360 Jiwa, maka diketahui bahwa tingkat kemiskinannya adalah 10,94. Berikut disajikan angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara selama lima tahun, sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Persentase Angka Kemiskinan 2020-2024

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase
2020	49.780	11,88
2021	52.590	12,38
2022	49.390	11,53
2023	49.180	11,38
2024	47.660	10,94

Berdasarkan data tabel diatas, persentase kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 12,38%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 52,590 jiwa. Berikut ditampilkan grafik kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024.

Grafik 3.4.
Kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat persentase kemiskinan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu juga dengan jumlah penduduk miskin, hanya saja garis kemiskinan terus naik sepanjang tahun.

Secara umum, faktor yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
5. Telah menyusun rencana aksi pemberantasan kemiskinan.

Selain itu terdapat juga faktor kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi (5,75), sehingga berakibat langsung pada peningkatan kemiskinan;
2. Secara nasional harga eceran beberapa komoditas lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar, hingga mempengaruhi garis kemiskinan;
3. Masih Banyaknya ditemukan perkawinan pada usia dini.
4. Pola distribusi yang kurang tepat, misalnya pada bahan pangan minyak goreng, di Batu Bara terdapat industri pengolahan minyak goreng, namun distributornya diberada di kabupaten lain. Hal ini berdampak pada transportasi distribusi. Begitu juga terjadi pada beberapa bahan pangan pertanian, dimana para penampung (agen) tidak memasarkan hasil pertanian di Batu Bara tetapi mengirim/menjualnya ke provinsi atau kota lain.

Sebagai solusi alternatif yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

1. Memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, sehingga target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai yang dianggarkan pemerintah selama pandemi tepat sasaran.
2. Meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk miskin.
3. Melakukan studi kemiskinan pada tahun 2024 dengan menggunakan jasa akedemisi, sehingga informasi akurat terkait masalah penyebab kemiskinan bisa menjadi rekomendasi penyusunan kebijakan.

Dalam rangka mencapai sasaran menurunkan angka kemiskinan ini, terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang saling terkait, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara (Penanganan Kerawanan Pangan), Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan), Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Batu Bara (Pengembangan UMKM), Dinas Pendidikan (Jaminan Pendidikan), dan Dinas Kesehatan (Jaminan Kesehatan), Dinas Perkim dengan bantuan rumah tidak layak huni.

Selain itu terdapat Perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendukung seperti

Dinas Sosial dan Bapelitbangda sebagai penyedia data.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan elemen penting dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya alam, manusia, maupun finansial, suatu negara atau organisasi dapat mencapai hasil yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung efisiensi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan bersama. Berikut disajikan analisis Efisiensi penggunaan sumber daya terkait capaian kinerja penurunan persentase kemiskinan:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	11,03	10,94	100,82	28.020.394.046,00	27.070.492.407,00	96,61	0,0004

Efisiensi Kinerja mencapai sekitar 100,82%, yang menunjukkan bahwa realisasi penurunan kemiskinan lebih baik dari target, meskipun sedikit lebih tinggi daripada yang diinginkan. Ini berarti penggunaan sumber daya untuk menurunkan kemiskinan cukup efisien. Dari pengelolaan Anggaran, menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang hampir sesuai dengan target.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan sebesar 100,33% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan	Persen	16	11,06	74,06	13,98	14,14	101,14

Sasaran meningkatnya pendapatan daerah, Memiliki Indikator sebagai berikut:

Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga simbol dari **kemampuan dan kemandirian daerah** dalam mengelola potensi ekonominya. Melalui PAD yang optimal, daerah dapat melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan PAD yang efisien sangat penting untuk mencapai **keberlanjutan pembangunan daerah** yang lebih baik.

Persentase PAD terhadap Pendapatan diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Seluruh Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{186.075.830.273,63}{1.315.883.382.650,63} \times 100\% \\ &= 14,14\% \end{aligned}$$

Persentase capaian kinerja indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan sebesar 101,14% berasal dari perhitungan target 13,98 % dan realisasi sebesar 14,14% atau Rp. 186.075.830.273,63 dari total Rp. 1.315.883.382.650,63 (*Angka PAD masih angka sementara, diperoleh sebelum audit BPK selesai*). Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 36.157.844.808,93 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dengan total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 149.917.985.464,70 atau meningkat sebesar 19,9%. Untuk pencapaian target akhir RPD sebesar 16% pencapaian tahun 2024 masih kurang sebesar 1,86% lagi.

Namun, mengingat capaian yang lebih rendah dari target tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara menurunkan target PAD untuk tahun 2024 sebagai respons terhadap pencapaian yang tidak maksimal di tahun sebelumnya. Penurunan target ini dimaksudkan agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi serta kemampuan pengumpulan PAD yang ada.

Pada tahun 2024, beberapa sektor ekonomi yang menjadi sumber utama PAD, seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan, daya beli masyarakat, masih

mengalami pemulihan yang lambat. Jika faktor-faktor tersebut belum pulih sepenuhnya atau tidak tumbuh sesuai harapan maka pemerintah daerah akan menyesuaikan target PAD agar lebih realistis berdasarkan proyeksi pendapatan yang lebih moderat. Dengan adanya penurunan target, pemerintah dapat menghindari ketidakmampuan mencapai target yang lebih tinggi, mengingat kondisi ekonomi yang masih rentan.

Komposisi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara periode 2024 dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dana Pendapatan Transfer memberikan kontribusi untuk sumber pendapatan daerah sebesar 84,57% atau sebesar Rp. 1.112.878.056.387,00.

Upaya pencapaian indikator ini menjadikan Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah utama dalam pelaksanaan dan pengambilan kebijakan. Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Batu Bara (Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh). Adapun jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Parkir.

Untuk sektor Retribusi Daerah kebijakan diserahkan tugas pemungutan retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Badan Pendapatan daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Badan Pendapatan Daerah merupakan Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perangkat daerah pemungut retribusi antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah), Retribusi Pelayanan Kebersihan /Pertamanan (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum, Retribusi PKB (Dinas Perhubungan), Retribusi Pelayanan Pasar - Kios (Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan), Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja), Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), Retribusi Pelayanan Tera Ulang - (Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor), Retribusi Tempat Pelalangan Ikan (TPI), Retribusi Tempat Pelelangan Ternak - (Dinas Perikanan dan Peternakan), Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - (Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan - (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu).

Beberapa faktor penghambat yang terjadi pada tahun 2024 antara lain:

1. Sebagian WP yg terdaftar tidak taat membayar pajak
2. Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam melakukan pembayaran
3. Minimnya Masyarakat yang mengajukan BPHTB
4. Potensi pendapatan asli daerah belum terexplore dengan optimal
5. Potensi terbatas surat ketetapan pajak.

Solusi alternatif yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan Intensifikasi dengan Pelaksanaan Penyuluhan & Peningkatan Pengawasan
2. Melakukan Ekstensifikasi dengan cara penjaringan Wajib Pajak baru melalui Pendataan/Pendaftaran/Menggali Potensi PAD Baru
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak
4. Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penting untuk merancang kebijakan yang komprehensif, mencakup berbagai sektor, dan didukung oleh rencana aksi yang dapat diimplementasikan dengan efektif. Berikut adalah skema kebijakan yang optimal beserta rencana aksinya yang akan diterapkan pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Kebijakan Penguatan Basis Pajak Daerah

Tujuan: Meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui perluasan basis pajak

dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Rencana Aksi:

a. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah:

- Identifikasi sektor potensial pajak baru, misalnya pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hiburan yang masih dapat dimaksimalkan.
- Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kampanye pajak yang lebih intensif serta edukasi mengenai manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.

b. Insentif Pajak:

Memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor yang berpotensi tumbuh, seperti UMKM, dengan ketentuan pajak yang lebih ringan atau pembebasan sementara.

2. Kebijakan Optimalisasi Retribusi Daerah

Tujuan: Meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah dengan memaksimalkan potensi sektor-sektor yang masih belum optimal.

Rencana Aksi:

- Revisi dan Penyesuaian Tarif Retribusi: Evaluasi dan penyesuaian tarif retribusi di sektor-sektor tertentu. Penataan ulang pengelolaan retribusi di pasar tradisional atau area publik untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi.
- Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Menambah jumlah petugas pemungut retribusi untuk memastikan tidak ada kebocoran dalam pengumpulan retribusi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tarif retribusi, seperti penindakan terhadap usaha yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran retribusi.

3. Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

Tujuan: Meningkatkan penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang belum maksimal.

Rencana Aksi:

- Inventarisasi dan Evaluasi Aset Daerah: Melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh, baik berupa tanah, bangunan, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Evaluasi potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan aset daerah yang belum digunakan secara optimal,

seperti sewa gedung, pemanfaatan tanah kosong, dan pengelolaan sumber daya alam.

- Penyewaan Aset Daerah: Meningkatkan penyewaan aset daerah untuk kegiatan komersial, seperti penyewaan gedung perkantoran milik daerah atau penggunaan lahan untuk usaha yang menguntungkan daerah.

4. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PAD

Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur daerah dalam mengelola PAD agar lebih efisien dan efektif.

Rencana Aksi:

- Pelatihan: Menyediakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan petugas pemungut pajak dan retribusi dalam melakukan tugas mereka dengan lebih efektif.
- Peningkatan Kinerja Pengawasan

5. Kebijakan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat

Tujuan: Meningkatkan penerimaan PAD melalui kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.

Rencana Aksi:

- Membangun Kerja Sama dengan Swasta: Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola berbagai sektor potensial seperti pengelolaan pasar, tempat wisata, dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat menghasilkan PAD.
- Kampanye Kesadaran Pajak: Meluncurkan kampanye edukasi pajak yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pemahaman mereka mengenai pentingnya kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Skema kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mencakup pendekatan yang holistik, dengan menekankan pada penguatan sektor pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, peningkatan sektor ekonomi potensial, serta digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Rencana aksi yang dijalankan harus mendukung pencapaian kebijakan tersebut dengan mengimplementasikan langkah-langkah nyata yang dapat membawa hasil yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.

Kebijakan yang mendukung efisiensi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan bersama. Berikut disajikan analisis Efisiensi penggunaan sumber daya terkait capaian kinerja Proporsi PAD terhadap Pendapatan:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan	13,98	14,14	101,14	3.281.919.899,00	3.268.451.045,00	99,59	0,06

Dari tabel diatas, capaian kinerja proporsi PAD terhadap pendapatan mencapai 101,14% dari target yang ditetapkan. Ini berarti bahwa kinerja yang tercapai melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa daerah berhasil meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan lebih tinggi dari yang diharapkan. Penggunaan anggaran yang hampir sepenuhnya terpakai dengan hasil yang positif pada capaian PAD menunjukkan efisiensi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal dalam mendukung pencapaian target PAD.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Proporsi PAD terhadap Pendapatan sebesar 101,14% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	25	21,91	87,64	23	22,54	98,00%

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Terhadap PDRB

Pada tabel diatas dapat dilihat terjadi penurunan target yang lebih kecil dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan target kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2024 menjadi 23% dapat dilihat sebagai langkah penyesuaian yang realistis berdasarkan hasil yang lebih rendah dari target 2023 (21,91%). Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan ini adalah perubahan iklim, bencana alam, gangguan pasokan, penurunan harga komoditas global, dan perubahan pola konsumsi pasar. Pemerintah menurunkan target ini untuk menciptakan proyeksi yang lebih realistis dan menghindari penetapan target yang terlalu optimis mengingat tantangan yang ada pada sektor ini.

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, peternakan terhadap PDRB, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara sebesar 22,54% dan memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Batu Bara.

Pencapaian Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dengan indikator Kontribusi sektor pertanian/kehutanan/perikanan terhadap PDRB sebesar 98,00% berasal dari target 23% dan realisasi 22,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,63% namun jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 25%, pencapaian 22,54% ini masih kurang 2,46% lagi. Pencapaian Kontribusi sektor pertanian/kehutanan/perikanan terhadap PDRB sebesar 22,54% ini masih dibawah pencapaian Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 24,44%

Kinerja kontribusi sektor pertanian/kehutanan/perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Batu Bara lebih berfokus kepada sektor pertanian dan perikanan, dan untuk sektor kehutanan menjadi wewenang Provinsi Sumatera Utara.

Peranan kontribusi dari sektor pertanian dan perikanan dapat dapat disimak pada keterangan berikut:

Kontribusi Sektor Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Batu Bara bukan hanya menjadi penyokong utama perekonomian daerah, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin ketahanan pangan, dan meningkatkan

pendapatan daerah. Dengan terus mendorong inovasi dalam sektor pertanian, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat kebijakan pendukung, Kabupaten Batu Bara dapat memperkuat posisi sektor pertanian sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan dan mendukung sektor pertanian agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian setempat.

Pada sektor pertanian meningkatnya produktivitas pertanian merupakan bagian dari strategi penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan diversifikasi sektor ekonomi. Produktivitas yang tinggi dalam sektor pertanian dapat menciptakan dampak positif yang meluas ke sektor-sektor lain dan berkontribusi pada peningkatan PDRB.

Produksi padi sebesar 137.607,92 ton dari target sebesar 130.000 ton atau mencapai 105,85%. Produksi padi mencapai target dengan luas panen 23.848,86 Ha sehingga mencapai produktivitas sebesar 57,70 kw/Ha. Produktivitas tersebut lebih tinggi dari pada produktivitas padi sawah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang hanya sebesar 51,30 kw/Ha. Keberhasilan peningkatan produktivitas dan produksi padi ini didukung oleh peningkatan sarana irigasi melalui pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan pompanisasi, pendampingan penyaluran irigasi perpompaan, penyaluran mesin pompa air untuk daerah sawah tadah hujan dan optimasi lahan yang didanai APBN, penggunaan benih bersertifikat, penggunaan pupuk dan pestisida secara tepat, memfasilitasi petani agar mendapatkan pupuk bersubsidi, menyalurkan bantuan benih padi bagi lahan terdampak bencana banjir, bantuan alsintan, bantuan pengolahan lahan sawah petani dan tak terlepas dari kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan yang menyampaikan informasi dan teknologi kepada petani selain padi, komoditas utama tanaman pangan lain yang juga menjadi prioritas adalah jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Untuk tanaman hortikultura yang menjadi prioritas adalah cabai merah dan Bawang merah. Dengan demikian, secara alami, produksi pertanian di Kabupaten Batu Bara sangat berpeluang mencapai angka yang tinggi. Produksi cabai merah sebesar 15.501,38 ton dari target sebesar 14.000 ton atau mencapai 110,72%. Produksi cabai merah mencapai target tak terlepas dari kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam

mendampingi petani dalam budidaya cabai merah, selain itu terdapat pendampingan penyaluran bantuan saprodi yang didanai APBN.

Produksi kelapa sawit sebesar 190.950 ton dari target sebesar 175.000 ton atau mencapai 109,11%. Produksi kelapa sawit mengalami peningkatan disebabkan beberapa hal, antara lain mulai berproduksinya lahan lahan *replanting* seperti lahan PSR tahun 2021 dan meningkatnya bobot buah pada tanaman muda menghasilkan.

Produksi kelapa sebesar 49.200 ton dari target sebesar 55.000 ton atau mencapai 89,45%, produksi kelapa belum mencapai target yang disebabkan akibat penurunan populasi tanaman dan usia tanaman yang sudah tua yang provitasnya menurun sedangkan tanaman muda belum menghasilkan.

Skema Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian yang telah di implemetasikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses yang lebih baik ke sarana dan prasarana pertanian.
4. Menanggulangi kerawanan pangan dan bencana pertanian secara efektif.
5. Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian untuk mendukung penerapan teknologi yang tepat.

Dalam rangka pelaksanaan skema kebijakan tersebut, program-pogram utama yang dilakukan adalah:

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- **Tujuan:** Mengurangi angka kerawanan pangan dengan meningkatkan akses pangan yang berkualitas dan terjangkau.
- **Strategi:**
 - Penyediaan cadangan pangan nasional melalui peningkatan hasil pertanian lokal.
 - Penyuluhan terkait diversifikasi konsumsi pangan, termasuk pemanfaatan pangan lokal.
 - Penyaluran bantuan pangan darurat kepada daerah rawan pangan.
 - Pemberdayaan petani untuk meningkatkan produksi pangan lokal.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- **Tujuan:** Meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi pertanian yang berkualitas.
- **Strategi:**
 - Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan harga yang terjangkau untuk petani.
 - Pengembangan benih unggul dan pupuk yang ramah lingkungan.
 - Penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- **Tujuan:** Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian.
- **Strategi:**
 - Pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan air bagi pertanian.
 - Pengembangan jalan tani yang menghubungkan area pertanian dengan pasar dan pusat distribusi.
 - Penyediaan sistem penyimpanan hasil pertanian yang efisien dan ramah lingkungan.
 - Peningkatan akses teknologi informasi untuk petani terkait pasar dan harga.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- **Tujuan:** Mengurangi dampak kerugian akibat bencana alam yang mengancam sektor pertanian.
- **Strategi:**
 - Pembentukan unit tanggap bencana pertanian di tingkat daerah.
 - Peningkatan kemampuan mitigasi bencana di tingkat desa dan kawasan pertanian rawan bencana.

5. Program Penyuluhan Pertanian

- **Tujuan:** Meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi baru dan praktik pertanian yang berkelanjutan.
- **Strategi:**
 - Pembentukan jaringan penyuluh pertanian yang profesional dan terlatih.
 - Penguatan pelatihan berbasis teknologi, termasuk penggunaan aplikasi digital untuk pertanian.

- Penyuluhan mengenai praktik pertanian ramah lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.
- Penyuluhan tentang manajemen keuangan dan pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Output dan Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan skema kebijakan tersebut adalah:

- **Output:**

- Peningkatan jumlah alat pertanian yang tersedia.
- Peningkatan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan tani, penyimpanan).
- Peningkatan hasil pertanian dan keberlanjutan produksi pangan lokal.
- Penurunan tingkat kerawanan pangan di daerah rawan pangan.
- Peningkatan jumlah petani yang terlindungi asuransi pertanian.

- **Outcome:**

- Ketahanan pangan yang lebih baik.
- Petani yang lebih sejahtera dan memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan teknologi.
- Sektor pertanian yang lebih produktif dan ramah lingkungan.
- Penanggulangan kerawanan pangan dan bencana pertanian yang lebih efektif.

Dengan implementasi kebijakan ini secara komprehensif dan sinergis, sektor pertanian akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta pengurangan kerawanan pangan dan dampak bencana pertanian. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dan masyarakat secara keseluruhan.

Kontribusi Sektor Perikanan

Sektor perikanan dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap diklasifikasikan menjadi penangkapan ikan dilaut dan penangkapan ikan di perairan umum, sedangkan perikanan budidaya diklasifikasikan atas jenis budidayanya, seperti budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung dan sawah.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, Panjang Garis Pantai Kabupaten Batu Bara sepanjang 62 Km dengan 6 Kecamatan Pesisir yang berbatasan langsung dengan selat malaka. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan baik untuk usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Salah satu potensi perikanan yang potensial untuk dikembangkan adalah perikanan budidaya dikarenakan perikanan budidaya dapat direkayasa dengan penggunaan atau penerapan teknologi budidaya hasil dari riset atau penelitian yang terus berkembang.

Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara sebesar 51.870,10 Ton, bila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 59.617,25 Ton, produksi tahun 2024 mengalami penurunan produksi sebesar 7.747,15 Ton.

Dalam upaya meningkatkan produksi perikanan, ada 3 program utama yang dilaksanakan Dinas perikanan dan peternakan, yaitu:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil. Bentuk kegiatan Pemberdayaan ini adalah pelatihan dan bimbingan teknis serta pendampingan usaha perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan kecil sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan kecil. Target dari peningkatan kapasitas nelayan yaitu jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya baik dari segi teknis maupun non teknis.
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Bentuk kegiatan berupa operasional pengelolaan Tempat Pelelangan ikan sebanyak 4 Unit yang terdiri dari TPI Tanjung Tiram, TPI Perupuk, TPI Lalang, TPI Medang Deras. Target dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan operasional layanan TPI berupa Tempat Pendaratan Ikan dan Tempat Jual Beli Ikan.

faktor pemicu lainnya dalam tercapainya indikator kinerja Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap antara lain :

1. Efek dari adanya kegiatan pergantian alat tangkap ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Batu Bara yang dilaksanakan dan dilanjutkan dengan bantuan-bantuan alat tangkap ramah lingkungan, sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap seperti banuan mesin, bantuan sampan, bantuan premi asuransi nelayan kepada nelayan-nelayan tradisional sehingga menggairahkan industry penangkapan di kabupaten batu bara baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Permintaan pasar domestic maupun ekspor akan produk hasil tangkapan berupa Ikan Kembung, Cumi-cumi, Gurita dan kepiting rajungan mengakibatkan nelayan beralih untuk menangkap jenis ikan tersebut ;
3. Mulai bergeliatnya pasar ekspor pasca pandemic *covid-19* khususnya untuk komoditas unggulan kabupaten batu bara seperti ikan Kembung, Cumi, Gurita, Rajungan, udang sehingga nelayan mulai beralih tangkapan ikan pada komoditas tersebut ;

Seiring beroperasinya TPI dan mulai berlakunya retribusi jasa usaha Tempat Pelalangan Ikan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 Dinas Perikanan melalui petugas TPI yang tersebar di 4 (empat) lokasi melakukan pencatatan hasil tangkapan ikan di gudang-gudang atau tangkahan sehingga dapat mengurangi hasil tangkapan ikan yang tidak tercatat (*unreported*); Selain hal tersebut diatas, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dilakukan secara sistematis. Kerjasama Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2024 dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan tujuan melakukan Pengawasan terpadu dan gabungan di wilayah perairan Kabupaten Batu Bara sebanyak 2 kali operasi gabungan dan didapat sebanyak 4 armada kapal yang tertangkap melakukan penangkapan ikan di luar zonanya serta menggunakan alat tangkap terlarang.

Produksi Perikanan Tangkap di Tahun 2024 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor antara lain: penurunan populasi ikan akibat eksploitasi berlebihan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem laut yang mengganggu proses pemijahan, serta perubahan iklim yang memengaruhi pola migrasi ikan. Selain itu, faktor teknis

seperti keterbatasan armada tangkap yang akibat kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar solar juga berperan besar dalam kegagalan pencapaian target produksi. Data perbandingan produksi ikan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.11.
Data Produksi Ikan berdasarkan pengelompokan jenis/komoditas
Tahun 2023-2024

No	Jenis Ikan	Produksi Ikan (Ton)	
		2023	2024
1	Ikan	29.050,60	31.807,38
2	Cumi/Gurita/Sotong	3.486,43	3.700,93
3	Udang	3.637,84	2.656,21
4	Teri	11.267,05	8.309,08
5	Ranjungan/Kepiting	1.125,72	1852,96
6	Kerang-Kerangan	3.848,32	3.543,53
	Jumlah	62.415,96	51.870.10

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara cukup besar yaitu seluas 5.277 Ha yang terdiri dari Potensi Budidaya Air Payau 4.030 Ha dan Air Tawar sebesar 1.247 Ha dengan komoditas unggulan seperti Udang, Ikan Kerapu, Ikan Lele, Ikan Gurane, Ikan Nila, Mas, Patin, Nila Salin, Bandeng.

Akan tetapi potensi perikanan tangkap yang cukup besar tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara masih belum memadai seperti Cold Storage berkapasitas besar, Pabrik Es Balok dan perlengkapan / teknologi penangkapan ikan untuk nelayan. Hal ini mengakibatkan kualitas mutu hasil tangkapan rendah dan dapat menimbulkan penurunan harga apabila hasil tangkapan melimpah dan tidak dapat ditampung oleh cold storage.

Sedangkan untuk pengelolaan budidaya ikan, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.

Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara sebagai upaya agar para pembudidaya ikan lebih berdaya dalam meningkatkan kemampuan budidaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui usaha budidaya ikan yang dijalani. Selain itu, melalui

kegiatan ini, Dinas Perikanan dan Peternakan juga memberikan fasilitasi secara terbuka kepada masyarakat umum yang memiliki ketertarikan untuk berusaha di bidang budidaya melalui pendampingan, pembinaan dan pelatihan serta fasilitasi sarana prasarana budidaya. Hasil dari kegiatan ini adalah sebanyak 30 Kelompok Pembudidaya Ikan yang dilatih berupa kegiatan pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik 8 Angkatan, Pelatihan Cara Budidaya Ikan dalam Ember (Budidamber) sebanyak 8 Angkatan dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Mandiri sebanyak 4 Angkatan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan usaha budidaya ikan tawar sesuai CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dengan harapan agar pembudidaya ikan mengalami peningkatan mutu usaha budidaya yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara juga menyediakan benih ikan air tawar dan Air Payau yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan. Hasil dari kegiatan ini adalah 9 Paket bantuan Sarana dan Prasaran Usaha Budidaya Ikan (Tawar dan Payau) yang diberikan kepada 9 (Sembilan) kelompok pembudidaya ikan.

Selain hal tersebut diatas, terdapat juga beberapa Faktor pemicu/pendorong keberhasilan peningkatan Volume produksi perikanan di Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Berkembangnya budidaya Air Tawar terutama untuk budidaya ikan lele system kolam terpal dengan memanfaatkan lahan pekarangan;
2. Mulai berkembangnya usaha budidaya kerang dara / Kerang Batu di Kabupaten Batu Bara;
3. Mulai berkembangnya usaha budidaya udang vaname di Kabupaten Batu Bara yang ditandai adanya investor / perusahaan yang melakukan usaha Budidaya Udang Vanama di Kabupaten Batu Bara;
4. Mulai terbukanya perusahaan / pengusaha tambak udang akan data produksi budidaya udang vaname;
5. Berkembangnya usaha budidaya Udang Vaname Sistem terpal dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terlalu luas;
6. Efek dari stimulus berupa bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan yang

telah diberikan oleh Dinas Perikanan Budidaya Batu Bara yang bersumber dari dana APBD Kab. Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan utama untuk peningkatan produksi dan pendapatan pembudidaya;

7. Kegiatan pelatihan, dan penyuluhan serta pendampingan usaha pada kelompok pembudidaya ikan;
8. Permintaan pasar ekspor khususya untuk budidaya udang dan kerapu terus meningkat

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan produksi perikanan budidaya, yaitu:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya baik budidaya air payau, air tawar dan air laut;
2. Kurangnya pasokan benur udang vaname yang cukup diakibatkan belum adanya Unit Pembenihan/Hatchery Udang Vaname di Kabupaten Batu Bara sehingga masih mengandalkan pasokan dari Kabupaten lain;
3. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
4. Terjadinya kenaikan harga pakan ikan sehingga menambah biaya produksi;
5. Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya ikan dan udang yang diterapkan pembudidaya di Kabupaten batu Bara;
6. Fluktuasi harga ikan terutama harga ikan lele yang mengakibatkan pembudidaya berhenti usaha dan beralih ke komoditas budidaya yang lain.

Dari beberapa faktor penghambat yang dihadapi di lapangan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan untuk periode selanjutnya:

1. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan serta melakukan pendampingan dalam penerapan teknologi baru;
2. Memfasilitasi kemudahan untuk mendapatkan bibit unggul;
3. Memberikan layanan bagi pelaku utama usaha perikanan untuk mendapat bahan bakar minyak bersubsidi dengan memberikan rekomendasi pembelian;

Pencapaian sasaran ini merupakan tanggung jawab 2 (dua) perangkat daerah utama, yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian, melakukan pengendalian dan

penanggulangan hama pertanian, melakukan penyuluhan pertanian, kemudian Dinas Perikanan dan Peternakan dengan program pengelolaan perikanan tangkap perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil ikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai dinas pendukung juga telah memberikan kontribusi yang besar dengan membangun irigasi sepanjang 127.636 m hingga tahun 2024, cakupan irigasi ini melayani areal fungsional irigasi seluas 2.763 Ha. Yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian di Batu Bara.

Pengembangan inovasi seperti SIPAJI BARA dan Pembibit Bawang Merah (dinas Pertanian dan Perkebunan), SIIKAN BARA dan Pengasapan Ikan Kedukang sebagai Mata Pencarian Alternatif (dinas Perikanan) yang telah dimulai sejak tahun 2023 terus diupayakan untuk berkembang.

Skema Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan yang telah di implemetasikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan dan produktivitas sektor perikanan.
2. Meningkatkan daya saing hasil perikanan melalui peningkatan kualitas dan pengolahan.
3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku sektor perikanan, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan perikanan.

Pelaksanaan skema kebijakan tersebut didukung dengan program-program Utama sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- **Tujuan:** Mengelola dan melestarikan potensi perikanan tangkap agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan.
- **Strategi:**
 - Penataan kawasan perikanan dan pengawasan aktivitas perikanan di laut.
 - Penerapan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan melalui sistem kuota dan izin tangkap yang terkontrol.
 - Peningkatan kualitas armada perikanan dengan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak terhadap ekosistem laut.
 - Implementasi sistem pemantauan, kontrol, dan pengawasan (MCP)

untuk mencegah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

- Program pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan penyuluhan tentang praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- Peningkatan kerja sama internasional untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan global.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- **Tujuan:** Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan dengan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan.
- **Strategi:**
 - Penyediaan benih unggul dan pakan berkualitas untuk budidaya ikan.
 - Penyuluhan kepada pembudidaya ikan mengenai teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan, termasuk penggunaan sistem recirculating aquaculture systems (RAS) atau tambak yang ramah lingkungan.
 - Pengembangan fasilitas pendukung seperti sistem pengolahan air dan pengendalian penyakit dalam budidaya ikan.
 - Pemberian insentif atau subsidi kepada pembudidaya ikan untuk mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran.
 - Penguatan peran koperasi dan kelompok usaha perikanan budidaya untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- **Tujuan:** Meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan dan memperluas pasar hasil perikanan baik domestik maupun internasional.
- **Strategi:**
 - Penyuluhan tentang teknik pengolahan hasil perikanan yang higienis dan efisien untuk meningkatkan daya saing produk.
 - Peningkatan kapasitas distribusi dan pemasaran, termasuk penggunaan platform digital dan e-commerce untuk memasarkan hasil perikanan.
 - Penyuluhan kepada pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen pemasaran dan penjualan produk perikanan.
 - Pengembangan jaringan pasar, baik domestik maupun internasional,

untuk memperluas jangkauan produk perikanan.

Output dan Outcome yang Diharapkan:

- **Output:**
 - Peningkatan jumlah produk perikanan yang dihasilkan melalui pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.
 - Peningkatan jumlah unit pengolahan hasil perikanan yang menggunakan teknologi modern dan memenuhi standar kualitas.
 - Penyebaran praktik perikanan berkelanjutan kepada nelayan dan pembudidaya ikan.
 - Penguatan pasar produk perikanan domestik dan internasional.
- **Outcome:**
 - Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian ketahanan pangan.
 - Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha pengolahan).
 - Perikanan yang lebih berkelanjutan dengan pengurangan eksploitasi berlebihan dan pencemaran.
 - Penurunan tingkat kerusakan ekosistem laut dan peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dengan implementasi kebijakan ini, sektor perikanan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Kabupaten Batu Bara. Program-program ini akan memperkuat daya saing perikanan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut dan perikanan.

Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran dan sumber daya diharapkan dapat meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perternakan, dan Perikanan, yang kemudian tercermin dalam indikator Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB. Berikut kami uraikan efisiensi kebijakan penggunaan sumber daya pada tabel dibawah:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perternakan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan	23	22,54	98,00	15.987.768.620,00	14.370.305.738,00	89,88	0,97

	Dan Perikanan	Perikanan terhadap PDRB							
--	---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tingkat pencapaian kinerja pada 22,54% sedikit lebih rendah daripada target yang ditetapkan sebesar 23%. Selisih ini mencapai 0,46%, yang bisa dianggap sebagai pencapaian yang hampir setara dengan target yang telah ditentukan. Secara umum, selisih yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit penyimpangan dari target, pencapaian tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima. Penggunaan anggaran lebih rendah sebesar 10,13% dibandingkan dengan yang dialokasikan. Secara logis, penghematan anggaran sebesar 10,13% sambil tetap mencapai hampir 100% dari target kinerja (22,54% vs. 23%) menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan cukup baik.

Capaian kinerja nyata sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perternakan, dan Perikanan sebesar 98,00% dengan predikat sangat tinggi.

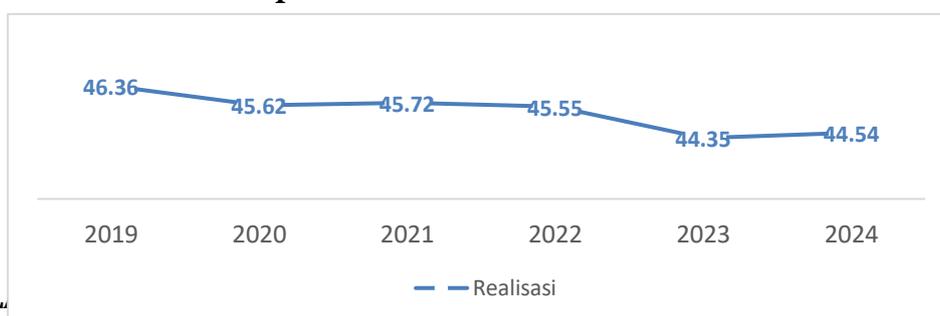
Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	46,00	44,35	96,41	46,50	44,54	95,78%

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian diukur dengan indikator angka Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 pertumbuhan pada sektor ini terus mengalami trend yang menurun, namun pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan.

Grafik 3.5.
Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2024



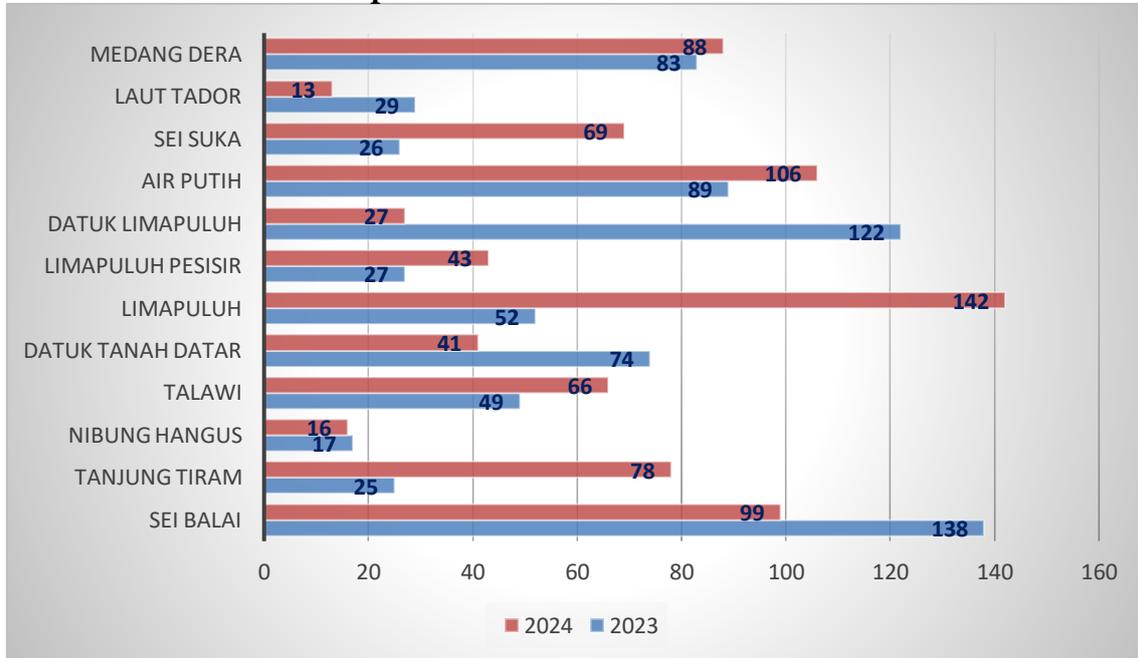
Dari grafik diatas dapat diketahui pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,19% jika dibandingkan tahun 2023, dimana Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 44,54%. Jika dibandingkan dengan target RPD sebesar 47,50%, pencapaian tahun 2024 masih sangat jauh, sangat diperlukan upaya yang massif agar dapat menaikkan pertumbuhan indikator ini secara signifikan di tahun mendatang.

Pengukuran capaian indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS. Capaian kinerja nyata pada indikator ini sebesar 95,78%, diperoleh dari target perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 46,50% dengan realisasi sebesar 44,54%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu bara di tahun 2024 tercatat sebesar 4,12%, dengan kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 44,54 % terhadap PDB. Kenaikan nilai tambah sektor perindustrian dari **44,35%** menjadi **44,54%** pada tahun 2024 meskipun terbilang kecil, menunjukkan adanya **perbaikan yang signifikan** dalam daya saing dan efisiensi sektor industri. Kenaikan ini bisa menjadi indikator bahwa sektor industri semakin berkembang dengan menambah kualitas produk dan proses produksi yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan investasi di sektor industri, diharapkan kontribusi sektor ini akan terus meningkat, berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian, serta membuka peluang untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Secara nilai sektor ini terus mengalami kenaikan nilai setiap tahunnya, yaitu 12.432,53 Miliar pada tahun 2024, untuk nilai Laju PDRB terhadap harga konstan 2010 industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 5,71%.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Batu Bara, Pada tahun 2024 jumlah perusahaan industri besar dan menengah di Batu Bara berjumlah 33 perusahaan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Batu Bara. Sedangkan jumlah industri kecil dan kerajinan rumah tangga pada tahun 2024 berjumlah 788, terjadi penambahan sebanyak 57 unit jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 731 unit.

Grafik 3.6.
Perbandingan Industri Kecil Dan Rumah Tangga
Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dan 2024



Dari grafik diatas, Kecamatan Lima Puluh mengalami peningkatan yang sangat signifikan terjadi peningkatan sebesar 90 unit industri kecil dan kerajinan tangan, namun terdapat penurun yang sangat besar pada Kecamatan Datuk Tanah Datar, Sei Balai dan datuk lima puluh

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu tumpuan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Selain didukung dengan bahan baku yang cukup memadai dan tenaga kerja yang cukup potensial, berbagai upaya juga dilakukan untuk melalukan perbaikan, terutama pada industri menengah, industri kecil dan rumah tangga.

Terdapat 2 (dua) Perangkat daerah utama yang bertanggungjawab terhadap peningkatan pertumbuhan industri, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dengan Program Hubungan Industrial, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro, Program Pengembangan UMKM.

Untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan berupaya meningkatkan beberapa faktor kunci, seperti **akses permodalan, infrastruktur, pengembangan SDM, akses pasar, dan inovasi teknologi**. Dengan melakukan peningkatan pada faktor-faktor ini, sektor industri dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kontribusinya terhadap **PDRB**, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Skema kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri terhadap **PDRB** dapat disusun melalui beberapa program strategis yang berfokus pada pengembangan hubungan industrial, perencanaan dan pembangunan industri, serta pengembangan UMKM. Berikut adalah skema kebijakan dan rencana aksi yang dapat dilakukan.

1. Program Hubungan Industrial

Meningkatkan kemitraan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri. Adapun Rencana Aksi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan Kerja Sama antara Pengusaha dan Serikat Pekerja:
 - o Kegiatan: Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengusaha dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
 - o Output: Penurunan jumlah konflik di sektor industri, meningkatnya kerjasama produktif dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan.
- b. Pelatihan dan Pembinaan Tenaga Kerja:
 - o **Kegiatan:** Melakukan pelatihan bagi tenaga kerja terkait hak dan kewajiban, serta keterampilan teknis yang dibutuhkan industri.
 - o **Output:** Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dapat mendukung efisiensi dan kualitas produksi.
- c. Penyuluhan Mengenai Kebijakan Ketenagakerjaan:
 - o **Kegiatan:** Menyediakan program penyuluhan tentang kebijakan ketenagakerjaan yang menguntungkan pengusaha dan pekerja.
 - o **Output:** Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban di tempat kerja serta mencegah terjadinya perselisihan yang

dapat mengganggu produktivitas.

2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Merencanakan dan membangun infrastruktur serta mendukung sektor industri untuk dapat berkembang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB. Bentuk rencana aksi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pembangunan Infrastruktur Industri yang Terintegrasi:
 - **Kegiatan:** Mempercepat pembangunan dan peningkatan **infrastruktur kawasan industri**, termasuk akses transportasi, energi, dan teknologi informasi.
 - **Output:** Terwujudnya kawasan industri yang lebih efisien, mengurangi biaya produksi, dan memfasilitasi akses pasar.
- b. Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Lokal:
 - **Kegiatan:** Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah, seperti bahan baku pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 - **Output:** Meningkatkan daya saing produk lokal melalui penggunaan bahan baku dari sektor-sektor yang ada di daerah.
- c. Program Penyuluhan untuk Industri Baru dan yang Sudah Ada:
 - **Kegiatan:** Menyediakan pelatihan dan penyuluhan tentang inovasi dan pengembangan produk untuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM).
 - **Output:** Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri lokal, mendorong inovasi, serta memperkenalkan teknologi terbaru.

3. Program Pengembangan UMKM

Mendorong pertumbuhan **UMKM** di sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat basis ekonomi daerah, yang akhirnya akan mendukung pertumbuhan PDRB. Rencana Aksinya adalah:

- a. Pemberian Akses Permodalan yang Mudah dan Terjangkau:
 - **Kegiatan:** Memfasilitasi **akses permodalan** melalui program kredit usaha rakyat (KUR), kemitraan dengan bank, atau lembaga pembiayaan mikro untuk UMKM.

- **Output:** Meningkatkan kapasitas produksi UMKM, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan sektor industri.
- b. Penguatan Keterampilan Manajerial dan Teknis UMKM:
 - **Kegiatan:** Menyediakan pelatihan keterampilan manajerial, pengelolaan keuangan, dan teknologi produksi bagi pelaku UMKM.
 - **Output:** UMKM yang lebih efisien, kompetitif, dan mampu bertahan dalam persaingan pasar.
- c. Pendampingan untuk Peningkatan Kualitas dan Inovasi Produk:
 - **Kegiatan:** Menyediakan pendampingan dan bimbingan dalam hal inovasi produk, standar kualitas, dan branding produk.
 - **Output:** Peningkatan daya saing produk UMKM, baik di pasar lokal maupun internasional, serta memperkuat industri pengolahan.
- d. Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM:
 - **Kegiatan:** Menyediakan platform pemasaran online atau kerja sama dengan asosiasi perdagangan untuk memperluas jaringan distribusi UMKM.
 - **Output: Peningkatan** volume penjualan UMKM dan akses ke pasar yang lebih luas.

Melalui kebijakan yang mengintegrasikan program Hubungan Industrial, Perencanaan dan Pembangunan Industri, serta Pengembangan UMKM, Kabupaten Batu Bara dapat mendorong sektor industri untuk berkontribusi lebih besar terhadap PDRB. Rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas UMKM akan fokus pada:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk industri, baik dari sisi fisik maupun teknologi.
2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta pengelolaan sektor industri dan UMKM.
3. Pemberian Akses Pasar dan Pembiayaan untuk sektor industri dan UMKM, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing.
4. Inovasi dan Teknologi sebagai pendorong efisiensi dan produktivitas sektor industri dan UMKM.

Meskipun telah dirancang skema kebijakan yang komprehensif untuk

mendorong pertumbuhan sektor industri, ada sejumlah kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kendala-kendala ini berkaitan dengan aspek permodalan, keterampilan, pemasaran, kreativitas, inovasi, teknologi, dan tata kelola yang masih dihadapi oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro. Berikut adalah analisis kendala-kendala yang perlu diatasi serta solusi alternatif yang menjadi tindak lanjut kedepan:

1. **Kurangnya Permodalan Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)**

Banyak pelaku IKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan **akses permodalan** yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini terutama terjadi karena keterbatasan **jaminan** yang dimiliki oleh pelaku IKM, serta ketatnya persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan. Persoalan ini mengakibatkan keterbatasan dana untuk memperluas kapasitas produksi, membeli teknologi baru, dan melakukan inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar.

Solusi yang diperlukan dan sedang diupayakan adalah:

- Penyediaan program pembiayaan alternatif, seperti kredit mikro, kemudahan pembiayaan berbasis kelompok, dan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro.
- Membuka akses pendanaan dari investor atau lembaga pengelola dana yang berfokus pada sektor industri kecil.

2. **Kurangnya Kemampuan Skill dan Kemampuan Teknis Pelaku IKM**

Banyak pelaku IKM di Kabupaten Batu Bara yang kurang memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam proses produksi dan manajemen industri, baik dalam aspek pengolahan bahan baku, kontrol kualitas, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Kurangnya keterampilan ini menyebabkan rendahnya efisiensi produksi dan kualitas produk yang dihasilkan, yang berimbas pada daya saing yang lemah.

Solusi yang diperlukan antara lain:

- Pelatihan keterampilan teknis dan manajerial secara berkelanjutan bagi pelaku IKM, terutama yang berkaitan dengan standar kualitas, teknologi produksi, dan manajemen keuangan.
- Kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan akses pelatihan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat

ini.

3. Kurangnya Akses Pelaku IKM untuk Memasarkan Produknya

Pelaku IKM sering kali mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara luas, terutama di pasar lokal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran, serta terbatasnya akses ke platform digital atau jaringan pemasaran. Tidak jarang, produk IKM yang berkualitas tinggi terhambat untuk mencapai konsumen karena terbatasnya jaringan distribusi dan pemasaran yang dimiliki pelaku usaha mikro dan kecil.

Solusi alternatif yang diperlukan adalah:

- Peningkatan akses pemasaran melalui platform e-commerce dan pemasaran digital, serta penyediaan program pendampingan pemasaran yang melibatkan pelaku IKM dalam kegiatan pameran dan ekspor.
- Kolaborasi dengan sektor perdagangan dan asosiasi perdagangan untuk mempermudah pemasaran produk IKM secara global.

4. Kurangnya Kreativitas dan Inovasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah

Kurangnya kreativitas dan inovasi dalam hal desain produk, variasi, serta proses produksi menyebabkan produk IKM menjadi kurang menarik di pasar yang semakin kompetitif. Banyak pelaku IKM yang masih menjalankan bisnis mereka dengan metode tradisional dan tidak mengikuti perkembangan tren pasar. Hal ini berisiko menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk-produk yang ditawarkan.

Solusi yang diperlukan:

- Memperkenalkan **desain produk** yang lebih modern dan menarik.
- Pendampingan dalam riset pasar dan penerapan strategi inovatif, baik dalam desain maupun dalam proses produksi yang lebih efisien.

5. Kurangnya Penggunaan Teknologi dan Peralatan Produksi yang Efektif dan Efisien

Banyak pelaku IKM yang masih mengandalkan teknologi tradisional dalam proses produksi, yang mengakibatkan proses produksi menjadi tidak efisien dan biaya produksi tinggi. Ketidaktahuan dalam penerapan teknologi terbaru atau digitalisasi menyebabkan mereka tertinggal dari para pesaing.

Solusi yang diperlukan antara lain:

- Pelatihan mengenai penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, misalnya melalui penggunaan mesin otomatis, teknologi pengolahan digital, dan sistem manajemen produksi berbasis teknologi.

6. Kurangnya Kemampuan Tata Kelola Pelaku Usaha Mikro

Pelaku usaha mikro sering kali kurang memiliki pemahaman dalam mengelola operasional usaha mereka secara profesional, baik dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, maupun pengambilan keputusan strategis. Ketidakteraturan dalam tata kelola ini menyebabkan usaha mikro sering kali mengalami kesulitan dalam bertahan dan mengembangkan usaha mereka.

Solusi yang diperlukan:

- Penyuluhan dan pelatihan tata kelola usaha bagi pelaku usaha mikro, termasuk dalam manajemen keuangan, perencanaan bisnis, dan pengelolaan sumber daya manusia.
- Bantuan dalam pembuatan rencana bisnis yang realistis dan berkelanjutan.

7. Kurangnya Akses Teknologi Informasi Bagi Pelaku Usaha Mikro di Era Digital

Ketergantungan pada cara pemasaran dan manajemen konvensional menghambat potensi pelaku usaha mikro untuk berkembang di era digital.

Solusi yang diperlukan:

- Penyediaan pelatihan teknologi informasi untuk pelaku usaha mikro agar dapat menggunakan platform digital dan e-commerce dalam pemasaran serta software manajemen bisnis untuk meningkatkan efisiensi.
- Meningkatkan akses internet dan teknologi informasi di daerah pedesaan untuk membantu pelaku usaha mikro.

8. Kurangnya Jiwa Kewirausahaan

Banyak pelaku usaha mikro yang masih bergantung pada usaha tradisional dan kurang memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu membawa inovasi, menanggapi tantangan pasar, dan melakukan diversifikasi usaha. Kurangnya keberanian untuk berinovasi dan mengambil risiko menghambat pertumbuhan usaha mikro.

Solusi yang diperlukan:

- Pelatihan kewirausahaan yang tidak hanya fokus pada teknik produksi, tetapi juga pada mindset kewirausahaan, keberanian untuk berinovasi, serta

kemampuan dalam mengambil keputusan strategis.

- Membuka peluang kemitraan antara pelaku usaha mikro dan usaha besar agar mereka dapat belajar dari pengusaha yang lebih berpengalaman.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku IKM dan usaha mikro di Kabupaten Batu Bara, seperti keterbatasan permodalan, keterampilan teknis, akses pasar, kreativitas, inovasi, dan penggunaan teknologi, memerlukan perhatian dan upaya nyata dari pemerintah dan lembaga terkait. Untuk mendorong pertumbuhan sektor industri yang lebih besar terhadap PDRB, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti pemberian akses permodalan, pelatihan keterampilan, pemasaran produk, serta penerapan teknologi dan inovasi yang lebih efektif.

Mengoptimalkan alokasi anggaran dan sumber daya, dapat memastikan Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian yang kemudian tercermin dalam indikator Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB. Berikut kami uraikan efisiensi kebijakan penggunaan sumber daya pada tabel dibawah:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	46,50	44,54	95,78	2.591.813.500,00	2.488.508.505,00	96,01	0,95

Meskipun tingkat penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, perbedaan antara target dan realisasi kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai hasil yang maksimal masih perlu dievaluasi. Dengan penguatan program kebijakan, serta penyesuaian strategi untuk mengatasi tantangan yang ada, diharapkan sektor industri dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB di masa yang akan datang.

Sasaran meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	19,96	18,37	92,03	18,00	18,15	100,83

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan.

Sasaran meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan, memiliki indikator:

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB

Pencapaian kinerja pada indikator ini diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Target PDRB Sektor Perdagangan}} \times 100\% \\
 &= \frac{18,15}{18} \times 100\% \\
 &= 100,83\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2024, sektor perdagangan Kabupaten Batu Bara mencatatkan realisasi kinerja sebesar 18,15%, yang sedikit lebih tinggi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 18,00%. Pencapaian ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam mencapai target yang ditentukan, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yang tercatat sebesar 18,37%, sektor perdagangan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,22%. Penurunan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor

yang menyebabkan hal ini, seperti fluktuasi pasar atau perubahan kebijakan ekonomi.

Jika dilihat dari perbandingan dengan Provinsi Sumatera Utara, capaian sektor perdagangan di Provinsi Sumut pada tahun 2024 mencapai 18,79%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batu Bara. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih baik, meskipun kontribusinya cukup signifikan. Dalam konteks ini, Kabupaten Batu Bara perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi pertumbuhannya dan mengevaluasi kebijakan serta strategi yang telah diterapkan agar lebih sejalan dengan capaian di tingkat provinsi.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 13,07% pada tahun 2024, sektor perdagangan Kabupaten Batu Bara menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik, dengan selisih sebesar 5,08%. Ini mencerminkan bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara telah berhasil melampaui rata-rata nasional, yang tentunya menjadi hal positif dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selain itu, perbandingan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 21,82%, menunjukkan adanya target pertumbuhan yang lebih ambisius untuk sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara. Meskipun capaian tahun 2024 masih jauh dari target tersebut, pencapaian sebesar 18,15% menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dan strategi yang lebih tepat untuk memastikan bahwa sektor perdagangan dapat mencapai target akhir RPD pada tahun 2026. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pencapaian sektor perdagangan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik, meskipun terdapat penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun 2023. Capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan sudah mendekati capaian Provinsi Sumatera Utara. Namun, untuk mencapai target jangka panjang pada tahun 2026, sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara perlu dioptimalkan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pasar, dan penguatan sektor perdagangan agar dapat mengejar selisih dengan capaian provinsi dan memenuhi target RPD yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara yang dituangkan dalam Barada 2025, sektor perdagangan besar dan eceran, mengalami ketidakstabilan selama periode 2020-2024, terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,22% dibandingkan tahun 2023, berikut dapat dilihat dari tabel dibawah peningkatan yang terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Tabel 3.12.

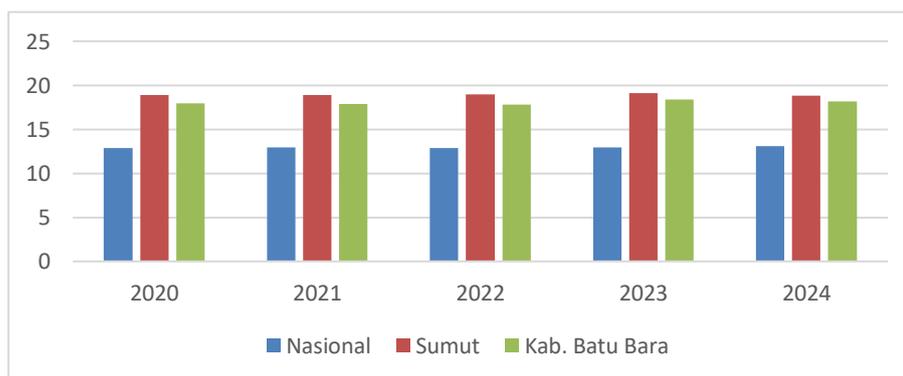
Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Dari Tahun 2020-2024 Di Kabupaten Batu Bara

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan besar dan eceran	17,96	17,89	17,82	18,37	18,15
Peningkatan	0,73	-	-	0,55	-
Penurunan	-	0,07	0,07	-	0,22

Grafik berikut ini menggambarkan perbandingan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) antara Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan tingkat nasional pada tahun 2024. Data ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana sektor perdagangan berperan dalam perekonomian masing-masing wilayah. Sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara, yang memiliki posisi strategis dan akses ke pelabuhan internasional, menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB daerah, meskipun dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, terdapat perbedaan yang mencerminkan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Grafik 3.7.

Perbandingan Sektor Perdagangan Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional tahun 2020-2024



Letak geografis Kabupaten Batu Bara memainkan peran strategis dalam perkembangan sektor perdagangan di daerah ini. Dengan lokasi yang menghubungkan berbagai kawasan penting di Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar dalam aktivitas perdagangan, baik lokal maupun internasional. Kabupaten Batu Bara memiliki akses langsung ke Laut Malaka, yang merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat sibuk. Pelabuhan Laut yang ada di Batu Bara memberikan kesempatan besar untuk perdagangan internasional. Meskipun Batu Bara tidak memiliki tambang batu bara, pelabuhan ini tetap menjadi pusat penting untuk distribusi barang lainnya, seperti produk pertanian, hasil industri, dan komoditas lokal lainnya. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan ekspor dan mendukung sektor perdagangan dalam skala global.

Meskipun Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar dalam hal akses ke Laut Malaka dan pelabuhan laut, beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur pelabuhan, kurangnya fasilitas logistik, kualitas produk yang belum optimal, kurangnya promosi internasional, dan hambatan regulasi masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan potensi perdagangan internasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas produk, serta kemudahan regulasi ekspor agar Kabupaten Batu Bara bisa memaksimalkan akses ke pasar global.

Untuk meningkatkan potensi sektor perdagangan terutama potensi perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Batu Bara, kebijakan yang diimplementasikan perlu melibatkan berbagai aspek yang saling mendukung. Berikut adalah skema kebijakan yang dapat diambil untuk mendorong potensi sektor perdagangan di Kabupaten Batu Bara:

1. Pengembangan Infrastruktur Perdagangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan, seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, serta fasilitas distribusi lainnya. Pengembangan fasilitas logistik untuk memperlancar distribusi barang, seperti pergudangan dan sistem transportasi yang efisien.

Rencana Aksi:

- Pembangunan atau renovasi pasar tradisional dan modern yang dapat

meningkatkan daya tampung serta kenyamanan pembeli dan pedagang.

- Peningkatan akses transportasi melalui pembangunan jalan, perbaikan akses pelabuhan, dan fasilitas angkutan barang.
- Pembangunan atau peningkatan fasilitas logistik, termasuk gudang dan jalur distribusi barang.

2. Digitalisasi Sektor Perdagangan

Mendorong digitalisasi dalam sektor perdagangan untuk meningkatkan akses pasar melalui platform e-commerce dan sistem pembayaran digital.

Rencana Aksi:

- Menyediakan pelatihan dan bimbingan untuk pelaku UMKM dan pedagang agar bisa memanfaatkan platform e-commerce dalam memasarkan produk mereka.
- Memperkenalkan dan mengintegrasikan sistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi perdagangan.
- Fasilitasi akses internet bagi pedagang di kawasan yang sulit dijangkau dengan teknologi untuk memastikan pemerataan digitalisasi.

3. Pemberdayaan UMKM dan Pelaku Usaha Mikro

Memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM dalam sektor perdagangan dan eceran.

Rencana Aksi:

- Menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM dalam hal manajemen bisnis, pemasaran, dan penggunaan teknologi.
- Mendorong UMKM untuk memperkenalkan produk mereka melalui pameran atau bazar yang melibatkan perdagangan lokal dan luar daerah.

4. Penyediaan Akses Pasar yang Lebih Luas

Memperluas jaringan distribusi dan akses pasar untuk produk lokal melalui pengembangan pusat perdagangan dan pemasaran, serta kerjasama dengan pasar regional atau internasional.

Rencana Aksi:

- Mengadakan program promosi dan pemasaran produk lokal untuk meningkatkan penetrasi pasar luar daerah.
- Meningkatkan peran pasar tradisional dengan modernisasi fasilitas dan meningkatkan kualitas produk yang dijual untuk menarik pembeli lebih

banyak.

- Memfasilitasi UMKM dan sektor perdagangan lokal dalam hal akses ekspor dengan memperkenalkan produk-produk unggulan Kabupaten Batu Bara ke pasar internasional.

5. Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kapasitas SDM di sektor perdagangan dan eceran agar lebih kompetitif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar.

Rencana Aksi:

- Menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang fokus pada pengelolaan bisnis, pemasaran, dan manajemen keuangan untuk pelaku usaha perdagangan.
- Menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi dan perangkat yang mendukung perdagangan (misalnya, sistem point-of-sale, e-commerce, manajemen inventaris).
- Memfasilitasi sertifikasi bagi pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produk yang dijual.

Melalui skema kebijakan yang menyeluruh ini, Kabupaten Batu Bara dapat mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran dengan meningkatkan infrastruktur, memanfaatkan digitalisasi, memperkuat kemitraan dengan sektor industri, serta memberdayakan UMKM. Hal ini akan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan membuka peluang pasar yang lebih luas baik untuk produk lokal maupun ekspor.

Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja untuk indikator ini antara lain adalah:

1. belum maksimalnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan khususnya pasar rakyat.
2. tingginya fluktuasi harga barang pokok dan barang penting kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi inflasi daerah dan daya beli masyarakat.
3. belum optimalnya pelaksanaan peningkatan tertib niaga dan tertib ukur karena terbatasnya anggaran operasional pelayanan dan SDM penera dan pengawas penera alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

Adapun Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

1. Merevitalisasi sarana dan prasarana pasar tradisional.

2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan pasar tradisional.
3. Melakukan monitoring dan pemantauan harga barang pokok kebutuhan masyarakat.
4. Melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga barang pokok dan barang strategis kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur serta pengawasan kemetrolagian dalam upaya peningkatan tertib niaga dan tertib ukur.
6. Memfasilitasi UMKM dalam peningkatan produksi dan pemasaran melalui bantuan alatproduksi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
7. Mendorong dan melakukan pendampingan pemasaran produk UMKM secara Online.

Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran dan sumber daya, pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran yang terealisasi dapat memberikan hasil maksimal. Hal ini sangat penting dalam Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan, yang kemudian tercermin dalam indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Berikut kami uraikan efisiensi kebijakan penggunaan sumber daya pada tabel dibawah:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,00	18,15	100,83	610.650.000,00	606.746.590,00	99,36	1,00

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja yang melebihi target dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan sumber daya dalam sektor perdagangan dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang berhasil dan efisien. Pengelolaan anggaran yang baik dan capaian kinerja yang optimal menjadi bukti bahwa sektor perdagangan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dengan tetap menjaga efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persen		5,88		5,8-5,5	5,75	98,23

Sasaran Menurunnya tingkat pengangguran, Memiliki 1 (satu) Indikator sebagai berikut:

Persentase tingkat pengangguran terbuka

Pada tahun 2024, **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** ditetapkan sebagai indikator baru untuk mengukur tingkat pengangguran. Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa banyak penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada tahun 2023, TPT tidak menjadi indikator resmi yang diukur, sehingga tidak ada data yang secara langsung dapat dibandingkan antara kedua tahun tersebut.

Meskipun demikian, **baseline tahun 2023 sebesar 5,88%** dapat digunakan sebagai acuan awal untuk mengukur capaian TPT di tahun 2024. Angka ini, meskipun tidak resmi atau dijadikan indikator utama pada tahun sebelumnya, menggambarkan tingkat pengangguran yang ada pada tahun 2023. Oleh karena itu, angka **5,88%** ini dapat dianggap sebagai patokan atau referensi dalam evaluasi kinerja pada tahun 2024.

Dengan mengacu pada baseline 2023, penetapan target pengurangan pengangguran di tahun 2024 menjadi hal yang penting. Misalnya, jika tujuan kebijakan adalah untuk mengurangi TPT sebesar 0,5% di tahun 2024, maka target yang ingin dicapai adalah 5,38%. Pada akhir tahun 2024, hasil pengukuran TPT dapat dibandingkan dengan angka ini untuk menentukan apakah kebijakan yang diterapkan telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran atau tidak.

Capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 98,23%, diperoleh dari target sebesar 5,8%-5,5% dan realisasi sebesar 5,75%.

Capaian 5,75% persen ini jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 5,88% mengalami sedikit penurunan sebesar 0,13% namun pencapaian ini masih menunjukkan adanya tantangan dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Batu Bara.

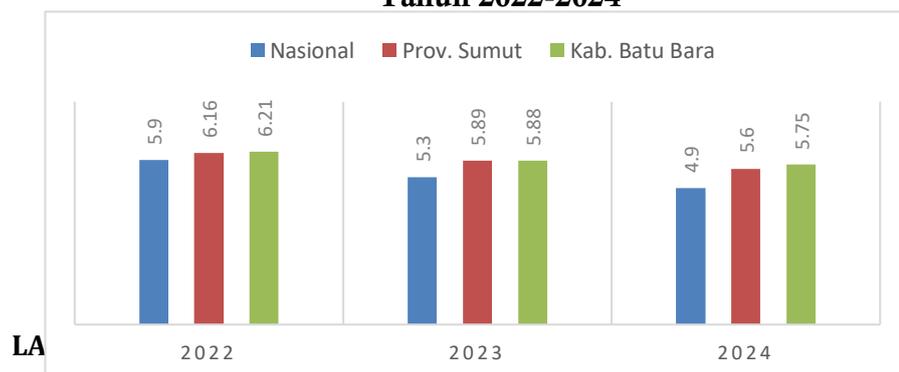
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 5,60% pada tahun 2024. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan TPT Kabupaten Batu Bara yang mencapai 5,75%. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, angka 5,60% menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara sedikit lebih baik dalam mengurangi tingkat pengangguran dibandingkan dengan Kabupaten Batu Bara.

TPT Kabupaten Batu Bara juga lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT Nasional (4,90%). Ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran secara nasional cenderung lebih rendah, Kabupaten Batu Bara masih menghadapi tantangan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini antara lain ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja antar daerah, keterbatasan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, bahkan kebijakan yang belum optimal.

Target akhir RPD tahun 2026 sebesar 5% menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara berencana untuk menurunkan TPT lebih lanjut hingga mencapai angka 5% dalam 2 tahun mendatang. Ini merupakan tujuan yang lebih ambisius dibandingkan dengan TPT tahun 2024 yang masih berada di angka 5,75%.

Grafik berikut menggambarkan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencakup TPT Kabupaten Batu Bara, TPT Provinsi Sumatera Utara, dan TPT Nasional. Grafik ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan tingkat pengangguran di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional selama tiga tahun terakhir.

Grafik 3.8.
Perkembangan TPT Nasioanal, Provinsi Sumut dan Kabupaten Batu Bara Tahun 2022-2024

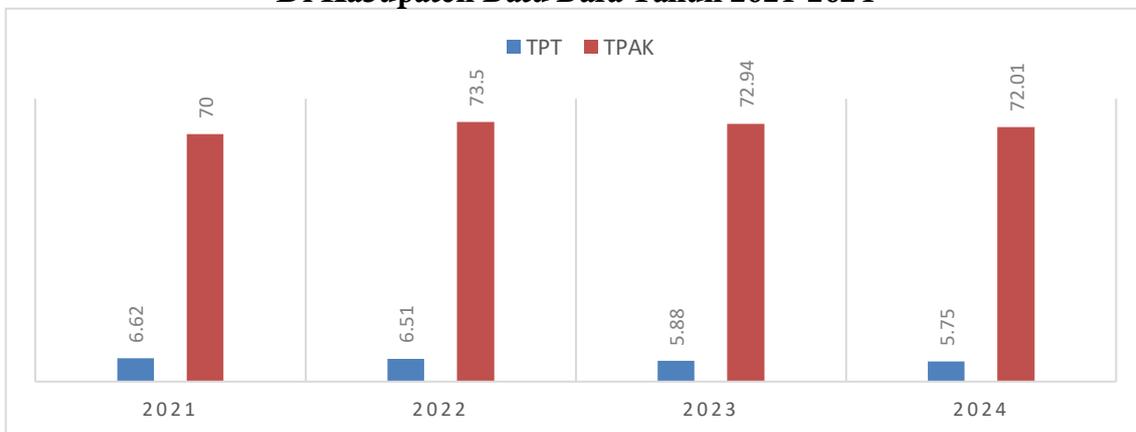


Dari grafik yang dapat dilihat, ada perbedaan yang jelas antara TPT Kabupaten Batu Bara, TPT Provinsi, dan TPT Nasional. Kabupaten Batu Bara, meskipun mengalami penurunan yang stabil dari 2023 hingga 2024, masih memiliki angka TPT yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang lebih besar di tingkat kabupaten dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi angkatan kerja.

Berdasarkan data BPS yang disampaikan pada Barada 2025 jumlah Angkatan kerja Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 adalah sebesar 225.562 Orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 224.741 Orang, terjadi penambahan angkatan kerja sebesar 821 orang. Dari jumlah 225.562 orang angkatan kerja Kabupaten Batu Bara, sebanyak 212.593 orang adalah pekerja dan 12.969 orang adalah pengangguran.

Sebagai perbandingan perkembangan TPT dan TPAK di Batu Bara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Grafik 3.9.
Perbandingan TPT dan TPAK
Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa TPT mengalami penurunan setiap tahun dari 2021 hingga 2024, meskipun penurunan tersebut tidak signifikan. Penurunan TPT ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan, di mana lebih banyak orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Penurunan TPT juga bisa mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang semakin memperbaiki lapangan pekerjaan.

TPAK menunjukkan adanya fluktuasi, meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2023 dan 2024 dibandingkan dengan 2022. Namun, secara umum, TPAK lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yang bisa menandakan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Artinya, lebih banyak orang yang aktif mencari pekerjaan atau terlibat dalam dunia kerja. Penurunan TPAK di tahun 2023 dan 2024 bisa mengindikasikan adanya tantangan baru dalam menjaga partisipasi angkatan kerja. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan ada perbaikan dalam pasar tenaga kerja, tetapi dengan tantangan yang masih perlu diatasi agar tren positif terus berlanjut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi di Kabupaten Batu Bara tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat yang saling terkait dan memperburuk keadaan. Keempat faktor utama yang menjadi penghambat penurunan TPT di Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Ketidakseimbangan antara Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja

Salah satu faktor utama penghambat penurunan TPT adalah ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dan jumlah lapangan pekerjaan yang terbuka. Setiap tahun, banyak lulusan sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang universitas dan langsung memasuki pasar tenaga kerja. Namun, ketidaksesuaian antara keahlian yang mereka miliki dan peluang pekerjaan yang tersedia membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak disertai dengan ekspansi sektor-sektor ekonomi yang cukup menyebabkan tingginya pengangguran di Kabupaten Batu Bara.

2. Rendahnya Kualitas Angkatan Kerja

Data BPS 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 54% penduduk atau sekitar 114.929 yang bekerja di Kabupaten Batu Bara memiliki tingkat pendidikan rendah, yaitu tidak/belum tamat SD atau hanya tamat SLTP. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas tenaga kerja yang ada, yang tentu saja menghambat upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor-sektor yang lebih berkembang. Ketidakesesuaian antara kemampuan angkatan kerja dengan kebutuhan industri semakin memperburuk ketimpangan, mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan

yang relevan.

3. Kualifikasi dan Kompetensi Pencari Kerja yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Banyak pencari kerja di Kabupaten Batu Bara yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang belum sepenuhnya sesuai dengan permintaan pasar. Sektor-sektor yang berkembang, seperti teknologi, manufaktur modern, dan sektor berbasis pengetahuan lainnya, membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Namun, banyak angkatan kerja di Kabupaten Batu Bara yang terjebak dalam pekerjaan dengan keterampilan rendah, dan mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk pelatihan atau pendidikan yang dapat mengupgrade keterampilan mereka.

4. Rendahnya Motivasi dan Jiwa Kewirausahaan

Motivasi kewirausahaan yang rendah di kalangan masyarakat juga berperan dalam terbatasnya lapangan pekerjaan yang tercipta. Meskipun sektor informal mungkin mampu menyerap sebagian angkatan kerja, banyak individu yang lebih memilih bekerja di sektor formal meskipun peluangnya terbatas. Kurangnya motivasi untuk memulai usaha sendiri atau menciptakan lapangan pekerjaan baru menghambat terciptanya peluang kerja yang dapat menurunkan pengangguran secara signifikan.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, berbagai solusi alternatif dan kebijakan telah dan akan diterapkan untuk memperbaiki situasi ini. Berikut adalah beberapa langkah yang telah/akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Batu Bara mengatasi berbagai hambatan tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Diimplementasikan melalui Program Pelatihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis unit kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga angkatan kerja lebih siap untuk bekerja di sektor formal maupun informal. Kegiatan dan Implementasi yang dilakukan berupa:

- Penyusunan standar kompetensi sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar kerja lokal yang berkembang.
- Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi yang mengacu pada unit kompetensi

tertentu, misalnya pelatihan dalam bidang teknik mesin, keterampilan digital, keahlian di sektor pariwisata, dan pelatihan kewirausahaan.

- Pelatihan ini dilakukan di balai latihan kerja yang ada di daerah setempat, lembaga pendidikan vokasi, serta mitra industri yang memiliki fasilitas dan pengalaman dalam memberikan pelatihan.
- Memberikan sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri dan pasar tenaga kerja untuk memastikan bahwa peserta pelatihan memiliki keahlian yang relevan dan dapat diterima oleh perusahaan atau industri.
- Pelatihan untuk Kelompok Rentan dan Berpendidikan Rendah:

Mengembangkan program pelatihan yang lebih inklusif, mengarah pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal yang tinggi, agar mereka dapat mengakses lapangan kerja dengan keterampilan dasar.

Adapun dampak yang diharapkan adalah:

- Meningkatkan keterampilan angkatan kerja, sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan permintaan pasar.
- Memperbaiki kualitas tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan mengurangi ketimpangan dalam penyediaan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.
- Meningkatkan daya saing angkatan kerja dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sektor formal atau informal.

2. Pengembangan Sistem Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja melalui Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penempatan tenaga kerja ke sektor yang membutuhkan melalui layanan antar kerja, sehingga tenaga kerja yang terlatih dapat dengan cepat disalurkan ke lapangan pekerjaan yang sesuai. Pembangunan atau penguatan lembaga penempatan kerja, seperti Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan berfungsi untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja yang lebih cepat ke pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memaksimalkan potensi yang ada. Dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik itu tenaga kerja, teknologi,

maupun sumber daya alam, kita dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pencapaian tujuan. Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pengelolaan yang cerdas dan terintegrasi akan membuka peluang untuk inovasi dan kemajuan yang lebih baik di masa depan. Berikut disajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,8-5,5	5,75	98,23	3.825.976.29,00	3.592.029.996,00	93,89	0,97

Realisasi TPT tercatat pada angka 5,75%, yang berada di tengah-tengah target, lebih dekat ke batas bawah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menurunkan TPT cukup efektif, meskipun tidak mencapai angka ideal (5,5%). Realisasi anggaran yang digunakan sebesar 3.592.029.996,00, yang berarti ada penghematan anggaran sebesar 6,1%. Secara keseluruhan, meskipun target kinerja TPT belum sepenuhnya tercapai, efisiensi penggunaan sumber daya terlihat jelas melalui penghematan anggaran yang cukup signifikan tanpa mengurangi hasil yang dicapai. Efisiensi ini mencerminkan pengelolaan yang baik terhadap anggaran dan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan penurunan TPT.

Capaian sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran sebesar 98,23% dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya inovasi daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45 (Inovatif)	53,17 (Inovatif)	118,15	55,0 (Inovatif)	47,01 (Inovatif)	85,47%

Sasaran Indeks inovasi daerah memiliki 1 (satu) indikator dengan analisa sebagai berikut:

Indeks inovasi daerah

Pencapaian kinerja pada indikator Indeks Inovasi Daerah diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Indeks Inovasi Daerah}}{\text{Target Indeks Inovasi Daerah}} \times 100\%$$
$$= \frac{55}{47,01} \times 100\%$$

= 85,47%

Pada tahun 2024, Kabupaten Batu Bara menetapkan target Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 55, namun realisasi capaian yang diperoleh hanya mencapai 47,01. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja hanya mencapai 85,38% dari target yang diharapkan. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, yakni 53,17 pada tahun 2023, terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam kualitas inovasi yang dihasilkan. Capaian tahun 2023 tercatat sebesar 118,15%, yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Kabupaten Batu Bara berhasil melampaui target yang ditetapkan. Oleh karena itu, meskipun capaian 47,01 pada tahun 2024 masih menunjukkan angka yang cukup baik, namun penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi perhatian penting dalam upaya mempertahankan momentum inovasi daerah.

Provinsi Sumut pada tahun 2024 mencatatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 59,93, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batu Bara. Capaian ini tidak hanya lebih baik dari Batu Bara, tetapi juga mendekati target akhir RPJMD 2024 yang sebesar 60. Pencapaian provinsi ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara berhasil mendorong penerapan inovasi yang lebih luas dan lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan capaian yang mendekati target, Provinsi Sumut menjadi contoh yang baik dalam hal pengelolaan inovasi daerah yang dapat dicontoh oleh kabupaten atau kota lain.

Di sisi lain, Kota Tanjung Balai dan Kota Tebing Tinggi menunjukkan capaian yang cukup rendah pada Indeks Inovasi Daerah di tahun 2024. Kota Tanjung Balai hanya mencatatkan 34,28, sementara Kota Tebing Tinggi mencatatkan angka yang sangat rendah, yakni 16,44. Angka-angka ini jelas menunjukkan bahwa kedua kota ini masih jauh tertinggal dalam hal pengembangan dan implementasi inovasi daerah. Dengan capaian yang jauh di

bawah standar yang diharapkan, kedua kota ini harus lebih serius dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendorong inovasi di tingkat daerah.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Batu Bara, yang mencatatkan 47,01, kedua kota tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Batu Bara belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024, pencapaiannya masih lebih baik dibandingkan dengan banyak daerah lain, terutama Kota Tanjung Balai dan Kota Tebing Tinggi. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, posisi Kabupaten Batu Bara relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya yang tertinggal jauh.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Batu Bara belum berhasil mencapai target 55 pada tahun 2024, capaian 47,01 masih menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan banyak daerah lain. Namun, untuk mencapai target akhir RPJMD 2024 yang sebesar 60, dan agar bisa bersaing dengan Provinsi Sumut yang mencatatkan 59,93, Kabupaten Batu Bara perlu merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan jumlah dan kualitas inovasi yang dihasilkan. Ke depannya, peningkatan kualitas inovasi serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah akan menjadi kunci utama dalam mencapai target-target yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Pengukurannya indeks inovasi daerah mengacu pada 36 indikator. Jumlah ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 16 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 20 indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung

hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.

Pada tahun 2024, jumlah inovasi yang memiliki bobot kematangan tinggi hanya 9 (9) inovasi yang diikutsertakan dalam Penghargaan Pemerintah Terinovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2024 karena memiliki bobot kematangan Inovasi yang tinggi dan mendongkrak kenaikan nilai IID Kabupaten Batu Bara. Berikut jenis inovasi dan manfaatnya:

Tabel. 3.13.
Jenis-Jenis Inovasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH	INOVASI	MANFAAT
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Rumah Batik Batu Bara Sebagai Wadah Pengembangan Wastra	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Menjadikan tempat para pelaku wastra untuk melakukan konsultasi agar dapat menciptakan produk yang lebih bervariasi; ♦ Meningkatkan kualitas wastra yang ada di Kabupaten Batu Bara; ♦ Meningkatkan keahlian atau skill para pelaku wastra yang ada di Kabupaten Batu Bara; ♦ Membantu mempromosikan wastra Batu Bara sehingga dapat bersaing pada tingkat Nasional, hingga internasional; ♦ Agar dapat menembus pangsa pasar yang lebih luas sehingga dapat memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi.
Sekretariat Daerah	SI SUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)	Untuk mengukur dan mengetahui tingkat kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan baik segi mutu dan kecepatan dan ketepatan waktu yang di berikan dalam pelayanan

Dinas Pertanian dan Perkebunan	Sistem Informasi Lahan Pangan Berkelanjutan (SI-LP2B)	Mewujudkan kesatuan sistem peta, maka lahan sawah, saluran irigasi tersier, persebaran mesin dan jalan usaha tani dapat dipetakan dan rencana kegiatan disusun berdasarkan Informasi Geospasial dan tematik yang dapat dipertanggung jawabkan.
Dinas Pendidikan	Digitalisasi pengelolaan dana bos melalui aplikasi simpel bos dinas pendidikan kabupaten Batu bara	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Mendapatkan informasi dengan mudah mengenai dana BOS; ✦ Membantu Laporan Keuangan sesuai Juknis BOS; ✦ Dapat Memenuhi Kebutuhan yang bersangkutan; ✦ Pengelolaan menjadi Lebih Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Memperkecil Penyalahgunaan atau Penyelewengan Dana BOS
Kecamatan Sei Suka	FRUIT ENZYME	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Melancarkan fungsi pencernaan; ✦ Meningkatkan fungsi penyerapan nutrisi; ✦ Meningkatkan imunitas tubuh; ✦ menangkal radikal bebas; ✦ membantu membersihkan darah dan proses peremajaan sel sel kulit.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIBADA (Sistem Basis Data Inovasi Kabupaten Batu Bara)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sebagai portal inovasi Kabupaten Batu Bara, mengingat perkembangan dunia digital yang semakin cepat maka perlu dilakukan suatu perubahan yang inovatif dalam menjangkau Inovasi- inovasi yang ada di perangkat daerah;
		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sebagai perpustakaan inovasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat untuk referensi dalam mengembangkan inovasi; ♦ Sebagai data base inovasi daerah yang menyimpan hasil- hasil inovasi baik Yang ada di perangkat desa, kelurahan, Kecamatan hingga Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Batu Bara.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dukcapil Hadir Di Desa	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Manfaat bagi Provinsi Sumatera Utara adalah memudahkandalam pemanfaatan data untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan demokrasi, penganggaran, dan pencegahan kriminal di tingkat provinsi; ♦ Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara adalah data kependudukan yang up to date dan terintegrasi; ♦ Manfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk; ♦ Manfaat bagi masyarakat adalah kemudahan mendapatkan layanan langsung terhadap dokumen kependudukan tanpa tersita waktu, tenaga dan biaya.

Dinas Kesehatan-RSUD	GEMA PENTING (Gerakan Bersama Penurunan Stunting)	Mencegah gagal tumbuh pada balita , terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Agar tidak terjadi kurang asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang serta pola asuh yang tidak memadai.
	RSUD-POIN DATUK RAJO	<p>Manfaat yang di peroleh bagi RS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kinerja pelayanan RS yang lebih efektif dan efisien; ❖ Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi di RS; ❖ Meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan <p>Meningkatkan kompetensi SDM RS BAGI RS</p> <p>Manfaat Bagi Pasien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memudahkan pasien dalam pendaftaran; ❖ Tidak perlu antri lama ❖ Memudahkan masyarakat mendapatkan Informasi tentang pelayanan RS seperti jadwal dokter Spesialis dan ketersediaan tempat tidur; ❖ Meningkatkan kepuasan pasien. <p>Manfaat bagi Rumah Sakit</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melatih kemampuan kepemimpinan yang mampu menghasilkan inovasi perubahan yang dapat memajukan RS; ❖ Menjadi sebuah kepuasan dalam memimpin RS <p>Manfaat bagi Stakeholder Dapat merasakan manfaat dari aksi perubahan tersebut</p>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SABER KIA (Sapu Bersih Kartu Identitas Anak)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Tercapainya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak bagi seluruh anak di Kabupaten Batu Bara; ♦ Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan terhadap peristiwa kelahiran yang terintegrasi langsung dengan sekolah-sekolah; ♦ Maksimalnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Batu Bara masih menghadapi beberapa hambatan yang mempengaruhi laju dan kualitas inovasi yang dihasilkan. Berdasarkan data yang ada, terdapat dua faktor utama yang menghambat pengembangan dan pencapaian inovasi daerah yang optimal, yaitu:

1. Belum Maksimalnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Menciptakan dan Mengembangkan Inovasi Sesuai dengan Tupoksi Masing-masing

Salah satu faktor penghambat yang cukup signifikan dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Batu Bara adalah belum maksimalnya partisipasi perangkat daerah dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi. Setiap perangkat daerah diharapkan untuk dapat mengembangkan inovasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Namun, kenyataannya banyak perangkat daerah yang belum sepenuhnya aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan inovasi yang memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik, peningkatan daya saing, atau pemberdayaan masyarakat.

Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya inovasi di tingkat pemerintah daerah. Banyak perangkat daerah yang terfokus pada pekerjaan rutin dan administratif tanpa memberi perhatian lebih pada penciptaan inovasi yang bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi hambatan besar. Inovasi yang bersifat lintas sektor sering kali terhambat oleh terbatasnya komunikasi dan kolaborasi antar instansi yang seharusnya saling mendukung dalam pengembangan solusi yang inovatif. Sebagai contoh, pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang efektif bisa lebih optimal jika ada sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas

Kesehatan atau Dinas Pendidikan, namun kenyataannya sering kali pengembangan tersebut tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), Keterbatasan Dana, dan Sarana Prasarana yang Belum Optimal

Faktor lain yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Batu Bara adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk merancang dan mengimplementasikan inovasi. Pengembangan inovasi membutuhkan SDM yang kreatif, memiliki kemampuan teknis, dan mampu mengelola berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, SDM di tingkat daerah sering kali belum memiliki pelatihan yang memadai, atau kurang terpapar dengan pengetahuan terbaru yang dibutuhkan dalam merancang kebijakan dan program inovatif. Kurangnya pelatihan khusus terkait inovasi atau pengelolaan teknologi baru dapat membatasi kemampuan perangkat daerah untuk menciptakan solusi yang efisien dan efektif.

Selain itu, keterbatasan dana menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Inovasi daerah sering kali memerlukan pendanaan yang tidak sedikit untuk pengembangan ide, implementasi proyek, dan evaluasi hasilnya. Anggaran yang terbatas sering kali memaksa pemerintah daerah untuk fokus pada program yang bersifat mendesak dan rutin, sementara inovasi yang memerlukan sumber daya lebih besar terabaikan. Keterbatasan dana ini sering kali menyebabkan terbatasnya ruang untuk eksperimen dan pengembangan solusi baru yang lebih efisien.

Tak kalah pentingnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inovasi. Misalnya, pengembangan teknologi digital dalam pelayanan publik memerlukan infrastruktur yang memadai, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, maupun jaringan komunikasi. Namun, di beberapa daerah di Kabupaten Batu Bara, sarana dan prasarana yang ada masih terbatas dan belum memadai untuk mendukung pelaksanaan inovasi yang lebih luas. Tanpa adanya dukungan infrastruktur yang kuat, maka pelaksanaan inovasi akan terhambat, meskipun terdapat ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dua faktor penghambat utama yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu belum maksimalnya partisipasi perangkat daerah dalam

menciptakan inovasi sesuai dengan tupoksi dan keterbatasan sumber daya manusia, dana, serta sarana prasarana yang belum optimal, berikut adalah beberapa solusi alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut:

1. **Sosialisasi dan Bimtek kepada Penanggung Jawab/PIC Inovasi:** Menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya yang fokus pada pengembangan ide inovasi dan penerapannya dalam sektor masing-masing, baik itu pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, atau sektor lainnya. Bimtek ini dapat diselenggarakan secara rutin dengan melibatkan pakar di bidangnya agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya inovasi.
2. **Penyediaan Anggaran yang Cukup untuk Pengembangan Inovasi:** Pemda perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan inovasi. Dana yang cukup memungkinkan perangkat daerah untuk merancang dan mengimplementasikan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan perubahan positif di masyarakat.
3. **Meningkatkan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Berkala:** Mengadakan **coaching clinic inovasi** yang mengedukasi para pegawai pemerintah di tingkat daerah tentang cara-cara merancang, mengimplementasikan, dan mengukur keberhasilan inovasi. Coaching clinic ini dapat difokuskan pada praktik terbaik dalam mengelola perubahan, inovasi berbasis teknologi, dan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan cara yang lebih efisien.
4. **Optimalisasi Anggaran:** Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu memprioritaskan anggaran untuk pengembangan inovasi daerah, termasuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi, serta membiayai program-program yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana pendukung inovasi, seperti jaringan internet yang lebih stabil atau perangkat keras yang lebih canggih.
5. **Lomba Inovasi Daerah:** Mengadakan kompetisi tahunan yang mengundang partisipasi aktif dari semua perangkat daerah untuk mengembangkan solusi inovatif dalam sektor-sektor tertentu, seperti pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, pendidikan, atau sektor lain yang menjadi prioritas. Perlombaan ini dapat menjadi ajang untuk menilai kualitas inovasi yang ada, serta memberikan pengakuan terhadap perangkat daerah yang memiliki prestasi

terbaik dalam menerapkan inovasi.

6. **Membentuk Tim Khusus Inovasi:** Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk memfasilitasi kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengembangkan dan melaksanakan inovasi. Tim ini akan berperan dalam menghubungkan berbagai sektor yang berbeda untuk menciptakan solusi yang lebih terintegrasi dan bermanfaat.
7. **Penyusunan Agenda Kolaboratif:** Menyusun agenda bersama yang melibatkan berbagai perangkat daerah untuk merancang dan menjalankan inovasi, dengan fokus pada pengembangan pelayanan publik atau peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur dari seberapa optimal penggunaan anggaran, tenaga kerja, waktu, dan sarana prasarana dalam mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan pencapaian target-target lainnya. Berikut disajikan Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	55,0 (Inovatif)	47,01 (Inovatif)	85,47	3.842.799.822	3.836.027.001	99,82	0,84

Efisiensi Kinerja: Capaian kinerja pada Indeks Inovasi Daerah sebesar 85,47% dari target yang ditetapkan menunjukkan pencapaian yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100%. Dalam konteks inovasi daerah, pencapaian kinerja ini menggambarkan progres yang signifikan meskipun ada beberapa area yang perlu lebih diperhatikan untuk meningkatkan skor di tahun berikutnya.

Efisiensi Penggunaan Anggaran: Penggunaan anggaran yang sangat efisien (99,82%) menunjukkan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara maksimal untuk mendukung program inovasi daerah. Pemerintah daerah berhasil mengelola dana dengan sangat baik, hampir seluruh anggaran yang tersedia digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja nyata dari sasaran Meningkatnya Inovasi Daerah sebesar

85,47% dengan predikat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks				80	68,91	86,14%

Capaian Kinerja Nyata Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2024 sebesar 86,14% didapat dari Target Kinerja sebesar 80 poin Realisasi Kinerja sebesar 68,91 poin. Capaian Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini menunjukkan progres yang signifikan dalam hal pelayanan infrastruktur, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan yang lebih optimal. Capaian ini jika dibandingkan dengan target Akhir RPD (Rencana Pembangunan Daerah) sebesar 85 masih terdapat gap yang sangat jauh.

Capaian tahun 2024 menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Perbedaan sebesar 11,09 poin antara target dan realisasi ini menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui sektor mana yang perlu ditingkatkan. Capaian Realisasi Kinerja (68,91) menunjukkan adanya keterlambatan dalam mencapai target yang diinginkan. Target Akhir RPD (85) menggambarkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.

Namun, pencapaian yang lebih rendah ini tidak sepenuhnya buruk, karena ini mencerminkan adanya potensi untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di sektor-sektor yang masih kurang optimal, seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah indikator baru yang diterapkan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang diberikan. Karena indikator ini baru diterapkan pada tahun 2024, maka hasil yang tercatat tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun sebelumnya. Namun, penerapan indikator ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kualitas layanan dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di

masa depan.

Kebijakan Strategis dan Rencana Aksi untuk Pencapaian Target berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, Pemerintah Kabupaten Batu Bara merumuskan kebijakan strategis untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor. Kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk mencapai target RPD yang lebih tinggi, serta menciptakan perbaikan nyata dalam pelayanan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur

Dengan capaian yang lebih rendah dari target, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor-sektor yang kurang optimal dapat diperbaiki di tahun mendatang, misalnya:

a. Peningkatan Infrastruktur Jalan:

- Kebijakan: Mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan, terutama jalan utama yang menghubungkan pusat pemerintahan dan kawasan pedesaan.
- Rencana Aksi: Pembangunan jalan baru di daerah yang belum tersentuh infrastruktur. Rehabilitasi jalan rusak di daerah seperti Laut Tador dan Nibung Hangus.

b. Penyediaan Air Bersih

- Kebijakan: Memperluas jaringan distribusi air bersih ke kecamatan yang belum terjangkau, dengan fokus pada daerah yang memiliki akses terbatas seperti Talawi dan Air Putih.
- Rencana Aksi: Pembangunan jaringan pipa baru dan peningkatan kapasitas pengolahan air di 7 kecamatan dengan prioritas utama di daerah pesisir dan pedalaman.

c. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan

- Kebijakan: Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan posyandu, dengan distribusi yang lebih merata.
- Rencana Aksi: Membangun puskesmas baru di kecamatan yang belum memiliki akses pelayanan kesehatan yang memadai. Peningkatan fasilitas di rumah sakit yang sudah ada dengan penyediaan peralatan medis yang

lebih modern.

d. Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan

- Kebijakan: Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- Rencana Aksi: Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan memperbaiki fasilitas pendidikan di 15 kecamatan. Pembangunan sekolah dasar baru dan SMA baru di daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut.

2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah indikator baru yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kebijakan yang diterapkan akan berfokus pada peningkatan pelayanan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

- Kebijakan: Meningkatkan interaksi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan masyarakat melalui forum-forum diskusi dan musyawarah desa.
- Rencana Aksi: Menyusun program-program prioritas berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan.
- Skema Pembiayaan: Penggunaan dana insentif daerah untuk pengembangan program kepuasan layanan, termasuk sistem pemantauan berbasis teknologi informasi untuk menilai kinerja secara real-time.

Capaian Layanan Kesehatan dan Strategi Perbaikan akan difokuskan pada:

1. Fasilitas Kesehatan yang Tersedia:

- Rumah Sakit: 3 rumah sakit utama, dengan 9 unit tersebar di seluruh kecamatan. Pemerintah akan memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas rumah sakit, serta menambah unit pelayanan di daerah yang membutuhkan.
- Puskesmas dan Posyandu: 15 Puskesmas dan 529 Posyandu akan mendapatkan dana khusus untuk perbaikan fasilitas dan pelatihan tenaga medis.

2. Kebijakan Perbaikan:

- Peningkatan kapasitas pelayanan dengan menambah peralatan medis dan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan intensif.
- Pembangunan puskesmas baru di 5 kecamatan dengan prioritas di daerah Laut Tador dan Nibung Hangus yang memiliki fasilitas terbatas.

Capaian Pendidikan dan Skema Kebijakan Pendidikan:

1. Jumlah Sekolah dan Fasilitas:

- Taman Kanak-Kanak (TK): 141 TK, yang memberikan pendidikan dini di seluruh kecamatan.
- Sekolah Dasar (SD): 245 SD yang tersebar, akan diprioritaskan untuk peningkatan fasilitas dan kualitas pengajaran.
- Sekolah Menengah (SMP, SMA, SMK): Dengan banyaknya sekolah menengah yang tersebar di berbagai kecamatan, pengembangan fasilitas baru dan program beasiswa akan diprioritaskan.

2. Kebijakan Pendidikan:

- Pendidikan Inklusif: Meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dan di daerah terpencil.
- Pelatihan Guru: Memberikan pelatihan profesional kepada guru di seluruh Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
- Peningkatan Infrastruktur Sekolah: Pembangunan sekolah dasar baru dan perbaikan fasilitas sekolah yang sudah ada.

Adapun kendala yang dihadapi sehingga capaian kinerja sasaran ini rendah adalah:

1. Ketimpangan Akses Infrastruktur Kesehatan:

- Solusi: Perencanaan pembangunan Puskesmas baru.

2. Keterbatasan Akses Air Bersih:

- Solusi: Program perluasan jaringan air bersih di 7 kecamatan dengan penyediaan dana dari APBD dan kolaborasi dengan perusahaan penyedia air.

3. Kondisi Jalan yang Rusak:

- Solusi: Prioritas perbaikan jalan yang menghubungkan daerah dengan akses terbatas dan perbaikan jalan yang rusak di 5 kecamatan utama.

Dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan strategis dan rencana aksi yang terukur, Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki langkah-langkah konkret

untuk mencapai target kinerja yang lebih baik pada tahun mendatang. Kebijakan yang meliputi peningkatan infrastruktur, kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam pembangunan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur akan menjadi indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, pencapaian indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai keberhasilan berbagai program yang telah dilaksanakan.

Capaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur sebesar 86,14% dengan predikat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	80%	80,82%	101,3	81,48 (60)	59,48	73% (99,13)

Panjang jalan dalam kondisi mantap

Perhitungan pencapaian kinerja nyata Panjang jalan dalam kondisi mantap diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Target Panjang Jalan Kabupaten Batu bara}} \times 100 \\
 &= \frac{81,48}{59,48} \times 100\% \\
 &= 73\%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 73%, berasal dari perhitungan target penyelesaian panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 81,48% dan realisasi sebesar 59,48%.

Penyebab Rendahnya Realisasi Persentase Jalan Mantap

Rendahnya persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap yang tercatat pada realisasi (59,48%) dibandingkan dengan target (81,48%) disebabkan oleh adanya perubahan metode pengukuran yang digunakan untuk

menetapkan target kinerja dan untuk mengukur kondisi jalan secara nyata. Pada saat target kinerja ditetapkan, pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode korelasi antara International Roughness Index (IRI) dan Road Condition Index (RCI), yang merupakan metode lama. Berdasarkan pengukuran dengan metode tersebut, target kinerja untuk panjang jalan dalam kondisi mantap ditetapkan pada angka 81,48%.

Namun, seiring dengan diterbitkannya edaran dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 22/SE/Db/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Manual Aplikasi Sistem Program Pemeliharaan Jalan Provinsi/Kabupaten (PKRMS), terjadi perubahan signifikan dalam metode pengukuran kondisi jalan. Berdasarkan edaran tersebut, metode pengukuran yang digunakan untuk evaluasi realisasi kinerja adalah menggunakan Sistem PKRMS.

Metode PKRMS memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai kondisi jalan, yang menyebabkan hasil yang lebih konservatif dibandingkan dengan metode sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun realisasi pengukuran kondisi jalan menunjukkan angka 59,48%, jika target kinerja yang ditetapkan sebelumnya menggunakan metode lama (korelasi IRI dan RCI) diadaptasi ke dalam sistem PKRMS yang baru, target kinerja yang sesungguhnya akan setara dengan angka sekitar 60%.

Dengan demikian, perbedaan angka ini disebabkan oleh perubahan metode pengukuran yang membawa perubahan dalam cara evaluasi kondisi jalan, yang mempengaruhi hasil yang tercatat dalam laporan realisasi. Sehingga, meskipun terlihat adanya penurunan dalam pencapaian target, hal tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam pengukuran, bukan penurunan kualitas jalan yang sebenarnya.

Maka jika di sesuaikan dengan metode PKRMS capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,13%, berasal dari perhitungan target penyelesaian panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 60% dan realisasi sebesar 59,48%.

Berdasarkan hasil perhitungan dari bidang Bina Marga diperoleh data dasar prasarana jalan di Kabupaten Batu Bara yang mana bahwa panjang jalan mantap tahun 2024 adalah 380,131 Km atau sebesar 59,48% dari 639,079 Km panjang jalan di Kabupaten Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu

Bara Nomor 227/PUPR/2017.

Realisasi persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,35% dari tahun sebelumnya yang mana kondisi jalan mantap pada tahun 2023 adalah 57,13%. Kondisi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan persentase keseluruhan jalan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Karena menurut database pada data.pu.go.id persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 adalah sebesar 51,48% dari 13.571,9 Km jumlah panjang jalan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan secara nasional persentase jalan mantap adalah 42% dari 480.000 Km jumlah panjang jalan kabupaten di Indonesia.

berikut tabel kondisi jalan mantap di Kabupaten Batu Bara selama periode tahun 2023-2024.

Tabel 3.14.
Kondisi jalan mantap Kabupaten Batu Bara periode 2023-2024

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)	
		2023	2024
1	Baik	228,081	255,313
2	Sedang	137,004	124,818
Jumlah		365,085	380,131

Dari data diatas, kondisi panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2024 meningkat sebanyak 2,35%. Realisasi kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2024 belum dapat diperbandingkan dengan target RPD 2024-2026. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan metode pengukuran pada penentuan target RPD dengan metode pengukuran realisasi kinerja sekarang ini. Target RPD 2024-2026 yang sebesar 85% merupakan target saat dimana kondisi jalan Kabupaten Batu Bara akan masih diukur dengan metode korelasi antara IRI (*International Roughness Index*) dan RCI (*Road Condition Index*).

Adapun kegagalan pencapaian kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah dikarenakan terdapatnya pekerjaan fisik jalan yang statusnya belum ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Sehingga *output* pekerjaan jalan tersebut belum dapat diakumulasikan kedalam perhitungan/pengukuran realisasi

kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

Dan solusi untuk meningkatkan kinerja tersebut dimasa mendatang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melengkapi database infrastruktur pelengkap jalan seperti trotoar, drainase, LPJU, termasuk jembatan;
2. Mengupdate kondisi jalan setiap tahunnya;
3. Memprioritaskan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan yang termasuk dalam skala prioritas pembangunan yang menunjang pencapaian target tujuan dan sasaran;
4. Menyusun penetapan status jalan sesuai kondisi terkini.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur dari seberapa optimal penggunaan anggaran, tenaga kerja, waktu, dan sarana prasarana dalam mencapai tujuan pembangunan dalam Meningkatkan Kualitas Jaringan Jalan dan pencapaian target-target lainnya. Berikut disajikan Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	81,48 /60	59,48	99,13	62.380.799 .000	61.169.262.000	98,06	0,98

Pencapaian kinerja sedikit di bawah target (selisih 0,52%) menunjukkan bahwa meskipun hampir mencapai tujuan, ada sedikit penurunan kinerja yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Penggunaan anggaran yang lebih rendah (Rp 1,211,537,000 lebih sedikit) bisa menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan dana. Ini bisa berarti bahwa pelaksanaan program berjalan lebih efisien dari yang direncanakan, namun ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi penggunaan dana. Efisiensi penggunaan sumber daya masih tergolong cukup baik, meskipun target kinerja tidak tercapai sepenuhnya, karena penghematan anggaran yang terjadi.

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan sebesar 99,13% atau dengan predikat sangat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Nilai	52,5 Triliun	52.433.590.714.397	99,87	54 Triliun	52.884.243.610.119	97,93

Salah satu tolok ukur kemakmuran dari suatu daerah dapat dilihat seberapa besar jumlah investasi/investor di daerah tersebut. Semakin banyak investor, semakin tinggi nilai investasi, tentunya akan mendorong daerah bersangkutan menjadi semakin makmur dan sejahtera.

Investasi memiliki hubungan erat dengan PDB suatu daerah. Jika investasi terhadap suatu daerah turun, maka PDB-nya akan turun juga. Sebaliknya, jika investasi mengalir deras, maka PDB akan memunculkan hasil yang gemilang.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara berupaya melakukan peningkatan investasi di Kabupaten Batu Bara. Sehingga menjadi target RPD 2019-2024 dengan indikator sebagai berikut:

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perhitungan capaian indikator Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Realisasi Nilai Investasi}}{\text{Target Nilai Investasi}} \times 100 \\
 &= \frac{54.000.000.000.000}{52.884.243.610.119} \times 100\% \\
 &= 97,93\%
 \end{aligned}$$

Pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024 terdapat target peningkatan nilai investasi secara akumulatif sebesar Rp. 54.000.000.000,00 sedangkan realisasi kinerja nyata nilai inventasi yang tercapai tidak memenuhi target yang telah ditentukan, pencapaian hanya sebesar Rp. 52.433.590.714.397,00, sehingga capaian kinerja sebesar 99,87%. Capaian 99,87% dari target yang telah ditetapkan, dengan selisih investasi sebesar Rp 1,12 Triliun, menunjukkan bahwa meskipun tidak

sepenuhnya mencapai target, hasil yang dicapai sudah sangat baik dan mendekati target yang diinginkan.

Capaian investasi pada tahun 2024 mengalami **pertumbuhan 0,86%** dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun ada kenaikan, angka ini masih terbilang kecil, yang menandakan adanya tantangan dalam meningkatkan investasi secara signifikan.

Pencapaian pada tahun 2024 sudah mencapai **93,52%** dari target akhir RPD 2026. Ini menunjukkan bahwa pencapaian investasi di tahun 2024 sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai target yang lebih besar pada tahun 2026.

Keberhasilan pencapaian Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN PMA) disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian tersebut:

1. **Potensi Sumber Daya Alam (SDA)** yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan batu bara, yang terus menjadi daya tarik bagi investor.
2. **Peningkatan Infrastruktur** yang mempermudah distribusi barang dan jasa, yang meningkatkan efisiensi operasional sektor industri di daerah tersebut.
3. **Kebijakan Pro-Investasi** dari pemerintah daerah yang memberikan insentif serta kemudahan dalam proses perizinan dan pengelolaan usaha.
4. **Kondisi Sosial dan Keamanan** yang stabil serta ketersediaan tenaga kerja yang mendukung operasional perusahaan.
5. **Stabilitas Politik** yang memberikan kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi dalam jangka panjang.

Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa tren positif ini dapat terus dipertahankan, dengan memperhatikan dinamika global, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Batu Bara.

Berikut adalah faktor penghambat yang dihadapi dan solusi alternatif dalam meningkatkan pencapaian kinerja persentase Nilai Investasi PMDN dan PMA:

1. **Belum Optimalnya Perusahaan PMDN dan PMA dalam Menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)**
 - Ketidakteraturan Pelaporan LKPM: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah salah satu instrumen penting untuk mencatat dan

memonitor perkembangan investasi, baik PMDN maupun PMA. Jika perusahaan tidak melaporkan kegiatan investasi secara tepat waktu dan akurat, maka realisasi investasi yang sebenarnya tidak akan tercatat dengan benar dalam sistem, menyebabkan data investasi menjadi tidak lengkap atau tidak mencerminkan kondisi riil.

- **Dampaknya terhadap Target:** Ketidakmampuan atau kelambatan dalam melaporkan LKPM akan mengakibatkan rendahnya persentase pencatatan investasi yang tercatat. Padahal, jika LKPM dilaporkan dengan baik, data yang lebih akurat dapat memperlihatkan pencapaian investasi yang lebih besar dari yang terlihat pada laporan resmi, memungkinkan penghitungan capaian investasi menjadi lebih realistis dan memenuhi target.

- **Solusi yang akan diterapkan:**

Pemerintah daerah perlu memperkuat pelatihan bagi perusahaan mengenai pentingnya LKPM dan cara penyampaiannya. Menyediakan sistem yang lebih mudah diakses dan efisien bagi perusahaan untuk melaporkan LKPM. Menegakkan aturan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan investasi mereka secara tepat waktu.

2. **Tidak Ada Penambahan Penanaman Modal (PMDN/PMA) dengan Skala Besar atau Investor Baru Tahun 2024 di Kabupaten Batu Bara**

- **Tidak Ada Investor Baru:** Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target investasi adalah ketidakmampuan menarik investor baru dengan skala besar. Pada tahun 2024 tidak ada penanaman modal yang signifikan, baik dari perusahaan domestik (PMDN) maupun asing (PMA), maka target investasi akan sulit tercapai.

- **Kurangnya Daya Tarik Kabupaten Batu Bara:** Beberapa faktor yang dapat menghalangi masuknya investor besar baru adalah ketidakpastian dalam kebijakan daerah, kurangnya promosi daerah sebagai lokasi investasi, dan kurangnya sektor yang menarik bagi investor baru.

- **Solusi yang diterapkan:**

- Pemerintah daerah perlu melakukan promosi yang lebih gencar terhadap sektor-sektor investasi baru seperti industri pengolahan, energi terbarukan, dan pariwisata.
- Penyediaan insentif atau fasilitas yang lebih menarik bagi investor

baru, seperti kemudahan izin, pengurangan pajak, atau fasilitas kawasan industri yang mendukung.

- Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk menarik investasi asing.

3. Belum Terbukanya Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT)

- **Fragmentasi Lahan:** Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri, seperti KIKT, memiliki banyak pemilik lahan yang terpisah-pisah. Ketika lahan tersebut dimiliki oleh banyak individu atau kelompok, pengambilalihan atau pembebasan lahan menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Proses negosiasi dengan banyak pemilik, apalagi jika ada banyak pihak yang terlibat, bisa menyebabkan keterlambatan dalam pembukaan kawasan industri.
- **Perbedaan Harga:** Ketika setiap pemilik lahan memiliki harga yang berbeda-beda untuk tanah mereka, ini menciptakan ketidakharmonisan dalam negosiasi. Masing-masing pemilik mungkin memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam hal harga jual, yang bisa mengarah pada kebuntuan atau bahkan pembatalan transaksi. Harga yang terlalu tinggi dari beberapa pemilik lahan juga dapat memperburuk keadaan karena investor mungkin merasa harga tanah menjadi tidak kompetitif.
- Dampaknya terhadap Target Investasi:
 - **Lambatnya Proses Pengadaan Tanah:** Salah satu aspek penting dalam pembangunan kawasan industri adalah pengadaan lahan yang cepat dan efisien. Jika proses ini terhambat karena masalah harga dan kepemilikan lahan yang terfragmentasi, maka rencana untuk membuka kawasan industri bisa tertunda, bahkan dibatalkan.
 - **Biaya Pembebasan Lahan yang Tinggi:** Ketidakpastian harga tanah dan perbedaan penilaian antara pemilik lahan dapat menyebabkan biaya pembebasan lahan menjadi lebih tinggi daripada yang dianggarkan, yang pada gilirannya bisa mengurangi daya tarik kawasan industri bagi investor. Hal ini berpotensi membuat investor berpikir ulang sebelum menanamkan modalnya.

Analisis solusi yang dapat diterapkan:

- **Penyusunan Skema Pembebasan Lahan yang Jelas:** Pemerintah daerah

perlu menyusun dan menetapkan skema pembebasan lahan yang jelas dan transparan. Ini bisa mencakup standarisasi harga tanah berdasarkan penilaian yang objektif dari pihak yang independen, serta mekanisme untuk menangani ketidaksepakatan antar pemilik lahan.

- **Penyuluhan dan Edukasi kepada Pemilik Lahan:** Menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat pemilik lahan tentang manfaat jangka panjang dari pembukaan kawasan industri, serta dampaknya bagi ekonomi daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bisa membantu mengurangi resistensi masyarakat terhadap pelepasan lahan.
- **Mediasi oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga:** Jika terjadi perbedaan harga yang tajam antara pemilik lahan, penting bagi pemerintah untuk bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi negosiasi antara pemilik lahan dan investor. Pihak ketiga yang netral, seperti lembaga penilai properti, bisa dilibatkan untuk menilai harga tanah secara objektif.
- **Menggunakan Pendekatan Pembebasan Lahan Bertahap:** Pemerintah daerah bisa mempertimbangkan untuk melakukan pembebasan lahan secara bertahap, dengan memprioritaskan lahan yang sudah lebih mudah untuk dibebaskan. Hal ini akan meminimalkan hambatan dalam membuka kawasan industri secara keseluruhan, meskipun prosesnya lebih lama.
- **Penyediaan Insentif untuk Pemilik Lahan:** Memberikan insentif kepada pemilik lahan agar mereka lebih tertarik untuk menjual tanah mereka dengan harga yang lebih wajar, melepaskan tanahnya untuk pengembangan kawasan industri.

4. **Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Investasi dan Pelayanan Perizinan**

- **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Investasi:** Salah satu faktor yang menghambat lancarnya proses investasi adalah ketidakmampuan sistem pelayanan investasi daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor. Hal ini termasuk dalam hal proses perizinan, aksesibilitas fasilitas industri, serta prosedur administratif yang masih rumit.
- **Birokrasi yang Lambat:** Proses perizinan yang berbelit dan tidak efisien dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Batu Bara. Jika sarana dan prasarana untuk mendukung

pelayanan investasi tidak memadai atau belum terintegrasi dengan baik, maka hal ini akan menghambat tercapainya target investasi.

- Dampaknya terhadap Target: Pelayanan investasi yang kurang optimal berakibat pada penundaan atau pembatalan investasi, karena investor merasa tidak mendapatkan kemudahan dan kepastian dalam memulai kegiatan bisnis mereka. Selain itu, kualitas pelayanan perizinan yang buruk akan mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim bisnis.
- Solusi yang dapat diterapkan:
 - Pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara perlu mempercepat digitalisasi proses perizinan dan investasi dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) yang lebih efisien dan transparan.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di sektor pelayanan investasi dan perizinan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan investor.
 - Menyederhanakan proses perizinan dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan menciptakan one-stop service yang lebih mudah diakses oleh investor.

Skema Kebijakan untuk Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Batu Bara

Untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Batu Bara, perlu adanya kebijakan yang terintegrasi, melibatkan berbagai perangkat daerah, dan memperhatikan faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan investasi. Skema kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik investor, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan investasi yang maksimal. Berikut adalah skema kebijakan yang melibatkan beberapa perangkat daerah:

1. Penyederhanaan dan Peningkatan Kualitas Proses Perizinan dan Pelayanan Investasi

Pihak Terkait: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Ketenakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan.

Langkah-Langkah:

- a. **Peningkatan Sistem Perizinan Elektronik (OSS):** Meningkatkan

kemampuan sistem perizinan elektronik dengan mempercepat waktu proses, transparansi, dan kemudahan akses bagi investor melalui **Online Single Submission (OSS)**. DPMPTSP bertanggung jawab untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan efisien.

- b. **One-Stop Service (OSS)**: Membuat **sistem layanan satu pintu** di mana semua perizinan dan layanan terkait investasi dapat diakses melalui satu platform, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.
- c. **Penyusunan Standar Waktu dan Biaya**: Menyusun standar waktu dan biaya yang jelas untuk proses perizinan dan pelayanan investasi. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan investor.
- d. **Penyederhanaan Perizinan Usaha**: Menyederhanakan proses perizinan usaha, khususnya untuk UMKM dan investor skala kecil dan menengah, sehingga mereka dapat lebih mudah memulai usaha di Batu Bara.

Tujuan: Menciptakan kemudahan akses dan transparansi dalam perizinan untuk menarik investor baru dan mempercepat proses pendirian usaha.

2. **Penyediaan Infrastruktur Pendukung yang Memadai**

Pihak Terkait: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Pengelola Kawasan Industri, BPN.

Langkah-Langkah:

- a. **Pengembangan Infrastruktur Dasar**: pengembangan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung investasi, seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
- b. **Pengembangan Kawasan Industri**: Mempercepat pengembangan dan pembukaan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT), dengan memastikan tersedianya lahan yang siap pakai, serta infrastruktur yang mendukung seperti akses jalan raya, pelabuhan, dan energi.
- c. **Pembangunan Infrastruktur Transportasi**: Memastikan bahwa akses transportasi ke dan dari kawasan industri, pelabuhan, dan bandara memadai, sehingga dapat meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi barang bagi investor.
- d. **Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat**: Menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih besar, terutama untuk pengembangan pelabuhan.

Tujuan: Menciptakan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri dan investasi untuk meningkatkan daya saing kawasan investasi Batu Bara.

3. **Penyusunan Kebijakan Insentif dan Fasilitas Investasi**

Pihak Terkait: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan.

Langkah-Langkah:

- a. **Pemberian Insentif Pajak:** Menyusun kebijakan insentif pajak yang menarik bagi investor, seperti pengurangan Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau pengurangan pajak penghasilan (PPH) untuk sektor-sektor strategis.
- b. **Kebijakan Subsidi atau Bantuan Modal:** Menyediakan skema bantuan modal untuk investor dalam bentuk subsidi biaya operasional atau fasilitas pembiayaan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan daerah atau bank.
- c. **Bebas Biaya Izin dan Pengurusan Administratif untuk Investasi Baru:** Menawarkan fasilitas bebas biaya untuk pengurusan izin bagi investor yang berinvestasi di sektor-sektor unggulan, seperti energi terbarukan, industri pengolahan, dan pariwisata.
- d. **Fasilitas Kawasan Industri Khusus:** Menyediakan insentif untuk perusahaan yang ingin berinvestasi di Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT), seperti diskon sewa tanah, pengurangan biaya perizinan, dan kemudahan akses kredit.

Tujuan: Memberikan insentif yang menarik untuk investor, mendorong investasi baru, dan mempercepat pengembangan sektor unggulan.

4. **Penguatan Kapasitas SDM dan Layanan Investasi**

Pihak Terkait: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Balai Latihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah (Bappelitbangda).

Langkah-Langkah:

- a. **Peningkatan Kualitas SDM:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang, terutama di sektor yang menjadi fokus investasi.

- b. **Penyediaan Pelatihan untuk Pelaku Usaha Lokal:** Menyediakan program pelatihan untuk pelaku usaha lokal dalam hal manajemen bisnis, keterampilan teknis, dan teknologi terbaru, agar mereka dapat bersaing dengan perusahaan besar dan mendapatkan manfaat dari investasi yang masuk.
- c. **Penguatan Layanan Investasi:** Meningkatkan layanan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan unit layanan lainnya untuk memastikan investor mendapat bantuan dan informasi yang cepat, jelas, dan efisien tentang prosedur perizinan, insentif, dan peraturan yang berlaku.

Tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap bekerja di sektor-sektor yang berkembang, serta memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas untuk investor.

5. **Promosi dan Pemasaran Daerah untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi**

Pihak Terkait: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketenakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), DISPORA BUDPAR.

Langkah-Langkah:

- a. **Kampanye Promosi Investasi:** Menyusun dan melaksanakan kampanye promosi investasi yang agresif melalui media massa, pameran internasional, dan seminar bisnis untuk menarik perhatian investor domestik dan asing. Promosi ini harus menekankan potensi sektor-sektor unggulan.
- b. **Penawaran Paket Investasi Menarik:** Mempromosikan paket investasi khusus untuk sektor-sektor tertentu yang memberikan keuntungan jangka panjang bagi investor, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
- c. **Meningkatkan Konektivitas Internasional:** Membuka akses lebih besar untuk pasar internasional melalui kemitraan internasional dan memperkuat konektivitas transportasi dan logistik.

Tujuan: Meningkatkan daya tarik Kabupaten Batu Bara sebagai lokasi investasi yang strategis, serta menciptakan iklim yang lebih terbuka bagi investor luar negeri.

Skema kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Batu Bara dengan pendekatan yang terintegrasi. Keberhasilan skema ini

bergantung pada kolaborasi aktif antara berbagai perangkat daerah, pemberian insentif yang menarik, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kebijakan ini, Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik lebih banyak investor, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja persentase Nilai Investasi PMDN dan PMA terhadap realisasi anggaran program pengendalian iklim penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN PMA)	54 Triliun	52.884.243.610.119	97,93	875.326.912	868.176.050	99,19	0,97

Capaian kinerja mencapai **97,93%** dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan pencapaian yang sangat baik, meskipun tidak mencapai 100%, namun masih berada dalam jarak yang relatif dekat dengan target. Artinya, hampir seluruh target investasi dapat tercapai, dan meskipun ada sedikit penurunan, pencapaian ini masih mencerminkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menarik investasi.

Realisasi anggaran mencapai **99,18%** dari anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target investasi digunakan dengan sangat efisien. Selisih kecil antara anggaran yang ditetapkan dan yang digunakan (hanya 0,82% lebih sedikit dari anggaran yang dialokasikan) menunjukkan bahwa tidak ada pemborosan yang signifikan dalam penggunaan dana.

Sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri	Persen	100	100	100	100	100	100

Industri merupakan salah satu penggerak utama ekonomi wilayah yang akan berperan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Pengembangan kawasan industri di suatu daerah membutuhkan dasar berupa rencana tata ruang dan wilayah. Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memiliki 2 (dua) Peraturan Daerah terkait rencana tata ruang dan wilayah, sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan industri, yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung Tahun 2020 – 2040.

Upaya Pemerintah pusat untuk mengajak pemerintah daerah tingkat I dan II untuk segera menyelesaikan rencana tata ruang dan wilayah di masing-masing daerah, telah ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Adapun Sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri, memiliki 1 (satu) indikator yang dapat disimak pada penjelasan dibawah ini:

Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri.

Pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan izin

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diberikan. Indikator kinerja ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rekapitulasi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan tahun 2024 dan sesuai hasil pemantauan dilapangan diketahui bahwa dari 120 subjek pemohon tidak ada peruntukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran ini **sesuai target** yang direncanakan/ diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian ini tetap konsisten dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan konsep kebijakan yang disusun dan dituangkan dalam peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Batu Bara, persentase terselenggaranya pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang didukung oleh beberapa perangkat daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki konsep kebijakan Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah penyedia data dalam pengembangan daerah.

Dalam rangka perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja dan realisasi meningkatnya perencanaan dan pemanfaatan ruang, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program kegiatan sesuai dengan target *ouput* dan *outcome* yang ingin dicapai;
2. Melakukan pendataan terhadap kebutuhan bangunan gedung daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam mengukur kinerja program dan kegiatan;
3. melakukan pendataan dan perencanaan program kegiatan bidang pertanian yang berkaitan dalam mendukung perencanaan dan kepemanfaatan ruang.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh beberapa factor, antara lain:

1. Tersedianya SDM sebagai petugas administrasi dan petugas lapangan;
2. Didukung dengan pendanaan yang cukup;
3. Kolaborasi dari seluruh perangkat daerah terkait, terutama pihak DPMPTSP;
4. Terhadap program yang sesuai.

Kinerja nyata terhadap indikator ini mencapai 100% dan memenuhi target 100% yang telah ditetapkan pada Perjanjian Bupati. Persentase capaian indikator ini sebesar 100% termasuk dalam Kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks						

Dengan target IKLH sebesar 71,00 dan realisasi 59,86, persentase capaian kinerja IKLH Kabupaten Batu Bara tahun 2024 mencapai sekitar 84,31% dari target yang ditetapkan. Realisasi capaian IKLH Kabupaten Batu Bara hanya mencapai 59,86, menunjukkan selisih negatif sebesar 11,14 poin dari target yang ditetapkan. Indikator IKLH baru diterapkan pada tahun 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk membandingkan capaian tahun 2024 dengan data tahun sebelumnya. Selain itu, data IKLH untuk Kabupaten Batu Bara tahun 2023 belum tersedia secara publik.

Berikut adalah perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan nasional:

Wilayah	Tahun	IKLH
Kabupaten Batu Bara	2024	59,86
Provinsi Sumatera Utara	2022	74,11
Nasional	2024	73,07

Untuk Provinsi Sumatera Utara, data spesifik mengenai IKLH tahun 2024 belum tersedia dalam sumber yang ada. Namun, berdasarkan tren sebelumnya, IKLH Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari 69,90 poin

pada tahun 2020 menjadi 74,11 poin pada tahun 2022.

Berdasarkan data BPS, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 menunjukkan nilai sebagai berikut:

1. **Indeks Kualitas Air (IKA) - 50:** Nilai IKA sebesar 50 menunjukkan kualitas air yang kurang baik. Hal ini dapat disebabkan oleh polusi dari limbah industri, pertanian, atau domestik yang mencemari sumber air. Kurangnya fasilitas pengolahan air dan sanitasi yang memadai juga dapat berkontribusi pada rendahnya nilai IKA.
2. **Indeks Kualitas Udara (IKU) - 87,71:** Nilai IKU sebesar 87,71 menunjukkan kualitas udara yang baik. Namun, perlu diwaspadai bahwa peningkatan aktivitas industri dan kendaraan bermotor dapat meningkatkan emisi polutan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas udara.
3. **Indeks Kualitas Lahan (IKL) - 25,27:** Nilai IKL yang sangat rendah menunjukkan degradasi lahan yang signifikan. Faktor penyebabnya antara lain konversi lahan untuk pertanian dan pembangunan, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya upaya konservasi tanah.

Analisis Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja Kabupaten Batu Bara Tahun 2024:

Berdasarkan data di atas, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja IKLH Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 antara lain:

1. **Polusi Air dan Sanitasi yang Buruk:** Pencemaran air akibat limbah domestik dan industri yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kualitas air. Kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak juga berkontribusi pada masalah ini.
2. **Degradasi Lahan:** Praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan tanpa diimbangi dengan upaya konservasi, dapat menyebabkan erosi dan penurunan kesuburan tanah.
3. **Keterbatasan Infrastruktur Lingkungan:** Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, pengolahan air limbah, dan sistem drainase yang baik dapat memperburuk kondisi lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

4. **Kurangnya Penegakan Regulasi Lingkungan:** Kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dapat menyebabkan praktik-praktik yang merusak lingkungan terus berlangsung tanpa sanksi yang jelas.

Adapun langkah konkrit atau solusi yang akan dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya adalah:

1. **Peningkatan Infrastruktur Sanitasi dan Pengolahan Air:** Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan memperbaiki sistem pengolahan air untuk memastikan kualitas air yang baik.
2. **Pelestarian dan Konservasi Lahan:** Mengimplementasikan praktik pertanian berkelanjutan, reforestasi, dan konservasi tanah untuk mencegah degradasi lahan.
3. **Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah:** Menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
4. **Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan:** Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Dengan mengaddress faktor-faktor di atas, diharapkan Kabupaten Batu Bara dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 84,31% dengan predikat tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks desa membangun	Indeks	0,7073	0,6968	98,52	0,7176	0,7093	98,84

Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksanaan

kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strategi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan.

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dapat dilihat pada indikator di bawah ini:

Indeks desa membangun

Indeks Desa Membangun disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Artinya IDM dapat digunakan untuk mengukur Pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Kapasitas

desa. Kenapa demikian? Karena IDM akan dijadikan sebagai embrio lahirnya Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di tahun berikutnya. Selain itu, IDM dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk Menyusun kebijakan pembangunan ke depannya dalam hal ini dapat berupa peraturan bupati atau keputusan bupati tentang pengelolaan dana yang ada di desa demi kemajuan Desa. Fungsi yang lain dari IDM dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran Desa yaitu dapat dijadikan sebagai bahan dalam Musrenbang Desa untuk Menyusun rencana kegiatan di tahun berikutnya. Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal: $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju: $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Upaya dalam mencapai sasaran ini merupakan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai perangkat daerah utama. Dengan beberapa program yang dilakukan seperti meningkatkan kualitas kerjasama desa, meningkatkan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa, meningkatkan kualitas lembaga desa. Selain itu terdapat 2 (dua) perangkat daerah pendukung, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dengan program peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan upaya peningkatan pencatatan sipil, peningkatan kualitas pengelolaan informasi kependudukan.

Persentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,84% yang berasal dari perhitungan target 0,7176 dan realisasi 0,7093, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan realisasi 0,6968, terjadi peningkatan indeks desa membangun sebesar 0,0125 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 0,7440 pencapaian ini masih kurang sebesar 0,0347. Capaian keberhasilan ini didukung komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan peran aktif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa, seperti pelaksanaan lomba desa terbaik serta melakukan pembinaan desa percontohan.

Secara Keseluruhan untuk target Indeks Desa Membangun (IDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 yaitu 0,7176 dengan realisasi 0,7093, dari segi angka tidak mencapai target begitu juga dari segi status desa belum tercapai yaitu Desa Maju. Berikut disajikan klasifikasi status desa dari hasil perhitungan IDM untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 digambarkan dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 3.15.
Klasifikasi status desa dari hasil perhitungan IDM Tahun 2022 sampai 2024
Kab. Batu Bara

Status Desa	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	(Jlh Desa)	(Jlh Desa)	(Jlh Desa)
Sangat Tertinggal	0	0	0
Tertinggal	4	1	0
Berkembang	96	86	73
Maju	30	38	49
Mandiri	11	16	19
Jumlah	141	141	141

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 terdapat beberapa perubahan status desa. Untuk desa tertinggal terdapat penurunan sebanyak 1 desa yang naik status menjadi desa berkembang, sehingga kondisi desa tertinggal di Kabupaten Batu Bara sudah tidak ada lagi. Untuk desa berkembang terdapat 13 desa yang naik status menjadi desa maju. Untuk desa maju terdapat penambahan sebanyak 11 desa dan untuk desa mandiri terdapat penambahan sebanyak 3 desa.

Hal ini menunjukkan bahwa rata rata desa di Batu Bara berdasarkan data IDM adalah desa berkembang (73 desa). Status berkembang berarti kinerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sudah terpenuhi namun belum maksimal. Artinya adalah seluruh fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, fasilitas perekonomian, alat peringatan dini bencana dan proses pencegahan bencana air, tanah dan udara telah terpenuhi dan berjalan dengan baik namun belum mencakup semuanya. Sehingga diperlukan peran dari Pemerintah desa melalui dana desa, pemerintah kabupaten melalui APBD nya dan Propinsi serta pusat untuk dapat memenuhi semua cakupan dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkat status desa menjadi desa maju dan mandiri.

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Kurangnya sumber daya dalam melakukan pengukuran IDM di desa karena Pendamping Lokal Desa masih menaungi 3 sampai 4 desa sehingga data yang

didapat dikhawatirkan kurang maksimal.

2. Adanya beberapa indikator IDM sulit tercapai misalnya pelaksanaan kegiatan Gotong Royong, walaupun begitu indikator ini dapat ditutupi dari nilai indikator yang lainnya.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara:

1. Adanya Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa bersama tenaga ahli P3MD dalam melakukan pengisian data Questioner yang merupakan dasar untuk menghitung angka IDM.
2. Penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran sehingga mendukung angka untuk indikator dalam pengisian questioner IDM dari tiga indikator yaitu IKE, IKS dan IKL. Indeks Ketahanan Ekonomi melalui pengembangan lembaga ekonominya (BUMDES). Bahkan di Kecamatan Lima Puluh sudah terbentuk Bumdes Bersama yang merupakan kerjasama dari 11 Desa. Kesepakatan bersama ini tertuang dalam Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Lima Puluh Berkarya Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Masa Bhakti 2020 – 2025. Dari segi Indeks Ketahanan Sosial sudah dilaksanakan kegiatan gotong royong di beberapa desa yang dilaksanakan Dinas PMD, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong tersebut, dilakukan pembersihan terhadap jalan – jalan protokol desa, drainase, halaman rumah penduduk dan lokasi tumpukan sampah. Kegiatan gotong royong dilaksanakan sebagai upaya menciptakan desa yang bersih dan menghidupkan kembali semangat kebersamaan bergotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung capaian kinerja indikator IDM adalah :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa / Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa / Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat / kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks gini	Persen		0,235		0,240	0,230	104,17

Menurutnya tingkat ketimpangan pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini bernilai nol, jika pendapatan menyebar secara merata dan mendekati 1 jika distribusi pendapatan tidak menyebar secara merata.

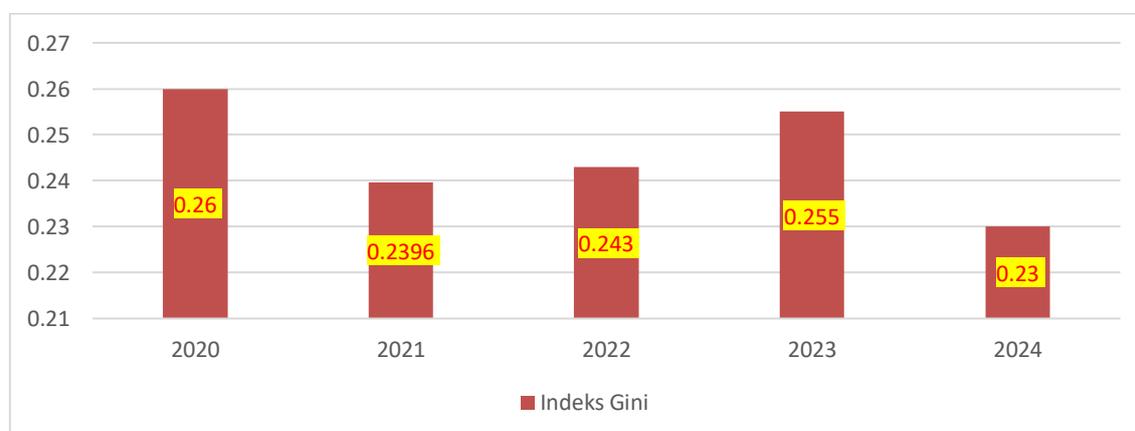
Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Indeks gini, yang penjelasannya dapat disimak berikut ini:

Indeks Gini

Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi menggunakan indikator Indeks gini. Indeks Gini atau Indeks Ketimpangan Pendapatan menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Batu Bara menargetkan Indeks Gini pada Tahun 2024 sebesar 0,240.

Target 0,240 merupakan target wajar yang dipilih berdasarkan analisis pertimbangan dan berdasarkan hasil proyeksi Bappeda dengan mempertimbangkan trend angka gini rasio pada tahun sebelumnya, serta kondisi pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Kabupaten Batu Bara.

Grafik 3.10.
Trend Indeks Gini Kabupaten Batu Bara Periode 2020-2024



Realisasi indeks gini pada tahun 2024 turun menjadi 0,230. Nilai ini lebih rendah 0,025 poin dibandingkan kondisi tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 0,21, terdapat selisih 0,02 poin. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan sudah semakin merata. berikut adalah perbandingan **Gini Ratio** antara nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Batu Bara:

Tabel. 3.16.
perbandingan Gini Ratio antara nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Batu Bara

Wilayah	Tahun	Indeks Gini
Nasional	2024	0,381
Prov. Sumut	2024	0,297
Kab. Batu Bara	2024	0,230

Gini Ratio mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dengan nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna merata dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang maksimal. Gini Ratio nasional sebesar 0,381 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang moderat. Provinsi Sumatera Utara memiliki Gini Ratio yang lebih rendah, yaitu 0,297, mengindikasikan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kabupaten Batu Bara memiliki Gini Ratio terendah di antara ketiganya, yaitu 0,23. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Batu Bara lebih merata dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional secara keseluruhan.

Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja serta penurunan kemiskinan. Selain itu terdapat aspek pendukung antara lain, peningkatan produktivitas koperasi, peningkatan usaha mikro dan kecil.

Untuk pencapaian yang lebih baik terhadap indikator ini, mensyaratkan keterlibatan beberapa Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Ketenagakerjaan, perindustrian dan Perdagangan mengambil peranan paling pokok dan paling besar.

Pada proses pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UMKM bertanggungjawab terhadap pengembangan koperasi dan pengembangan usaha kecil dan usaha menengah, yang meliputi peningkatan kesejahteraan anggota

koperasi dan kesejahteraan anggota UMKM, meningkatkan level skala usaha mikro ke usaha kecil dan meningkatkan pertumbuhan usaha baru baik usaha di level mikro, kecil dan menengah.

Langkah besar yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM adalah dengan melakukan terobosan mendirikan rumah kemasan, sehingga produk para pelaku UMKM menjadi layak untuk dipasarkan di beberapa mini market yang terdapat di Batu Bara dan Simalungun. Selain rumah kemasan ada juga rumah batik bagi pengrajin batik di Batu Bara.

Dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, Dinas Ketenagakerjaan, perindustrian dan Perdagangan melaksanakan beberapa program antara lain, peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja, peningkatan kualitas pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas penempatan tenaga kerja.

Kontribusi dan dukungan juga dilaksanakan oleh 12 Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pembinaan Bumdes.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** yang disusun dalam kerangka **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** memiliki peran yang sangat penting.

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023
Pendapatan Daerah	1.341.271.360.672,00	1.315.883.382.650,63	1.265.396.513.884,55
Belanja Operasi	973.166.769.792,00	921.058.532.525,43	834.588.248.911,13
Belanja Modal	159.946.269.179,00	155.752.728.512,00	264.161.531.087,00
Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	0,00	998.500.000,00
Belanja Transfer	209.872.260.415,00	209.872.260.415,00	205.261.659.200,00
Jumlah Belanja	1.343.185.299.386,00	1.286.683.521.452,43	1.305.009.939.198,13
Surplus/Defisit	(1.913.938.714,00)	29.199.861.198,20	(39.613.425.313,58)
Penerimaan Pembiayaan	14.826.223.186,00	14.826.223.186,56	68.351.792.972,14
Pengeluaran Pembiayaan	12.912.284.472,00	12.912.284.472,00	13.912.144.472,00
Pembiayaan Netto	1.913.938.714,00	1.913.938.714,56	54.439.648.500,14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	31.113.799.912,76	14.826.223.186,56

Dari tabel diatas dapat disimpulkan:

1. Terdapat penurunan realisasi pendapatan tahun 2024 dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan, yaitu sekitar 1,89%. Namun, realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sekitar 3,98% dibandingkan dengan tahun 2023.
2. Realisasi belanja operasi tahun 2024 mencapai 94,65% dari anggaran yang ditetapkan, dan meningkat sekitar 10,34% dibandingkan tahun 2023.
3. Realisasi belanja modal tahun 2024 mencapai 97,36% dari anggaran, namun menurun sekitar 41,04% dibandingkan dengan tahun 2023.
4. Tidak terdapat realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2024, berbeda dengan tahun 2023 yang terealisasi penuh.
5. Realisasi belanja transfer tahun 2024 sesuai dengan anggaran dan meningkat sekitar 2,24% dibandingkan tahun 2023.
6. Terdapat surplus sebesar Rp29.199.861.198,20 pada tahun 2024, sedangkan tahun 2023 mengalami defisit.
7. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sesuai dengan anggaran, namun menurun signifikan dibandingkan tahun 2023.

8. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 sesuai dengan anggaran dan menurun dibandingkan tahun 2023.
9. SiLPA tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023, menunjukkan adanya efisiensi dalam belanja dan/atau peningkatan pendapatan.

Kabupaten Batu Bara berhasil mencapai surplus anggaran pada tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami defisit pada tahun 2023. Peningkatan realisasi pendapatan dan efisiensi dalam belanja operasi serta transfer berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, penurunan belanja modal perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kualitas infrastruktur dan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap program belanja modal dan memastikan alokasi anggaran yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

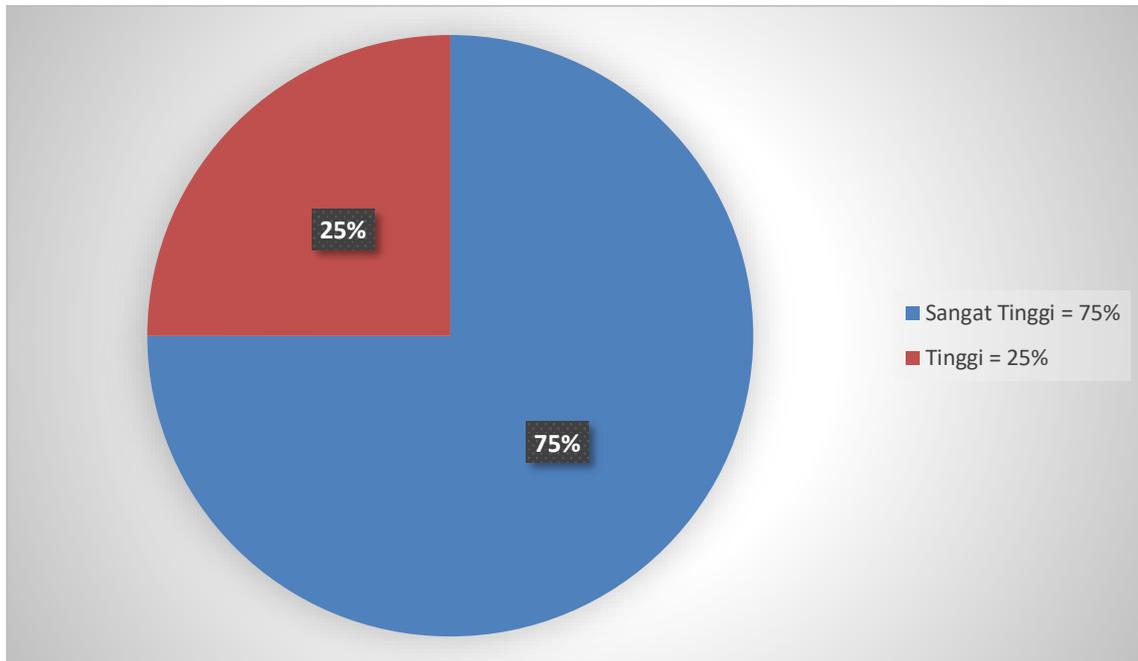
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jawaban dari Visi, Misi dan Tujuan Strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

LKIP Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. 15 (enam belas) indikator sasaran atau sebanyak 75% masuk dalam kategori **Sangat tinggi**, 6 (enam) dari 20 (dua puluh) indikator pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja,
2. 5 (lima) IKU atau sebanyak 25% masuk dalam kriteria **tinggi**,

Grafik 4.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah
Kabupaten Batu Bara Tahun 2024



Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian %	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Indikator	100,05	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	2 Indikator	98,99	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	2 Indikator	89,76%	Tinggi
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	1 Indikator	100,33%	Sangat Tinggi
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	1 Indikator	100,82%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Indikator	105,36%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perternakan, Dan Perikanan	1 Indikator	98,00%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	1 Indikator	95,78%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Indikator	100,83%	Sangat Tinggi
10	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1 Indikator	98,23	Sangat Tinggi

11	Meningkatnya Inovasi Daerah	1 Indikator	85,47%	Tinggi
12	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	1 Indikator	86,14%	Tinggi
13	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	1 Indikator	99,13%	Sangat Tinggi
14	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	1 Indikator	97,93%	Sangat Tinggi
15	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	1 Indikator	100,00%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indikator	84,31%	Tinggi
17	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indikator	98,84%	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	1 Indikator	104,17%	Sangat Tinggi

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target, kami menyadari kelemahan dan ketidak sempurnaan kami. Segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk menjadi barometer keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan lebih meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang.

Lima Puluh, 26 Maret 2025
 Bupati Batu Bara,

 Baharuddin Siagian